



**Dinas Perindustrian dan
perdagangan Provinsi Bali**



**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA**

ROAD MAP PENGEMBANGAN INDUSTRI AGRO UNGGULAN PROVINSI BALI

2015

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
5.1	Nilai Investasi dan Nilai Produksi Industri Kecil dan Menengah	39
5.2	Perkembangan Realisasi Ekspor Non Migas Daerah Bali tahun 2008 - 2012	41
5.3	Realisasi ekspor menurut kelompok komoditi tahun 2008-2012	42
5.4	Total Impor Bali tahun 2008 s/d 2012	43
5.5	Penerimaan dari kegiatan Terra tahun 2008-2012	47
6.1	Sentra Pengembangan Komoditi Unggulan di Provinsi Bali	52
6.2	Produksi Kelapa Dalam	53
6.3	Produksi Kopi	54
6.4	Produksi Cengkeh	55
6.5	Produksi Jambu Mente	56
6.6	Produksi Kakao	57
6.7	Produksi Buah-buahan	58
6.8	Daftar Panjang Komoditi Unggulan Provinsi Bali.	63
6.9	Kriteria dan sub kriteria penentuan prioritas Komoditi unggulan provinsi Bali.	64
6.10	Komoditi yang menempati posisi teratas.	67
6.11	Lima komoditi unggulan	68
6.12	Deskripsi dari Komoditi Terpilih	70
6.13	Jalur distribusi Kopi dan Aktivasnya	74
6.14	Jalur Distribusi Mete dan Aktivasnya	76
6.15	Jalur Distribusi Mete dan Aktivasnya	79
6.16	Jalur Distribusi Mete dan Aktivasnya	80
8.1	Kriteria, Sub Kriteria dan Bobot Penentuan Lokus Industri Agro Unggulan	110

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
6.1	Daftar panjang komoditi unggulan di provinsi Bali	67
6.2	Jalur distribusi Buah-buahan	75
6.3	Jalur Distribusi Mete	77

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	i
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR ISI	iii
KATA PENGANTAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3. Sistematika Penulisan	4
1.4. Maksud dan Tujuan	6
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI AGRO	8
2.1. Visi	8
2.2. Misi	8
3.3. Tujuan dan Sasaran	9
BAB III HUBUNGAN DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAIN	10
3.1. Hubungan dengan RPJPD Propinsi	10
3.2. Hubungan dengan RPJMD Propinsi	11
3.3. Hubungan dengan RIPIN	13
3.4. Hubungan dengan Kebijakan Industri Nasional (KIN)	15
BAB IV STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INDUSTRI AGRO NASIONAL	16
4.1. Sasaran dan Tahapan Capaian Pembangunan Industri Nasional	17
4.1.1 Sasaran Pembangunan Industri Nasional	
4.1.2 Tahapan Pencapaian Pembangunan Industri Nasional	18
4.2. Arah Kebijakan Pembangunan Industri Nasional Sesuai RPJMN 2015–2019	22
BAB V GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	24
5.1. Aspek Geografi dan Demografi	24
5.2. Potensi Pengembangan Wilayah	27
5.3. Aspek Daya Saing Daerah	31
5.2.1. Kemampuan Ekonomi Daerah	31
5.2.2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	32
5.2.3. Iklim Berinvestasi	34
5.2.4. Sumberdaya Manusia	
5.4. Aspek Perkembangan Sektor Industri Agro	37
5.3.1. Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Industri Agro	39
5.3.2. Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Agro	40

5.3.3. Jumlah Unit Usaha Sektor Industri Agro	40
5.3.4. Ekspor dan Impor Produk Industri Agro	42
BAB VI PENETAPAN KOMODITAS INDUSTRI AGRO UNGGULAN	50
6.1. Identifikasi Longlist Komoditas Industri Agro Unggulan	50
6.2. Penetapan Komoditas Prioritas Industri Agro Unggulan Daerah	64
6.2.1. Metode penentuan komoditas prioritas industri agro unggulan daerah	64
6.2.2. Penentuan Kriteria Pemilihan Komoditas Unggulan	65
6.2.3 Komoditas Industri Agro Unggulan Daerah Prioritas	67
6.2.4 Analisis Rantai Pasok	72
6.2.5 Analisis Rantai Nilai	79
6.3 Analisis SWOT Berbasis THIO (technology, Human resource, Informasi dan Organization)	82
BAB VII ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN INDUSTRI AGRO PROPINSI	94
7.1. Perumusan Permasalahan Pembangunan Industri Agro Propinsi	94
7.1.1. Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Pembangunan Industri Agro Propinsi	94
7.1.2. Identifikasi Permasalahan untuk Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Industri Agro	96
7.2. Isu-Isu Strategis	102
BAB VIII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI AGRO PROPINSI	104
8.1. Kebijakan Umum	104
8.2. Arah Kebijakan dan Pelaksanaan Strategi	106
8.2.1. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi Misi Pertama	106
8.2.3. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi Misi Kedua	107
8.2.3. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi Misi Ketiga	107
8.3. Program Pembangunan Industri Prioritas Agro Propinsi	108
8.3.1. Program Pembangunan Industri Agro Kopi	108
8.3.2. Program Pembangunan Industri Agro Buah-buahan	109
8.3.3. Program Pembangunan Industri Agro Jambu Mete	110
8.4. Lokus Pembangunan Industri Agro Prioritas Propinsi	112
8.4.1. Program Pembangunan Industri Agro Kopi	113
8.4.2. Program Pembangunan Industri Agro Buah-buahan	113
8.4.3. Program Pembangunan Industri Agro Jambu Mete	113

BAB IX INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN PAGU	114
9.1. Prioritas Pembangunan Industri Agro	114
9.2. Indikasi Rencana Program Pembangunan Industri Agro Prioritas dan Pagu	116
BAB X PENETAPAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN INDUSTRI AGRO PROPINSI	120
10.1 Penetapan Indikator Kinerja Pembangunan Industri Agro Kopi Propinsi	120
10.2 Penetapan Indikator Kinerja Pembangunan Industri Agro Buah-buahan Propinsi	122
10.3 Penetapan Indikator Kinerja Pembangunan Industri Agro Mete Propinsi	125
10.4 Road Map Pembangunan Industri Agro Unggulan Provinsi Bali	128
Lampiran Roadmap Pengembangan Industri Agro Kopi Provinsi Bali	
Lampiran Roadmap Pengembangan Industri Agro Salak Provinsi Bali	
Lampiran Roadmap Pengembangan Industri Agro Mete Provinsi Bali	
BAB XI PENUTUP	129

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu

Om Ano Baddrah Kratavo Yantu Wicwatah

Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru

Puja dan puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kertha waranugeraha-Nya kami Tim POKJA Penyusunan Peta Potensi Pengembangan Industri Agro Unggulan Provinsi Bali telah berhasil menyusun dokumen Peta Potensi Pengembangan Industry Agro Unggulan Provinsi Bali ini. Dokumen ini merupakan kristalisasi dari keinginan kami dalam mewujudkan apa yang kami cita-citakan yang tercermin dalam wujud visi dan misi perindustrian dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.

Dalam dokumen ini, telah diuraikan secara jelas visi, misi, sasaran dan strategi pembangunan industri agro unggulan Provinsi Bali yang merupakan turunan dari Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Republik Indonesia. Sesuai dengan cita-cita luhur nasional di bidang perindustrian yaitu menjadi Negara Industri yang Maju, maka dokumen ini telah disusun sebagai wujud nyata peran serta dari Provinsi Bali dalam mewujudkan cita-cita mulia tersebut.

Selain hal tersebut di atas, dokumen ini juga diharapkan menjadi acuan bagi semua pemangku kepentingan agar dapat melangkah dengan arah dan tujuan yang sama dalam rangka mewujudkan Bali sebagai salah satu daerah industri agro yang berdaya saing tinggi. Gerak langkah yang seirama ini sangat penting mengingat begitu besarnya tantangan yang akan dihadapi dalam mewujudkan sebuah daerah industri. Apapun gerak kita, oleh siapa pun, semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan semua pihak yang terkait dengan industri agro. Oleh karena itu, sekali lagi kita patut bersyukur atas tersusunnya dokumen eta Potensi Pengembangan Industry Agro Unggulan Provinsi Bali ini.

Namun, patut disadari bahwa, dokumen ini merupakan gambaran ideal dari gerak langkah semua pihak, karena itu langkah selanjutnya adalah realisasi dari rencana langkah-langkah yang telah dituangkan dalam dokumen ini, yang tentunya jauh memerlukan energi, pemikiran, dukungan serta inisiatif dari semua pihak. Karena itu, kami berdoa dan berharap apa yang telah dicita-citakan dalam dokumen ini bisa menjadi inspirasi yang akan memercikan inspirasi dan inisiatif baru demi penyempurnaannya.

Sebagai akhir dari rasa syukur ini, ijin Kami mengucapkan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam merangkum semua ide dan saran sampai tersusunnya dokumen Peta Potensi Pengembangan Industri Agro Unggulan Provinsi Bali ini.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Bali

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bali sebagai destinasi pariwisata memberikan peluang yang sangat besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali. Setiap tahun rata-rata kunjungan wisatawan mencapai 1,2 juta orang/tahun. Tentu apabila dipandang sebagai pasar jumlah tersebut merupakan pangsa pasar yang sangat besar dan potensial. Kebutuhan para wisatawan bukan hanya terbatas pada penginapan saja namun juga menyangkut kebutuhan dasar lain yaitu pangan.

Bali sebagai pulau kecil dengan topografi yang beragam dan dengan karakteristik wilayah yang merentang dari daerah kering sampai basah, mempunyai dua gunung api yang memberikan suplay nutrisi kepada tanah, mempunyai perbukitan yang memusat sehingga menjadi sumber penangkap air hujan (tingkatan air hujan) membuat Bali kaya akan produk agro yang tersedia sepanjang musim secara bergantian.

Namun sampai saat ini, serapan produk pertanian Bali masih sangat terbatas ke sektor pariwisata. Beberapa kendala yang dihadapi karena permodalan. Untuk bisa menyediakan produk kebutuhan pariwisata diperlukan modal yang besar karena sistem pembayaran tidak seperti cara konvensional dimana ada barang ada uang, melainkan pembayaran dilakukan secara periodik sesuai dengan perjanjian. Hal ini tentu tidak memungkinkan bagi kelompok tani yang mempunyai permodalan relative kecil atau hidup dari produksi pertanian. Permasalah yang kedua yang paling tampak adalah kualitas produk pertanian masih belum dikreasi dari kebutuhan atau standar yang diterapkan oleh sector pertanian. Penerapan Good Handling Procedures (GHP) ataupun GMP masih belum dijadikan metode dalam proses produksi dan penanganan pasca panen produk. Hal ini mengakibatkan rendahnya penerimaan produk pertanian local. Di lain pihak, produk dari Negara lain yang diimpor mempunyai daya saing yang tinggi

karena mutu dan juga pasokan yang baik. Permasalahan ketiga adalah kontinuitas dalam pasokan baik terkait jumlah maupun konsistensi mutu.

Permasalahan yang kerap dihadapi oleh petani terutama petani monokultur adalah terjadinya overproduksi pada saat musim panen raya. Overproduksi mengakibatkan terjadinya penurunan harga yang sangat drastic bahkan harga jual tidak mampu mencapai titik impas karena biaya produksi dan biaya panen yang tinggi, ditambah lagi oleh biaya distribusi dan loses selama proses distribusi. Gejala permasalahan ini sedikit lebih kecil pada sector perkebunan karena karakteristik produk yang lebih tahan terhadap kerusakan.

Berdasarkan dua permasalahan utama yaitu ketidakseragaman mutu dan juga kemungkinan terjadinya overproduksi, maka pilihan untuk melakukan proses hilirisasi produk (membuat produk turunan yang memiliki nilai lebih tinggi menjadi kebutuhan untuk meningkatkan peranan sector pertanian dalam kesejahteraan petani local. Namun hilirisasi produk pertanian tidak mudah, dikarenakan bali sampai saat ini belum pernah diproyeksikan sebagai sentra industry terutama industry skala besar. Hal ini menyisakan permasalahan lanjutan diantaranya, ketidaksiapan dalam hal dukungan kebijakan terhadap industry agro skala besar, adopsi teknologi yang masih lambat, tidak terbangunnya fasilitas pendukung industry yang baik, serta membanjirnya produk industry ke bali yang membuat persaingan pasar di sector ini menjadi sangat ketat.

Namun hilirisasi produk pertanian adalah peluang bagi peningkatan kesejahteraan petani local bali, karena itu, bali harus menyiapkan diri dari sekarang menuju daerah industry agro yang berkonsentrasi pada peningkatan nilai tambah produk local. dalam rangka proses ini, maka sangat diperlukan adanya peta potensi industry agro unggulan daerah yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Induk Pembangunan industry Provinsi(RIPIP). Dengan adanya RIPIP semua pemangku kepentingan memiliki acuan untuk mengambil kebijakan dan arah pembangunan sector industry agro.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Sesuai amanat pasal 10 dan 11 Undang-Undang No.3 Tahun 2014, disebutkan bahwa

1. Setiap Gubernur/Bupati/Walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota
2. Rencana Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional
3. Rencana pembangunan industri Provinsi/Kabupaten/Kota disusun dengan paling sedikit memperhatikan:
 - a. Potensi sumber daya industri daerah
 - b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota
 - c. Keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan industri di Provinsi/kabupaten/kota serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan
 - d. Adapun Rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota mengacu pada rencana pembangunan industri Provinsi
4. Rencana Pembangunan Industri Provinsi/kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi/kabupaten/kota setelah dievaluasi oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Oleh karena itu, merupakan kebutuhan bagi Pemerintah Provinsi untuk menyusun Peta Potensi Industri Agro Unggulan Daerah provinsi Bali yang akan menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat.

Landasan hukum penyusunan Peta Potensi Industri Agro Unggulan Daerah provinsi Bali adalah seperti diuraikan di bawah ini.

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5492);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

- RI Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4023);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4095);
 7. Keputusan Presiden Tahun 42 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4418);
 8. Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tanggal 31 Juli 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Peta Potensi Industri Agro Unggulan ini didasarkan pada Peraturan Direktorat Jenderal Industri Agro Nomor 20/IA/PER/3/2015 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan melalui dana dekonsentrasi pengembangan industri agro unggulan daerah direktorat jenderal industri agro tahun 2015.

Sistematika penyusunannya dapat diuraikan sebagai berikut: dimulai dengan latar belakang pentingnya peta potensi industri agro unggulan daerah yang didasarkan pada permasalahan umum pengembangan industri agro di daerah. Tahapan selanjutnya dilakukan pemaparan mengenai gambaran umum kondisi daerah Provinsi Bali menyangkut aspek geografi dan demografi, aspek daya saing Provinsi Bali, kemampuan ekonomi Provinsi Bali, fasilitas wilayah/ infrastruktur provinsi Bali, iklim berinvestasi di provinsi

Bali, aspek sumber daya manusiadi provinsi Bali. Dalam tahapan ini juga digambarkan aspek perkembangan sector industry agro di provinsi Bali yang menyangkut tentang pertumbuhan dan kontribusi sector industry bagi provinsi Bali, penyerapan tenaga kerja dari sektor industri di Provinsi Bali serta ekspor dan impor industry agro provinsi Bali.

Bab I Pendahuluan, berisi tentang: latar belakang, dasar hukum penyusunan, sistematika penyusunan serta, maksud dan tujuan.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah, menguraikan tentang: aspek geografi dan demografi, aspek daya saing daerah, serta aspel perkembangan sector industry agro di daerah provinsi Bali.

Bab III Hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya: berisikan hubungan dokumen perencanaan potensi industry agro di provinsi Bali dengan RPJPD Provinsi, Hubungan dengan RPJMD Provinsi, hubungan dengan RIPIN serta hubungannya dengan kebijakan industry nasional (KIN).

Bab IV Analisis Isu-Isu Strategis, menguraikan rumusan permasalahan industry agro provinsi serta isu-isu strategis yang dipertimbangkan.

Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, berisi tentang visi, misi, tujuan dan sasaran.

Bab VI Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan, menguraikan tentang strategi dan arah kebijakan dan yang dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan Misi.

Bab VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Industri Agro Provinsi, menguraikan tentang kebijakan umum, arah kebijakan dan pelaksanaan strategi serta program pembangunan industry ago provinsi.

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Pagu berisi tentang program prioritas pembangunan industry agro serta indikasi rencana program pembangunan industry agro prioritas dan pagu.

Bab IX Penetapan Indikator Kinerja Pembangunan Industri Agro Provinsi.

Bab X Penutup.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Penyusunan peta potensi industry agro unggulan daerah ini dimaksudkan untuk memberikan dasar bagi penyusunan kebijakan di tingkat provinsi dalam upaya pembangunan industry agro unggulan di provinsi bali.

Penyusunan peta potensi industry agro unggulan daerah Provinsi Bali Tahun 2015-2020 dimaksudkan sebagai berikut.

1. Menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam rencana pembangunan periode 5 (lima) tahun yang bersifat indikatif;
2. Menjabarkan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah; dan
3. Mensinergikan dan menyelaraskan kebijakan dan program pembangunan baik di tingkat pusat maupun di daerah, serta aspirasi masyarakat.

1.4.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan peta potensi industry agro unggulan daerah Provinsi Bali Tahun 2015-2020 adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan koordinasi antar pelaku pembangunan, serta menyediakan acuan resmi bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah dalam penyusunan Renstra SKPD, Renja SKPD sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan–pilihan program kegiatan

tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangka forum musyawarah pembangunan daerah secara berjenjang.

2. Meningkatkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.
3. Meningkatkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dan DPRD untuk memahami dalam menentukan program-program pembangunan yang ditindak- lanjuti dengan kegiatan yang nantinya diukur dengan indikator-indikator.
5. Meningkatkan efektivitas, efisiensi penggunaan sumber daya yang berkelanjutan.

BAB II.

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI AGRO

2.1. Visi

Visi pembangunan industri agro unggulan provinsi bali adalah:

“ Menjadikan daerah industri agro yang berdaya saing tinggi”

Penjelasan Visi

Selama ini pertanian lebih ditekankan pada produktivitas dibagian hulu. Secara alami produksi hasil pertanian beragam sehingga tidak semua produksi mampu diserap pasar dengan harga yang pantas. Produk yang dibawah mutu seringkali mengalami kesulitan dalam pemasaran bahkan tidak jarang terbuang percuma karena masa simpan produk yang pendek dan juga biaya distribusi yang tinggi. Kendala lain yang dihadapi adalah terjadinya over produksi pada masa panen raya, membuat pasokan melimpah dan harga turun bahkan pada produk tertentu tidak terpanen karena biaya tenaga kerja yang tinggi untuk panen. Kendala ini mengakibatkan sector pertanian mengalami kerentanan disegala musim akibat sebagian besar produksi pertanian tidak dilakukan pengolahan ataupun dijual dalam bentuk segar. Oleh karena itu, adanya saluran alternative-ataupun mungkin menjadi saluran utama- membuat sektor pertanian mampu diandalkan bagi perekonomian petani khususnya. Jadi terbentuknya sector pertanian di hulu dan di hilir menjadikan sector pertanian mempunyai ketangguhan dalam menghadapi perubahan-perubahan pasar. Industri agro sebagai bagian dari system pertanian di hilir akan memberikan dukungan yang besar kepada ketangguhan pertanian di bagian hulu.

Berdaya saing mengandung arti mempunyai kemampuan dalam menghadapi tekanan-tekanan yang melemahkan posisinya di antara daerah-daerah lain dari sisi industri.

2.2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, maka dinas Perindustrian provinsi bali mengemban misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai subjek dalam pembangunan industri agro provinsi bali
2. Mengembangkan kebijakan pendukung terbentuknya industri agro unggulan provinsi bali
3. Mendorong pengembangan pasar produk industri agro unggulan regional dan internasional

3.3. Tujuan dan Sasaran

3.3.1 Tujuan

1. Meningkatkan daya saing sektor agro melalui pengembangan di bagian hulu dan hilir
2. Meningkatkan kontribusi sektor agro dalam ekonomi daerah
3. Menciptakan lapangan kerja yang lebih besar baik bagi tenaga kerja yang langsung ataupun tidak langsung bersentuhan dengan sektor agro.
4. Meningkatkan percepatan adopsi teknologi bagi peningkatan efisiensi sektor agro.

3.3.2 Sasaran

Sasaran dari pembangunan industri agro unggulan Daerah Bali adalah:

1. Meningkatnya kesejahteraan petani sebagai salah satu stakeholder dalam sektor pertanian.
2. Terjalinnnya sektor hulu pertanian dan IKM serta industri agro unggulan
3. Terciptanya varian produk hilir sektor agro yang mempunyai nilai tambah tinggi.
4. Terwujudnya jaringan distribusi produk turunan sector agro yang baik dan efesien.
5. Tersedianya teknologi pendorong industri agro unggulan skala besar dan kecil guna meningkatkan partisipasi masyarakat non petani dalam sektor agro di hilir.

BAB III

HUBUNGAN DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAIN

3.1. Hubungan dengan RPJPD Provinsi Bali

Sesuai Dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025 telah disebutkan niatan dari pemerintah provinsi bali untuk meningkatkan tingkat serta pemerataan kesejahteraan masyarakat Bali seperti uraian di dalamnya yang menyatakan bahwa :

“Perekonomian daerah Bali dari sisi makro pada 5 (lima) tahun terakhir sampai dengan tahun 2005 cenderung mengalami peningkatan dari angka pertumbuhan 3,05% pada tahun 2000 menjadi 5,56% pada tahun 2005, namun peningkatan tersebut belum memberikan dampak yang nyata pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada sisi lain struktur perekonomian daerah Bali masih rentan terhadap berbagai gejolak karena bertumpu pada sektor tersier terutama pariwisata yang memberikan kontribusi sebesar 64,48% terhadap pembentukan PDRB daerah Bali, namun sektor tersebut sangat peka terhadap berbagai isu. Keterpurukan industri kepariwisataan Bali akhir-akhir ini juga berdampak langsung pada menurunnya aktivitas industri kecil dan rumah tangga, karena permintaan akan produk ekspor non migas dari sektor industri kecil dan rumah tangga menurun, demikian pula pada sektor pertanian mengalami kelesuan dalam pemasaran produknya. Hal ini disebabkan karena rendahnya permintaan baik lokal maupun ekspor, sehingga menurunnya pendapatan petani”.

Dari kutipan dalam Perda tersebut dapat dipahami bahwa posisi penyusunan Potensi Industri Agro Unggulan daerah merupakan dukungan yang besar terhadap upaya pencapaian sasaran dalam perda tersebut. mengandalkan perekonomian pada sector pariwisata yang mencapai 64.48% menyimpan kelemahannya

tersendiri dimana pilar ekonomi berbasis pariwisata sangat rentan mengalami keruntuhan seperti pengalaman yang sudah dialami oleh Provinsi Bali pada Tahun 2002 dengan kejadian Bom Bali (Bali Blast).

Jadi upaya menambah kuat pilar ekonomi Bali dengan pembangunan industri agro unggulan merupakan upaya yang sangat logis mengingat potensi pulau Bali yang besar di sektor pertanian secara luas. Ditambah dengan tersedianya pasar yang terbuka dari sektor pariwisata, menjadikan industri agro adalah salah satu pilar ekonomi yang perlu dibangun.

3.2 Hubungan dengan RPJMD Provinsi Bali

Salah satu visi yang tertuang dalam dalam RPJMD Provinsi Bali telah disebutkan :

Misi 3: "Mewujudkan Bali yang Sejahtera dan *Sukerta* Lahir Bhatin".

Misi ketiga ini bertujuan untuk:

Meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang tangguh, pengembangan industri kecil dan rumah tangga, serta industri pengolahan hasil (pertanian, kelautan dan perikanan), pembangunan bidang pertanian, kelautan, perikanan, dan pariwisata yang saling mendukung, serta pengembangan prasarana dan sarana publik.

Sasaran yang akan dicapai pada tujuan misi ketiga ini adalah:

1. Terwujudnya ekonomi kerakyatan yang tangguh.
2. Berkembangnya industri kecil dan industri rumah tangga yang berdaya saing tinggi.
3. Meningkatnya kemitraan pemasaran hasil industri kecil dan menengah.

4. Meningkatnya minat investasi dengan menyederhanakan kebijakan dan regulasi.
5. Meningkatnya peran sektor pertanian dalam perekonomian Bali.
6. Meningkatnya kerjasama pengembangan budidaya, pelatihan dan pemanfaatan teknologi pertanian.
7. Berkembangnya komoditas andalan, unggulan dan rintisan serta meningkatnya produktivitas dan produksi pertanian.
8. Meningkatnya pengelolaan sumberdaya ikan serta ekosistem perairan, pesisir dan daratan.
9. Meningkatnya lapangan kerja, ekspor, konsumsi ikan per kapita dan kesejahteraan masyarakat.
10. Meningkatnya kerjasama kemitraan pembangunan pertanian dengan sektor pariwisata.
11. Berkembangnya kepariwisataan yang berkualitas dan berkelanjutan.
12. Meningkatnya prasarana dan sarana publik yang memadai, ketersediaan energi dan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
13. Berkurangnya penduduk miskin dan penyandang masalah sosial.

Dalam misinya, sangat jelas disebutkan niatan Pemerintah Provinsi Bali untuk menaikkan peranan sektor pertanian khususnya dan juga sektor lain yang menunjang pariwisata yaitu perikanan.

Mewujudkan ketangguhan ekonomi rakyat, oleh pemerintah Bali ditempuh dengan pembangunan sektor pertanian dan perikanan melalui pengembangan ekonomi berbasis IKM (Industri Kecil dan Menengah).

Agro unggulan yang dimiliki oleh Proovinsi bali mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai salah satu pilar pembangunan sektor pertanian khususnya. Dengan demikian pembangunan industri agro unggulan Provinsi Bali merupakan jalan yang teoat untuk mewujudkan Misi ke-3 dari Pemerintah Provinsi Bali yang yaitu terwujudnya Bali yang Sejahtera dan *Sukerta* Lahir Bhatin.

3.3 Hubungan dengan RIPIN

Sesuai dengan yang tertuang dalam RIPIN telah diketahui bahwa Bali Nusa merupakan Wilayah Pengembangan Industri Prioritas dengan jenis industri yang dikembangkan adalah Industri Pangan, Industri Hulu Agro, bersama dengan industri barang modal komponen dan bahan penolong, serta industri tekstil, alas kaki dan Aneka. Jadi pengembangan Industri Agro Unggulan Provinsi Bali merupakan ejawantah dari rencana yang tertuang dalam RIPIN.

Dari apa yang tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional bahwa:

Visi Pembangunan Industri Nasional adalah Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh yang bercirikan:

1. Struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat, dan berkeadilan;
2. Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global; dan
3. Industri yang berbasis inovasi dan teknologi.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri nasional mengemban misi sebagai berikut:

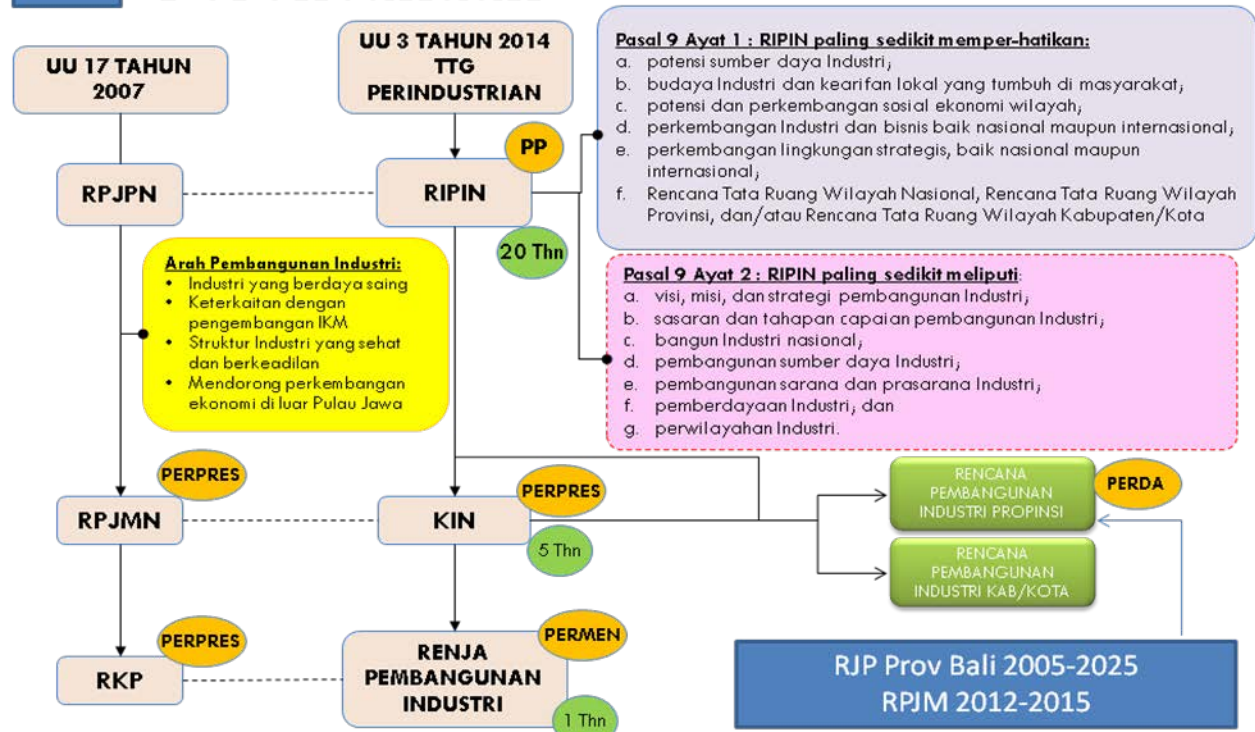
1. meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional;
3. meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
4. menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
7. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Strategi yang ditempuh untuk mencapai visi dan misi pembangunan industri nasional adalah sebagai berikut:

1. mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam;
2. melakukan pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energi;
3. meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri;
4. menetapkan Wilayah Pengembangan Industri (WPI);
5. mengembangkan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra Industri kecil dan industri menengah;
6. menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan industri menengah;
7. melakukan pembangunan sarana dan prasarana Industri;
8. melakukan pembangunan industri hijau;
9. melakukan pembangunan industri strategis;
10. melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan
11. meningkatkan kerjasama internasional bidang industri.

Sangat jelas bahwa pengembangan industri nasional adalah industri yang berbasis sumber daya alam. Dengan demikian pertanian merupakan salah satu sektor yang sangat potensi untuk dikembangkan dalam kerangka acuan RIPIN tersebut. Bali dengan potensi pertanian yang besar juga sangat berpotensi besar untuk melakukan pengembangan industri berbasis komoditi unggulan daerah.

Hubungan antar Dokumen Perencanaan



BAB IV STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INDUSTRI AGRO NASIONAL

Visi pembangunan industri nasional adalah Menjadi Negara Industri Tangguh yang bercirikan:

- a. Struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat dan berkeadilan
- b. Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global
- c. Industri yang berbasis inovasi dan teknologi

Sedangkan Misi pembangunan industri nasional

- a. Meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
- b. Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional;
- c. Meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau;
- d. Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- e. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
- f. Meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Kebijakan pemerintah tentang perindustrian dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian yang dalam pelaksanaannya mengacu pada rencana induk pembangunan industri nasional 2015-2035. Dalam RIPIN 2015-2035 telah disebutkan bahwa tujuan dari penyelenggaraan perindustrian nasional adalah dalam rangka

1. mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
3. Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau;
4. Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. Mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Strategi yang ditempuh untuk mencapai visi dan misi pembangunan industri nasional adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam;
2. Melakukan pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energi;
3. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia (sdm) industri;
4. Menetapkan wilayah pengembangan industri (wpi);
5. Mengembangkan wilayah pusat pertumbuhan industri (wppi), kawasan peruntukan industri, kawasan industri, dan sentra industri kecil dan industri menengah;
6. Menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan industri menengah;
7. Melakukan pembangunan sarana dan prasarana industri;
8. Melakukan pembangunan industri hijau;
9. Melakukan pembangunan industri strategis;
10. Melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan
11. Meningkatkan kerjasama internasional bidang industri.

4.1. Sasaran dan Tahapan Capaian Pembangunan Industri Nasional

4.1.1 Sasaran Pembangunan Industri Nasional

Sasaran Kualitatif Pembangunan Industri Nasional adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pertumbuhan industri yang diharapkan dapat mencapai pertumbuhan 2 (dua) digit pada tahun 2035 sehingga kontribusi industri dalam Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 30% (tiga puluh persen);
2. Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku, bahan penolong, dan barang modal, serta meningkatkan ekspor produk industri;
3. Tercapainya percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Indonesia;
4. Meningkatnya kontribusi industri kecil terhadap pertumbuhan industri nasional;
5. Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi;
6. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri; dan
7. Menguatnya struktur industri dengan tumbuhnya industri hulu dan industri antara yang berbasis sumber daya alam.

Sedangkan Sasaran kuantitatif Pembangunan Industri disajikan dalam Tabel 4.1

Tabel 4.1 Sasaran kuantitatif Pembangunan Industri

NO	Indikator Pembangunan Industri	Satuan	2015	2020	2025	2035
1	Pertumbuhan sektor industri non migas	%	6,8	8,5	9,1	10,5
2	Kontribusi industri nonmigas terhadap PDB	%	21,2	24,9	27,4	30,0
3	Kontribusi ekspor produk industri terhadap total ekspor	%	67,3	69,8	73,5	78,4
4	Jumlah tenaga kerja di sektor industri	Juta orang	15,5	18,5	21,7	29,2
5	Persentase tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja	%	14,1	15,7	17,6	22,0
6	Rasio impor bahan baku sektor industri terhadap PDB sektor industri nonmigas	%	43,1	26,9	23,0	20,0
7	Nilai Investasi sektor industri	Rp Trilyun	270	618	1.000	4.150
8	Persentase nilai tambah sektor industri yang diciptakan di luar Pulau Jawa	%	27,7	29,9	33,9	40,0

4.1.2 Tahapan Pencapaian Pembangunan Industri Nasional

Sebagai bagian dari rencana pembangunan industri jangka panjang (2015-2035) pencapaian visi perindustrian nasional dilakukan melalui 3 tahapan yaitu:

1. Tahap I (2015-2019)

Arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral dan migas, yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui

penyiapan SDM yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi.

2. Tahap II (2020-2024)

Arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas.

3. Tahap III (2025-2035)

Arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Industri Tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi.

Berdasarkan kriteria pemilihan industri prioritas, industri berbasis agro merupakan industri andalan. Dalam rangka menjamin ketersediaan sumber daya bahan baku industri andalan, pemerintah melakukan program pengembangan :

a. Pemanfaatan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan melalui penerapan tata kelola yang baik antara lain meliputi:

1. Penyusunan rencana pemanfaatan sumber daya alam;
2. Manajemen pengolahan sumber daya alam;
3. Implementasi pemanfaatan sumber daya yang efisien paling sedikit melalui penghematan, penggunaan teknologi yang efisien dan optimasi kinerja proses produksi;

4. Implementasi pemanfaatan sumber daya yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan prinsip pengurangan limbah (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*), pengolahan kembali (*recycle*); dan pemulihan (*recovery*); dan
5. Audit tata kelola pemanfaatan sumber daya alam.

b. Pelarangan atau pembatasan ekspor sumber daya alam

Pelarangan atau pembatasan ekspor sumber daya alam ditujukan untuk memenuhi rencana pemanfaatan dan kebutuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri, antara lain meliputi:

1. Penetapan bea keluar;
2. Penetapan kuota ekspor;
3. Penetapan kewajiban pasokan dalam negeri; dan
4. Penetapan batasan minimal kandungan sumber daya alam.

c. Jaminan Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam Jaminan penyediaan dan penyaluran sumber daya alam diutamakan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan bahan baku, bahanpenolong dan energi serta air baku industri dalam negeri yang mencakup:

1. Penyusunan rencana penyediaan dan penyaluran sumber daya alam berupa paling sedikit neraca ketersediaan sumber daya alam;
2. Penyusunan rekomendasi dalam rangka penetapan jaminan penyediaan dan penyaluran sumber daya alam;
3. Pemetaan jumlah, jenis, dan spesifikasi sumber daya alam, serta lokasi cadangan sumber daya alam;
4. Pengembangan industri berbasis sumber daya alam secara terpadu;

5. Diversifikasi pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dan ramah lingkungan di perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri;
6. Pengembangan potensi sumber daya alam secara optimal dan mempunyai efek berganda terhadap perekonomian suatu wilayah;
7. Pengembangan pemanfaatan sumber daya alam melalui penelitian dan pengembangan;
8. Pengembangan jaringan infrastruktur penyaluran sumber daya alam untuk meningkatkan daya saing perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri;
9. Fasilitasi akses kerjasama dengan negara lain dalam hal pengadaan sumber daya alam;
10. Penetapan kebijakan impor untuk sumber daya alam tertentu dalam rangka penyediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri;
11. Pengembangan investasi perusahaan sumber daya alam tertentu di luar negeri;
12. Pemetaan dan penetapan wilayah penyediaan sumber daya alam terbarukan;
13. Konservasi sumber daya alam terbarukan;
14. Penanganan budi daya dan pasca panen sumber daya alam terbarukan;
15. Renegosiasi kontrak eksploitasi pertambangan sumber daya alam tertentu;
16. Menerapkan kebijakan secara kontinu atas efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; dan
17. Penerapan kebijakan diversifikasi energi untuk industri.

C. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

1. Tujuan dan Kebutuhan Pengembangan Teknologi Pengembangan, penguasaan dan pemanfaatan teknologi industri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri nasional.
2. Penguasaan teknologi dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan industri dalam negeri agar dapat bersaing di pasar dalam negeri dan pasar global.

4.2 Arah Kebijakan Pembangunan Industri Nasional Sesuai RPJMN 2015 – 2019

Arah Kebijakan Pembangunan Industri Nasional Sesuai RPJMN 2015 – 2019 adalah :

1. Pengembangan Perwilayahan Industri di luar pulau Jawa
 2. Penumbuhan Populasi Industri
 3. Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas
-
- 1) **Pengembangan Perwilayahan Industri di luar pulau Jawa**, dengan strategi meliputi :
 - a. Fasilitasi pembangunan 14 Kawasan Industri (KI),
 - b. Membangun 22 Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) yang terdiri dari 11 di Kawasan Timur Indonesia dan 11 di Kawasan Barat Indonesia, dan
 - c. Berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam membangun infrastruktur utama (jalan, listrik, air bersih, telekomunikasi, pengolah limbah, dan logistik), infrastruktur pendukung tumbuhnya industri, dan sarana pendukung kualitas kehidupan (*Quality Working Life*) bagi pekerja.
 - 2) **Penumbuhan Populasi Industri**, dengan menambah paling tidak sekitar 9 ribu usaha industri berskala besar dan sedang dimana 50% tumbuh di luar Jawa, serta tumbuhnya Industri Kecil sekitar 20 ribu unit usaha, dengan strategi meliputi :
 - a. Mendorong investasi untuk industri pengolah sumber daya alam, baik hasil pertanian maupun hasil pertambangan (hilirisasi),
 - b. Mendorong investasi untuk industri penghasil barang konsumsi kebutuhan dalam negeri yang utamanya industri padat tenaga kerja,

- c. Mendorong investasi untuk industri penghasil bahan baku, bahan setengah jadi, komponen, dan *sub-assembly* (pendalaman struktur),
 - d. Memanfaatkan kesempatan dalam jaringan produksi global, dan
 - e. Pembinaan industri kecil dan menengah (IKM) agar dapat terintegrasi dengan rantai nilai industri pemegang merek (*Original Equipment Manufacturer, OEM*) di dalam negeri dan dapat menjadi basis penumbuhan populasi industri besar dan sedang.
- 3) **Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas (Nilai Ekspor dan Nilai Tambah Per Tenaga Kerja)** dengan strategi meliputi :
- a. Peningkatan efisiensi teknis, melalui :
 - 1) Pembaharuan / revitalisasi permesinan industri
 - 2) Peningkatan dan pembaharuan keterampilan tenaga kerja
 - 3) Optimalisasi ke-ekonomian lingkup industri (*economic of scope*)
 - b. Peningkatan penguasaan IPTEK / inovasi,
 - c. Peningkatan penguasaan dan pelaksanaan pengembangan produk baru (*new product development*) oleh industri domestik, Pembangunan faktor input (peningkatan kualitas SDM industri dan akses ke sumber pembiayaan yang terjangkau), dan
 - d. Fasilitasi dan insentif dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas diutamakan industri: (1) strategis; (2) maritim; dan (3) padat tenaga kerja

BAB V

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

5.1. Aspek Geografi dan Demografi

5.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Provinsi Bali terdiri dari satu pulau utama, yaitu Pulau Bali dan beberapa pulau kecil lainnya, yaitu Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Ceningan, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Serangan dan Pulau Menjangan. Secara administrasi, Provinsi Bali terbagi menjadi 8 kabupaten, 1 kota, 57 kecamatan, 716 desa/kelurahan, 1.480 desa pakraman (desa adat), dan 1.604 subak sawah serta 1.107 subak abian. Provinsi Bali berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur di sebelah barat, Laut Bali disebelah utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat di sebelah timur dan Samudera Indonesia di sebelah selatan.

Luas wilayah Provinsi Bali secara keseluruhan adalah 5.636,66 km², Kabupaten Buleleng memiliki luas terbesar yaitu 1.365,88 km², diikuti kabupaten Jembrana 841,80 km², Karangasem 839,54 km², Tabanan 839,33 km², Bangli 520,81 km², Badung 418,52 km², Gianyar 368,00 km², Klungkung 315,00 km² dan terkecil adalah kota Denpasar dengan luas wilayah 127,78 km².

5.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Provinsi Bali merupakan salah satu dari 33 Provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah hanya 0,29% dari luas wilayah Indonesia. Secara geografis, Provinsi Bali terletak pada posisi 08°-03'40" -08°50'48" Lintang Selatan dan 114°-25'23" -115°42'40" Bujur Timur. Batas-batas wilayah Provinsi Bali adalah sebelah utara Laut Bali, sebelah timur Selat Lombok, sebelah selatan Samudera Indonesia dan sebelah barat Selat Jawa.

5.1.3. Topografi dan Geologi

Berdasarkan relief dan topografi, di tengah-tengah Pulau Bali terbentang pegunungan yang memanjang dari barat ke timur dan diantar pegunungan tersebut terdapat gugusan gunung berapi yaitu Gunung Batur dan Gunung Agung serta gunung yang tidak berapi yaitu Gunung Merbuk, Gunung Patas, dan Gunung Seraya. Adanya pegunungan tersebut menyebabkan Daerah Bali secara geografi terbagi menjadi 2 (dua) bagian yang tidak sama yaitu Bali Utara dengan dataran rendah yang sempit dan kurang landai, dan Bali Selatan dengan dataran rendah yang luas dan landai. Kemiringan lahan Pulau Bali terdiri dari lahan datar (0-2%) seluas 122.652 ha, lahan bergelombang (2-15%) seluas 118.339 ha, lahan curam (15-40%) seluas 190.486 ha, dan lahan sangat curam (> 40%) seluas 132.189 ha.

Jenis tanah di Bali sebagian besar didominasi oleh Tanah Regosol dan Latasol. Hanya sebagian kecil saja yang terdiri dari Tanah Alluvial, Mediteran dan Tanah Andosol. Jenis Tanah Latasol sangat peka terhadap erosi dan jenis tanah ini tersebar di bagian barat sampai kalopaksa, Patemon, Ringkidit, dan Pempatan. Jenis tanah ini juga terdapat di sekitar Gunung Penyu, Gunung Pintu, Gunung Juwet dan gunung seraya yang secara keseluruhan meliputi 44,9% dari luas pulau Bali. Jenis Tanah Regosol yang juga peka terhadap erosi terdapat di Bagian timur amlapura sampai culik. Jenis tanah ini juga terdapat di pantai singlaraja sampai seririt, gugunan, kekeran disekitar danau tamblingan, buyan, dan beratan, disekitar kelompok hutan Batu karu dan bagian kecil berada dipantai selatan desa kusamba, Sanur, Benua dan Kuta. Jenis Tanah ini mencapai 39,93% dari luas Pulau Bali.

Jenis tanah andosol terdapat disekitar Baturiti, Candi kuning, Banyuatis, Gobleg, Pupuan dan sebagian kelompok hutan Gunung Batukaru. Jenis Mediteran yang kurang peka terhadap erosi terdapat di daerah bukit Nusa Penida dan Kepulauan, Bukit Kuta dan Prapat Agung.

Jenis tanah alluvia yang tidak peka terhadap erosi terdapat didataran Negara, Sumber Kelompok, Manggis dan Angantelu. Ketiga jenis tanah ini yaitu Andosol, Mediteran dan Alluvial sekitar 15,4% dari luas Pulau Bali.

5.1.4. Hidrologi

Provinsi Bali memiliki 4 (empat) buah danau yang berlokasi di daerah Pegunungan yaitu : Danau Beratan, Buyan, Tamblingan dan Danau Batur. Empat danau di Bali merupakan sumber air baku bagi mata air yang ada diseluruh Pulau Bali. Selain sumber air danau, potensi kesediaan air di Provinsi Bali dapat berasal dari mata air, air sungai dan air tanah. Jumlah mata air di Bali mencapai 570 buah dengan total debit air yang dikeluarkan mencapai 442,39 juta m³/thn. Mata air ini menjadi sumber air dari 315 buah sungai dengan panjang total mencapai 3.756 km. Total tampungan air danau dan waduk di Provinsi Bali mencapai 1,036 juta m³ yang digunakan untuk irigasi dan keperluan konsumsi penduduk. Untuk air tanah, Provinsi Bali memiliki potensi yang mencapai 8.000 juta m³.

5.1.5. Iklim dan Suhu

Iklim di Bali merupakan iklim laut tropis yang dipengaruhi oleh angin musim yang membentuk 2 musim, yakni musim kemarau dan musim hujan yang diselingi oleh musim pancaroba. Rata-rata suhu berkisar 28⁰C – 30⁰C, namun antara tempat di Bali terdapat variasi sesuai dengan ketinggian yang ada. Kelembaban udara berkisar antara 90⁰ dan pada musim hujan mencapai 100⁰ sedangkan pada musim kering mencapai 60⁰.

5.1.6. Penggunaan Lahan

Berdasarkan pola penggunaan lahan tahun 2011 di Provinsi Bali, lahan tegal/kebun merupakan lahan mayoritas di Bali yang mencapai 24,27% diikuti luas hutan rakyat dan hutan Negara 23,27% (hutan Negara saja 23,18%), luas perkebunan (21,61%), lahan sawah 14,46%, Lahan perumahan 7,93% dan lahan lainnya mencapai 7,98%, Meskipun termasuk daerah agraris, penduduk Bali tidak hanya menggantungkan hidupnya pada

sector pertanian. Sektor yang juga dapat digunakan sebagai mata pencaharian adalah sector insutri, perdagangan, pariwisata dan jasa. Pulau Bali didukung oleh kawasan hutan yang terletak di daerah pegunungan yang membentang dari barat sampai timur pulau Bali dengan luas kawasan hutan mencapai 22,54% dari luas pulau Bali. Kawasan ini sangat penting karena berfungsi sebagai pelindung mata air, pencegah erosi dan banjir, atau juga dapat digunakan sebagai kawasan hidrologi.

5.2. Potensi Pengembangan Wilayah

5.2.1. Kabupaten Tabanan

Kabupaten Tabanan terletak di bagian selatan pulau Bali yang secara geografis berada pada posisi 08o14 30 - 8o38 07 Lintang Selatan, 114o59 00 -115o02 57 Bujur Timur. Wilayah ini cukup strategis karena berdekatan dengan Ibukota Propinsi Bali yang hanya berjarak sekitar 25 Km dengan waktu tempuh 45 menit dan dilalui oleh jalur arteri yaitu jalur antar propinsi. Luas Kabupaten Tabanan adalah sebesar 839,33 Km² atau 14,90 % dari luas propinsi Bali (5.632,86 Km²). Berdasarkan luasnya wilayah, maka Kabupaten Tabanan termasuk Kabupaten terbesar kedua di propinsi Bali. Bila dilihat dari penguasaan tanahnya, dari luas wilayah yang ada, sekitar 22,562 Km² (26,88%) wilayah Kabupaten Tabanan merupakan lahan persawahan dan 61,371 Km² (73,12%) merupakan lahan bukan sawah. Secara administrasi Kabupaten ini terdiri dari 10 Kecamatan dan 133 Desa

5.2.2. Kabupaten Buleleng

Kabupaten Buleleng terletak dibelahan utara Pulau Bali memanjang dari Barat ke Timur. Secara geografis, Kabupaten Buleleng terletak pada posisi 08o03 40 08o23 00 Lintang Selatan 115o25'55" 115o27 28 Bujur Timur. Kabupaten Buleleng berbatasan dengan Kabupaten Jembrana di bagian Barat, Laut Jawa/Bali dibagian Utara, Kabupaten Karangasem dibagian Timur, dan 4 Kabupaten yaitu Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, dan Bangli dibagian Selatan.

Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Buleleng adalah 1.365, 88 hektar atau 24,25% dari luas Propinsi Bali. Sampai tahun 2009 Kabupaten Buleleng masih tetap terbagi dalam 9 Kecamatan dengan 129 desa definitif, 19 Kelurahan. Namun mulai tahun 2009, jumlah Desa menjadi 148 Desa.

5.2.3. Kabupaten Badung

Kabupaten Badung terletak diantara $08^{\circ}14'01''$ - $08^{\circ}50'52''$ Lintang Selatan dan $115^{\circ}05'03''$ - $115^{\circ}26'51''$, Luas wilayah Kabupaten Badung yaitu 418,52 Km², dengan batas wilayahnya di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bangli, Kabupaten Gianyar dan Kota Denpasar, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tabanan dan Samudera Indonesia, di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Buleleng, sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia. Kabupaten Badung mempunyai 6 kecamatan yaitu, Kecamatan Petang memiliki luas terbesar yaitu 115 Km², Sedangkan Kecamatan Kuta merupakan Kecamatan yang terkecil dengan luas 17,52 Km². Kabupaten Badung mempunyai 62 Desa.

5.2.4. Kabupaten Bangli

Kabupaten Bangli terletak diantara $115^{\circ}13'43''$ - $115^{\circ}27'24''$ Bujur Timur dan $8^{\circ}8'30''$ - $8^{\circ}31'07''$ Lintang Selatan, Kabupaten Bangli mempunyai luas wilayah 520,81 Km², batas wilayahnya di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karangasem, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Badung, di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Buleleng, sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Klungkung. Kabupaten Bangli memiliki 4 kecamatan yaitu, Kecamatan Kintamani, susut, tembuku dan kecamatan Bangli, kabupaten ini juga memiliki 72 Desa

5.2.5. Kabupaten Karangasem

Kabupaten Karangasem terletak di ujung timur Pulau Bali yang merupakan salah satu dari beberapa Kabupaten yang ada di propinsi Bali ,batas wilayahnya sebagai berikut; Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten

Buleleng, Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bangli, dan sebelah Timur berbatasan dengan Selat Lombok.

Secara geografis Kabupaten Karangasem berada pada posisi 08°33'07"-08°10'00" Lintang Selatan dan 115°23'22" - 115°42'37" Bujur Timur. Luas Kabupaten Karangasem adalah 839,54 Km² atau 14,90% dari luas Propinsi Bali (5.632,86 Km²). Kabupaten Karangasem tahun 2012 terdiri dari 8 Kecamatan dan 78 Desa, daerah ini juga memiliki satu pelabuhan yaitu pelabuhan Padangbai.

5.2.6. Kabupaten Jembrana

Jembrana merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Bali yang terletak disebelah barat Pulau Bali membentang dari arah barat ke timur, tepatnya pada 08°09'58" - 08°28'02" LS 114°26'28" - 115°51'28" BT dengan luas wilayah 841,80 Km², Batas-batas wilayah Kabupaten Jembrana antara lain, Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Buleleng, Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Bali dan Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tabanan. Kabupaten ini memiliki satu pelabuhan yaitu pelabuhan Gilimanuk serta memiliki 5 Kecamatan dan 51 Desa.

5.2.7. Kabupaten Klungkung

Kabupaten Klungkung merupakan Kabupaten yang luasnya terkecil kedua setelah Kodya Denpasar dari 9 (Sembilan) Kabupaten dan Kota di Bali. Terletak diantara 115°21'28" - 115°37'28" Bujur Timur dan 08°27'37" - 08°49'00" Lintang Selatan dengan batas-batas disebelah Utara Kabupaten Bangli, Sebelah Timur Kabupaten Karangasem sebelah Selatan Samudera India dan Sebelah Barat Gianyar dengan luas wilayah 315 Km².

Wilayah Kabupaten Klungkung sepertiganya terletak di daratan pulau Bali (11.216 Ha) dan dua pertiganya terletak di Kepulauan Nusa Penida (20.284 Ha).Panjang pantai sekitar 97,6 Km yang terdapat di Klunghkung daratan

14,10 Km dan di Kepulauan Nusa Penida 83,50 Km, Sehingga merupakan potensi perekonomian laut dengan budidaya rumput laut dan penangkapan ikan laut. Permukaan tanah pada umumnya tidak rata bergelombang bahkan sebagian besar merupakan bukit-bukit terjal yang kering dan tandus dan sebagian kecil merupakan dataran rendah. Tingkat kemiringan tanah di atas 40% terjal seluas 16,47 Km² atau 5,25% dari luas Kabupaten.

Dilihat dari penggunaannya lahan terdiri dari lahan sawah 3.876 Ha. Bukan lahan sawah 27.624 Ha (Terdiri atas lahan kering 27.619 Ha dan lahan lainnya 5 Ha). Bukit yang ada di Kabupaten Klungkung bernama bukit Mundi yang terletak di Kecamatan Nusa Penida. Sumber air adalah sungai dan mata air sungai hanya terdapat di Klungkung daratan yang mengalir sepanjang tahun. Sumber air di Kecamatan Nusa Penida bersumber dari mata air dan air hujan. Air hujan ditampung melalui bak penampung (Cubang) yang di buat oleh Penduduk setempat. Pencatatan curah hujan dilakukan di tiap-tiap Kecamatan. Di Kecamatan Nusa Penida 3 (tiga) tempat pengamatan yaitu Sampalan, Prapat dan Klumpu, sedangkan di Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Klungkung dan Kecamatan Dawang masing-masing 1 (satu) tempat pengamatan. Secara administrasi Kabupaten Klungkung terdiri dari 4 (empat) Kecamatan, 59 Desa, 244 Dusun/Lingkungan. Kabupaten ini juga memiliki 3 (tiga) pelabuhan yaitu pelabuhan nusa penida, pelabuhan lembangon dan pelabuhan kesumba.

5.2.8. Kabupaten Gianyar

Secara Administratif Kabupaten Gianyar, terletak antara 08o18 48 08o38 58" Lintang Selatan 115^o13 29 115^o22 23 Bujur Timur. Kabupaten ini Berbatasan dengan Kabupaten Badung disebelah Barat, Kabupaten Bangli disebelah Utara, Kabupaten Bangli dan Kabupaten Klungkung disebelah Timur serta Selat Badung dan Samudera Indonesia disebelah Selatan. Kabupaten ini memiliki total luas wilayah sebesar 368 km². Bagian terluas wilayah Kabupaten Gianyar (20,25%) terletak pada ketinggian 250-950

meter dari permukaan laut. Kabupaten Gianyar memiliki 7 Kecamatan dan 70 Desa

5.2.9. Kota Denpasar

Kota Denpasar memiliki luas wilayah 127,78 Km², Batas Wilayah Kota Denpasar di sebelah Utara dan Barat berbatasan dengan Kabupaten Badung (Kecamatan Mengwi, Abiansemal dan Kuta Utara), sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gianyar (Kecamatan Sukawati dan Selat Badung dan di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Badung (Kecamatan Kuta) dan Selat Badung. Menurut Letak Geografis Kota Denpasar berada di antara 08o36 56 -08°42 01 lintang selatan 115 °10 23 - 115 °16'27" bujur timur, Kota ini memiliki 4 kecamatan dan 43 desa. Kota Denpasar memiliki satu Bandara yaitu Bandara Ngurah Rai, kota ini Juga memiliki 2 pelabuhan yaitu pelabuhan Benoa dan Pelabuhan Sanur.

5.3. Aspek Daya Saing Daerah

5.3.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali juga merupakan salah satu dinas penghasil Pendapatan Asli Daerah yaitu berasal dari :

- a. Pengujian mutu komoditi ekspor oleh UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang.
- b. Penerbitan Surat Keterangan Asal barang ekspor Indonesia (Certificate of Origin).
- c. Retribusi tera/tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, timbang dan perlengkapannya sesuai Perda Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2004.

Perkembangan PAD yang dihasilkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, sebagai berikut :

No.	TAHUN	PAD	KETERANGAN
		(Rp.)	
1.	2009	19.255.586.500	
2.	2010	26.638.998.800	
3.	2011	571.284.760	
4.	2012	519.382.150	
5.	2013	326.160.000	Target

2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Terdapat cukup banyak potensi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dalam upaya menumbuh kembangkan industri dan perdagangan di Provinsi Bali, antara lain:

3. Sarana dan Prasarana

Perkembangan sektor perdagangan sangat terkait dengan perkembangan sektor industri, yang berarti sarana dan prasarana sektor industri juga merupakan sarana dan prasarana yang mempengaruhi sektor perdagangan. Adapun sarana dan prasarana sektor industri/perdagangan di daerah Bali, antara lain:

- a. Jalan darat yang sangat memadai untuk berkembangnya industri dan perdagangan.

Dalam tahun 2007 panjang jalan mencapai 7.105,37 km terdiri dari 6.385,08 jalan beraspal, 76,20 km jalan kerikil, 577,54 km jalan tanah dan 66,54 km jalan berbatu/lainnya; dengan kondisi baik 786,91 km (56,83 %), kondisi sedang 448,41 km (32,38 %) dan kondisi rusak 149,39 km (10,79%). Selain itu jalan Denpasar – Gilimanuk sepanjang ± 120 km merupakan jalur peti kemas.

- b. Pelabuhan udara/laut

Terdapat 1 buah pelabuhan udara (air port Ngurah Rai), 2 buah pelabuhan laut (Benoa dan Celukan Bawang), 2 buah pelabuhan penyebrangan (Gilimanuk dan Padangbai) serta beberapa

pendaratan ikan, yang berfungsi sebagai sarana dan prasarana memperlancar pengiriman atau peredaran barang.

c. Listrik

Jaringan listrik tersedia ke semua kecamatan dan desa se Bali. Produksi listrik di Bali sampai dengan tahun 2007 sebesar 2.563.503.161 Kwh.

d. Lembaga perdagangan

Jumlah pasar baik pasar tradisional maupun pasar modern cukup memadai. Pasar merupakan salah satu faktor penting dalam perdagangan, karena merupakan tempat bertemunya para penjual maupun pembeli. Jumlah pasar yang ada di Bali tahun 2012 sebanyak 653 buah, dengan rincian, sebagai berikut:

- Pasar Desa / tradisional sebanyak 279 buah
- Pasar Modern, sebanyak 374 buah

e. Pelaku usaha ekspor dan impor

Jumlah eksportir Daerah Bali tahun 2012 sebanyak 244 buah, dengan rincian yaitu 60 eksportir TPT, 118 eksportir kerajinan kayu dan eksportir furniture, 3 eksportir komponen rumah jadi, 22 eksportir kerajinan perak, 3 eksportir kopi, 6 eksportir panili, 11 eksportir ikan tuna, 27 eksportir ikan hias dan 4 perusahaan cargo.

Sedangkan jumlah importir sebanyak 253 buah, yaitu 185 importir umum dan 68 importir produsen.

g. Sentra industri

Jumlah sentra industri UMKM di Bali tahun 2012 sebanyak 655 buah dengan jumlah tenaga kerja yg terserap 71.617 orang.

h. Produk unggulan

Pemerintah telah menetapkan 10 produk utama, 10 produk potensial dan 3 kelompok jasa yaitu :

- 1) 10 (sepuluh) produk utama, yaitu Udang, Kopi, Minyak kelapa sawit, Biji coklat/kakao, Karet dan produk karet, tekstil

dan produk tekstil, Alas kaki, Elektronik, Komponen kendaraan bermotor, Furniture

- 2) 10 Produk Potensial, yaitu: Kerajinan, Ikan dan produk ikan, Tanaman obat, Kulit dan produk kulit, Makanan olahan, Perhiasan, Minyak atsiri, Rempah-rempah, Peralatan kantor bukan kertas, Peralatan kesehatan
 - 3) Jasa, yaitu Konstruksi, Teknologi informasi, Tenaga kerja
- Sedangkan 10 produk unggulan Daerah Bali, yaitu Tekstil dan produk tekstil, Ikan dalam kaleng, Kerajinan kayu, Kerajinan perak, Furniture, Kopi, Panili, Ikan tuna, Komoditas lainnya, Rumput laut.

Disamping itu ada Produk Potensial, yaitu kerajinan dan perhiasan.

i. Pemasaran

Sampai dengan tahun 2012 ekspor Daerah Bali telah menembus 100 negara tujuan dengan 7 negara pengimpor paling besar adalah : USA (34,57%), Jepang (22,02%), Australia (10,40%), Perancis (7,81%), , Jerman (5,27%), Italia (4,82%), Inggris (4,81). Disamping potensi pasar ekspor, Bali juga merupakan pasar domestik yang potensial, karena Bali merupakan daerah tujuan wisata dunia yang dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai negara serta wisatawan nusantara. Selain itu Bali merupakan tempat / etalase barang kerajinan daerah lain di Indonesia. Hal ini memberikan kemudahan bagi para pembeli untuk mendapatkan berbagai ragam barang dari berbagai daerah di Indonesia.

4. Iklim Berinvestasi

Keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah Bali setelah peristiwa Bom Bali I (2002) dan Bom Bali II (2005), sampai saat ini menunjukkan peningkatan yang sangat baik. Kondisi ini sangat

mendukung peningkatan iklim usaha yang semakin kondusif bagi usaha perdagangan maupun industri. Walaupun iklim usaha didalam negeri yang semakin kondusif, namun ada faktor eksternal yang harus mendapat perhatian serius dari semua pihak yang terkait dengan sektor industri dan perdagangan, yaitu adanya krisis keuangan global yang dialami oleh sebagian besar negara-negara didunia sejak pertengahan tahun 2008, dapat berdampak negatif bagi perkembangan sektor industri dan perdagangan.

5. Distribusi dan Pemasaran

Berbagai langkah dilakukan dalam pengaturan mekanisme distribusi barang sehingga tercipta kelancaran dalam distribusi dan tidak terjadi stagnan dalam perdagangan akibat ketidak lancaran distribusi. Langkah – langkah yang dilakukan antara lain:

- a. Memperlancar arus barang dalam negeri
- b. Mengurangi fluktuasi harga
- c. Menciptakan margin distribusi yang proporsional bagi usaha perdagangan
- d. Mengupayakan terjaminnya barang kebutuhan yang cukup dengan tingkat harga yang terjangkau oleh masyarakat.

Selain pengaturan mekanisme distribusi barang, maka dalam upaya mempromosikan produk/barang dilakukan kegiatan :

- Mengikuti pameran dagang di beberapa daerah.
Menyelenggarakan Pasar Lelang Komoditi Forward Komoditi Agro. Kegiatan ini dimaksudkan untuk membantu para pengusaha dibidang pertanian / petani dalam memasarkan komoditinya sehingga mendapatkan harga yang layak

6. Sumber Daya Manusia

Pegawai Negeri Sipil yang mendukung tugas-tugas pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dalam tahun 2012 berjumlah 159 orang. Berdasarkan jabatan struktural dan fungsional

maka Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dapat dikelompokan sebagai berikut :

No.	Jabatan	Jumlah Pegawai
		(orang)
1.	Kepala Dinas	1
2.	Sekretaris	1
3.	Kepala Bidang	4
4.	Kepala UPTD	3
5.	Kepala Seksi/Sub Bagian	17
6.	Penyuluh Indag	6
7.	Fungsional Penerima	20
8.	Penguji Mutu Barang	4
9.	Penata Kehumasan	1
10.	Arsiparis	25
12.	Penata Komputer	25
13.	Pustakawan	6
14.	Fungsional Umum	102
Jumlah :		159

Berdasarkan Golongan maka Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dikelompokan sebagai berikut:

No.	Jabatan	Jumlah Pegawai
		(orang)
1.	Golongan IV	24
2.	Golongan III	118
3.	Golongan II	17
4.	Golongan I	0
Jumlah :		159

Berdasarkan tingkat pendidikan maka Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dikelompokan sebagai berikut:

No.	Jabatan	Jumlah Pegawai
		(orang)
1.	Pasca Sarjana (S2)	13
2.	Sarjana (S1)	63

3.	Diploma (D3)	5
4.	Sarjana Muda	3
5.	SLTA	69
6.	SLTP	2
7.	SD	4
Jumlah :		159

Sedangkan berdasarkan pendidikan penjenjangan yang telah diikuti maka Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dikelompokkan sebagai berikut :

No.	Jabatan	Jumlah Pegawai
		(orang)
1.	Spamen	1
2.	Spama	4
3.	Diklatpim III	10
4.	Diklatpim IV	14
Jumlah :		29

5.4. Aspek Perkembangan Sektor Industri Agro

Mengingat keberadaan sektor industri tidak bisa lepas dari keberadaan sektor perdagangan, maka kondisi yang diharapkan mampu mendorong perkembangan industri sekaligus juga tentunya mampu mendorong tumbuh kembangnya sektor perdagangan. Ada beberapa kondisi yang diharapkan untuk mendukung upaya pertumbuhan perekonomian khususnya sektor industri dan perdagangan antara lain:

- a. Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang terus membaik sehingga dapat menggairahkan sektor pariwisata yang selanjutnya juga mendorong semakin kondusifnya sektor investasi disektor industri dan perdagangan.
- b. Pertumbuhan ekonomi daerah Bali sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan sektor pariwisata, karena sektor pariwisata memiliki peran signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Bali dan Indonesia secara

keseluruhan. Harapan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dari sektor pariwisata memang cukup besar, mengingat Bali sebagai daerah tujuan wisata dengan keindahan alam dan budaya yang dijiwai agama Hindu merupakan ciri khas tersendiri yang mungkin tidak ada di daerah lain, sebagai kekuatan yang sangat kompetitif dalam menarik kunjungan wisatawan. Hal ini berarti bahwa perkembangan sektor pariwisata di Bali, akan berpengaruh terhadap berkembangnya sektor-sektor lainnya seperti pertanian, industri maupun perdagangan, khususnya barang kerajinan yang sangat digemari oleh wisatawan mancanegara maupun domestik. Selain itu peningkatan kedatangan wisatawan mancanegara tentunya juga mempunyai pengaruh terhadap peningkatan nilai ekspor daerah Bali.

- c. Pengaruh krisis keuangan global diharapkan tidak berdampak besar terhadap sektor riil khususnya di daerah Bali, sehingga tidak terlalu berpengaruh terhadap perkembangan sektor IKM.
- d. Adanya kerjasama antara pemerintah dengan semua stakeholder untuk meningkatkan kualitas SDM dan produk sehingga terjadi peningkatan Citra produksi dalam negeri dan memiliki daya saing dipasar global
- e. Meningkatnya kemampuan dan kemandirian IKM dalam mengelola usaha dan teratasinya kekurangan bahan baku sehingga terwujud pengembangan IKM yang efisien.
- f. Sebagian besar IKM mampu mengakses informasi pasar serta modal sehingga permasalahan pemasaran dan permodalan dapat diatasi.
- g. Optimalnya peran Laboratorium kemetrolagian dan laboratorium pengujian mutu barang sehingga perlindungan konsumen lebih meningkat.
- h. Terselenggaranya sistem metrologi legal di Provinsi Bali, guna terjaminnya tertib ukur disegala bidang yang bertujuan melindungi kepentingan umum (konsumen dan produsen) dan menjamin sumber penerimaan daerah serta mendorong peningkatan daya saing produk, perdagangan dalam negeri dan pasar global.
- i. Adanya stabilitas sosial ekonomi dan politik masyarakat sehingga tidak terjadi gejolak / fluktuasi harga barang kebutuhan pokok yang terlalu tinggi.

- j. Meningkatnya kesadaran para pengusaha terhadap peningkatan kreativitas dan desain sehingga mampu menghasilkan produk yang dapat mengikuti selera pasar. Selain itu diharapkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan hasil kreatifitas atau hasil karya ciptanya sehingga terdaftar sebagai hak atas kekayaan intelektual.
- k. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yang mendukung kegiatan ekspor, yaitu adanya pelabuhan ekspor, adanya trade center dan exhibition hall.
- l. Optimalnya peran pasar lelang agro sehingga mampu memberi manfaat khususnya dalam pemasaran bagi para masyarakat produsen sampai di perdesaan.

Terbukanya pasar dan layaknya harga hasil pertanian, diharapkan dapat mendorong masyarakat khususnya generasi muda perdesaan untuk lebih bergairah lagi menekuni sektor pertanian dengan lebih efisien dan efektif, dan menjadikan usaha pertanian sebagai agribisnis

5.4.1. Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Industri Agro

Wilayah Pengembangan Industri (WPI) dikelompokkan berdasarkan keterkaitan backward dan forward sumberdaya dan fasilitas pendukungnya, serta memperhatikan jangkauan pengaruh kegiatan pembangunan industri. Suatu wilayah dengan karakteristik tertentu yang berpotensi untuk menumbuhkan dan mengembangkan industri tertentu yang akan berperan sebagai penggerak utama (prime mover) bagi pengembangan wilayah tersebut serta membawa peningkatan pertumbuhan industri dan ekonomi pada wilayah lain di sekitarnya dalam suatu wilayah regional atau provinsi dengan batas-batas yang jelas.

KRITERIA WPPI antara lain : Potensi sumber daya alam (agro, mineral, migas), Kelengkapan sistem logistik dan transportasi, Kebijakan afirmatif untuk pengembangan industri ke luar Pulau Jawa, Penguatan dan pendalaman rantai nilai, Kualitas dan kuantitas SDM, Memiliki potensi energi berbasis sumber daya alam (batubara, panas bumi, air), Memiliki

potensi sumber daya air industri, Memiliki potensi dalam pewujudan industri hijau, Kesiapan jaringan pemanfaatan teknologi dan inovasi

5.4.2. Penyerapan Tenaga Kerja dan Perkembangan Sektor Industri Agro

Melalui berbagai upaya yang dilakukan seperti pelatihan, bimbingan, bantuan peralatan maupun permodalan, dibarengi dengan semakin kondusifnya iklim usaha, maka bidang industri mampu menumbuh kembangkan usaha industri dengan berbagai bidang dan sub bidang pendukungnya, sebagai indikator dalam pencapaian hasil kegiatan, antara lain:

- a. Perkembangan sentra-sentra industri kecil menengah yang berfluktuasi. Dalam tahun 2008 jumlah sentra industri kecil di Daerah Bali sebanyak 934 buah, tahun 2009 sebanyak 985, tahun 2010 sebanyak 955, tahun 2011 sebanyak 626 dan tahun 2012 sebanyak 655 buah, yang berarti mengalami peningkatan ditahun 2009 sebesar 5,46%. Namun ditahun 2010 dan 2011 mengalami penurunan rata-rata 0,62%,. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh iklim usaha di masyarakat.
- b. Meningkatnya nilai investasi sektor industri kecil menengah. Peningkatan investasi sektor industri kecil menengah di daerah Bali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 rata-rata 61,11%. Jumlah nilai investasi tahun 2008 sebesar Rp. 1.119.794.725.000.- meningkat menjadi Rp.2.687.105.140.000.- dalam tahun 2009. Kemudian tahun 2010 juga meningkat menjadi sebesar Rp 3.654.508.782.000,- Tahun 2011 meningkat lagi menjadi Rp 4.459.168.589.000.- dan dalam tahun 2012 nilai investasi juga mengalami peningkatan menjadi Rp 6.339.053.959.000 .-
- c. Peningkatan nilai produksi. Nilai produksi industri kecil dalam kurun waktu 5 (lima) tahun meningkat rata-rata sebesar 2,36%. Nilai produksi tahun 2008 sebesar Rp3.800.457.270.000,- Tahun 2009 menurun menjadi Rp 2.959.194.156.000.- Tahun 2010 meningkat menjadi Rp

3.781.571.922.000, Tahun 2011 sebesar Rp 4.340.134.978.000.-
sedangkan tahun 2012 nilai produksi sebesar Rp4.145.679.043.000.-

- d. Penyerapan tenaga kerja yang cukup banyak yaitu tahun 2008 sebanyak 76.754 orang, tahun 2009 sebanyak 77.829 orang, tahun 2010 sebanyak 79.280 orang, tahun 2011 sebanyak 84.954 orang dan dalam tahun 2012 sebanyak 87.784 orang, yang berarti dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ada peningkatan penyerapan tenaga kerja rata-rata sebesar 3,44% setiap tahunnya.

Adapun perkembangan jumlah sentra, unit usaha, tenaga kerja, nilai investasi, dan nilai produk industri kecil dan menengah provinsi Bali tahun 2008-2012 dapat dilihat pada tabel berikut :

Table 5.1 Nilai Investasi dan Nilai Produksi Industri Kecil dan Menengah.

No	Tahun	Sentra	Nilai Investasi	Nilai Produksi	Tenaga kerja
		(buah)	(Rp)	(Rp)	(orang)
1.	2008	934	1.406.416.547	4.145.679.043	220.973
2.	2009	985	1.459.684.057	4.761.036.376	226.420
3.	2010	955	2.211.223.535	8.047.085.391	213.924
4.	2011	626	4.470.877.501	8.625.594.285	138.630
5.	2012	655	6.396.547.886	9.220.750.308	165.813

Data: Direktori Perusahaan IKM Provinsi Bali Tahun 2012

- e. Jumlah industri minuman beralkohol ada sebanyak 28 unit usaha, yaitu 4 unit di Tabanan, 6 unit di Denpasar, 3 unit di Badung, 1 unit di Klungkung, 6 unit di Karangasem, 8 unit usaha di Buleleng. Industri minuman beralkohol masuk daftar negatif investasi, yang artinya tidak boleh ada investasi baru. Namun yang masih dibolehkan hanya realokasi industri, sesuai Kepmen Perindag No.78/MPP/Kep/3/2001, dan sesuai dengan PP No.38/2007 tentang pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, industri minuman beralkohol merupakan kewenangan pemerintah pusat
- f. Adanya peningkatan kesadaran masyarakat khususnya pengusaha industri/perajin terhadap arti pentingnya hak cipta hasil kreatifitasnya

untuk didaftarkan sebagai hak patent ataupun hak cipta, sehingga nantinya tidak mudah untuk ditiru dan dijiplak serta didaftarkan menjadi hak patent ataupun hak cipta oleh pihak-pihak lain.

5.4.3. Ekspor dan Impor Produk Industri Agro

Ada beberapa jenis pelayanan yang diberikan pada Bidang Perdagangan Luar Negeri, antara lain:

a. Ekspor :

1. Penerbitan SKA Otomasi
2. Rekomendasi untuk eksportir terdaftar pada jenis barang yang diatur ekspornya.
3. Surat Pemberitahuan Ekspor Kopi (SPEK).
4. Rekomendasi untuk mendapatkan ETPIK.
5. Fasilitasi pameran di dalam dan di luar negeri.

b. Impor :

1. Penerbitan Angka Pengenal Impor (API).

Melalui berbagai fasilitasi yang dilakukan Bidang Perdagangan Luar Negeri ada beberapa indikator yang menunjukkan hasil yang dapat dicapai, antara lain:

- a. Realisasi ekspor non migas daerah Bali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 berfluktuatif perkembangan pertahunnya dgn kecenderungan menurun setiap tahunnya hanya di tahun 2010 yg meningkat 3,46%. Adapun perkembangan realisasi ekspor Non Migas daerah Bali dari Tahun 2008-2012 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.2 Perkembangan Realisasi Ekspor Non Migas Daerah Bali tahun 2008 - 2012

No.	Tahun	Realisasi Ekspor(US.\$)	Naik (Turun) %
1	2008	553.832.346,47	-
2	2009	502.541.826,09	(9,26)
3	2010	519.912.506,91	3,46
4	2011	497.864.362,07	(4,24)
5	2012	481.838.888,15	(3,22)

Data: Realisasi Ekspor Daerah Bali

Jenis komoditi ekspor Bali dikelompokkan menjadi 5 kelompok, sebagai berikut:

- 1) Hasil Kerajinan, berupa : Kerajinan kayu, kerajinan furniture, kerajinan perak, kerajinan bambu, kerajinan logam, kerajinan rotan, kerajinan terracota, kerajinan kulit, kerajinan batu padas, kerajinan anyaman, kerajinan keramik, kerajinan kerang, kerajinan lukisan, kerajinan alat tulis.
- 2) Hasil Industri, berupa: Tekstil dan produk tekstil, sepatu, tas, plastik, ikan dalam kaleng, dan komponen/rumah jadi.
- 3) Hasil Pertanian, berupa: ikan tuna, ikan kerapu, lobster, ikan hias hidup, ikan nener, ikan kakap, ikan ikan lainnya, kepiting, sirip ikan hiu, buah-buahan, burung hidup, rumput laut.
- 4) Hasil Perkebunan, berupa: panili dan kopi
- 5) Lain-lain

Kontribusi masing-masing kelompok komoditi ekspor tersebut diatas terhadap total ekspor selama 5 tahun yaitu tahun 2008 s/d 2012, adalah sebagai tabel berikut :

Table 5.3 Realisasi ekspor menurut kelompok komoditi tahun 2008-2012

No	Komoditas Ekspor	Tahun 2008		Tahun 2009		Tahun 2010		Tahun 2011		Tahun 2012	
		Nilai US\$	%	Nilai US\$	%	Nilai US\$	%	Nilai US\$	%	Nilai US\$	%
1.	H.Kerajinan	266.205.490,20	48,07	224.098.539,63	44,6	215.288.407,35	41,41	197.455.924,79	49,0	202.069.115,56	41,94
2.	H. Industri	188.931.305,50	34,11	170.473.759,00	33,9	180.215.610,68	34,66	192.131.341,98	39,6	157.026.397,96	32,59
3.	H.Pertanian	96.174.429,47	17,37	104.542.168,10	20,8	119.769.734,32	23,04	102.555.224,13	20,6	114.892.477,10	23,84
4.	H. Perkebunan	640.064,71	0,12	961.739,85	0,19	887.631,00	0,17	903.530,72	0,18	736.115,28	0,15
5.	Lain-Lain	1.881.056,59	0,34	2.465.619,51	0,49	3.751.123,56	0,72	4.818.340,45	0,97	7.114.782,25	1,48
	Jumlah :	553.832.346,47	100	502.541.826,09	100	519.912.506,91	100	497.864.362,07	100	481.838.888,15	100

Data: Realisasi Ekspor Daerah Bali

- b. Dalam rangka Nasional Single Window dan ASEAN Single Window di Indonesia telah ditetapkan 85 Instansi Penerbit SKA (IPSKA) yaitu antara lain Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali. Rata-rata dokumen/surat keterangan asal yang diterbitkan setiap hari 200 dokumen dari jumlah 312 eksportir.
- c. Daerah Bali melakukan impor 3 kelompok komoditi, yaitu barang konsumsi, bahan baku/penolong dan barang modal dari 21 negara. Ada 5 negara pengekspor komoditi terbesar ke Bali, yaitu Australia (30,70%), USA (11,82%), India (10,25%), China (8,99%) dan Singapura (8,85%).
- Realisasi impor Bali dan kontribusi masing-masing kelompok komoditi impor terhadap total impor, selama 5 tahun, seperti tabel berikut:

Table 5.4 Total Impor Bali tahun 2008 s/d 2012

No	Komoditas Ekspor	Tahun 2008		Tahun 2009		Tahun 2010		Tahun 2011		Tahun 2012	
		Nilai US\$	%	Nilai US\$	%	Nilai US\$	%	Nilai US\$	%	Nilai US\$	%
1	B. konsumsi	2.951.716,87	93,73	7.222.272,55	97,3	9.447.873,66	69,9	5.891.599,87	60,83	22.316.870	80,48
2	B. baku /penolong	186.351,68	5,92	198.918,65	2,28	2.870.966,55	21,3	2.653.535,80	27,40	2.842.634	10,25
3	B. Modal	11.126,43	0,35	-	-	1.188.625,54	8,80	1.138.811,09	11,77	2.570.771	9,27
	Jumlah :	3.149.194,98	100	7.421.191,20	100	13.507.465,75	100	9.683.946,76	100	27.730.274,84	100

Data: Realisasi Impor Daerah Bali

d. Kegiatan pembinaan yang telah dilaksanakan oleh Bidang Perdagangan Luar Negeri pada tahun 2008 s/d 2012 sebagai berikut :

1) Pameran Dagang ke Luar Negeri

a) Tahun 2008 :

- San Fransisco International Gift Fair : 3 perajin
- Singapore Big Event : 2 perajin
- Expo Aichi di Jepang : 7 perajin
- Grand Canary di Spanyol : 10 perajin
- Pameran Malaysia : 4 perajin
- ISE di Dubai : 7 perajin
- Import Afrika Selatan : 6 perajin

b) Tahun 2009 :

- Ca Expo di Nanning China : 2 perajin
- Perth Royal Show : 4 perajin
- Pameran Hongkong : 6 perajin
- Pameran Singapura : 2 perajin

c) Tahun 2010 :

- International Life Style di Tokyo Jepang : 4 perajin
- Material World di New York USA : 6 perajin

d) Tahun 2011 :

- International Life Style di Tokyo Jepang : 4 perajin
- e) Tahun 2012:
 - Ca Expo di Nanning China : 2 perajin
- 2) Pameran Tingkat Nasional :
 - a. Tahun 2008
 - Pameran Inacraft di Jakarta
 - Pameran Mutumanikam di Jakarta
 - Trade Expo Indonesia di Jakarta
 - b. Tahun 2009 :
 - Pameran Inacraft di Jakarta
 - Pameran Mutumanikam di Jakarta
 - Trade Expo Indonesia di Jakarta
 - c. Tahun 2010 :
 - Pameran Inacraft di Jakarta
 - Pameran Mutumanikam di Jakarta
 - Trade Expo Indonesia di Jakarta
 - d. Tahun 2011:
 - Pameran Inacraft di Jakarta
 - Pameran Mutumanikam di Jakarta
 - Trade Expo Indonesia di Jakarta
 - e. Tahun 2012 :
 - Pameran Inacraft di Jakarta
 - Pameran Mutumanikam di Jakarta
 - Trade Expo Indonesia di Jakarta
 - f. Tahun 2013 :
 - Pameran Inacraft di Jakarta
 - Pameran Mutumanikam di Jakarta
 - Trade Expo Indonesia di Jakarta
 - UMKM Expo di Batam
 - Piranti saji di Jakarta
- 3). Pendidikan dan pelatihan :

- a) Tahun 2008
 - Peningkatan pengetahuan eksportir dan importir : 50 orang
 - Pelatihan Teknis Prosedur Ekspor: 3 orang aparat dan pengusaha
 - Sosialisasi kebijakan perdagangan Luar Negeri : 60 orang
- b) Tahun 2009 :
 - Peningkatan pengetahuan eksportir dan importir : 50 orang
 - Pelatihan Teknis Prosedur Ekspor: 3 orang aparat dan pengusaha
 - Sosialisasi kebijakan perdagangan Luar Negeri : 60 orang
- c) Tahun 2010 :
 - Peningkatan pengetahuan eksportir dan importir : 50 orang
 - Pelatihan Teknis Prosedur Ekspor: 3 orang aparat dan pengusaha
 - Sosialisasi kebijakan perdagangan Luar Negeri : 60 orang
- d) Tahun 2011
 - Peningkatan pengetahuan eksportir dan importir : 50 orang
 - Pelatihan Teknis Prosedur Ekspor: 3 orang aparat dan pengusaha
 - Sosialisasi kebijakan perdagangan Luar Negeri : 60 orang
- e) Tahun 2012 :
 - Peningkatan pengetahuan eksportir dan importir : 50 orang

- Pelatihan Teknis Prosedur Ekspor: 3 orang aparat dan pengusaha
- Sosialisasi kebijakan perdagangan Luar Negeri : 60 orang
- f) Tahun 2013 :
 - Peningkatan pengetahuan eksportir dan importir : 50 orang
 - Pelatihan Teknis Prosedur Ekspor: 3 orang aparat dan pengusaha
 - Sosialisasi kebijakan perdagangan Luar Negeri : 60 orang
- 4). Monitoring dan pendataan ke Kabupaten/Kota se Bali mengenai Komoditi Profile Ekspor ;
- 5). Penyusunan buku Program Pengembangan Ekspor Komoditi diluar Migas Daerah Bali ;
- 6). Pemantauan dan pembinaan perusahaan importir dan pembuatan Company Profile ;
- 7). Penyusunan buku Daftar Eksportir Daerah Bali ;
- 8). Pemutahiran Surat Keterangan Asal (SKA) ;
- 9). Penguatan informasi Nasional Single Windows dan Asean Windows.

5.5 Perdagangan Dalam Negeri

Kegiatan pelayanan bidang perdagangan dalam negeri diarahkan pada upaya peningkatan pengamanan perdagangan, perlindungan konsumen serta upaya memperlancar distribusi dan pemasaran. Pelaksanaan peran bidang perdagangan dalam negeri tersebut, adalah sebagai berikut:

1) Pengamanan Perdagangan dan Perlindungan konsumen ;

Pengamanan perdagangan dan perlindungan konsumen merupakan 2 (dua) hal/kegiatan yang mesti dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat, karena dua hal ini sangat menentukan tingkat ketertiban dan kepuasan

konsumen terhadap penyelenggaraan usaha perdagangan. Ada beberapa upaya dilakukan oleh pemda Bali dalam pengamanan perdagangan dan perlindungan konsumen, antara lain:

- a. Pengamanan pasar dalam negeri melalui sistem pengawasan terhadap barang yang beredar serta jasa secara konsekwen dan berkelanjutan, seperti penerapan label yang benar, cara menjual yang tidak merugikan konsumen, adanya fasilitas purna jual sesuai dengan yang diiklankan.
- b. Pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran minuman beralkohol dengan label edar, mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali No. 5 Tahun 2012. Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol
- c. Perlindungan konsumen lewat aspek tertib ukur dengan melakukan tera terhadap alat-alat ukur, timbang dan perlengkapannya, mengacu pada UU No.2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, dan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali No.2 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali No.3 Tahun 2011 . Kegiatan tera ini dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi.

Penerimaan PAD dari kegiatan terra dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, mengalami rfluktuasi setiap tahunnya. Penerimaan dalam tahun 2008 sebesar Rp.252.596.750,- tahun 2009 sebesar Rp.236.521.150.- tahun 2010 sebesar Rp.84.885.050.-, tahun 2011 sebesar Rp.361.682.470.- dan tahun 2012 sebesar Rp 500.882.150.-. Untuk lebih jelas dapat dilihat tabel berikut ini.

Tabel 5.5 Penerimaan dari kegiatan Terra tahun 2008-2012

No.	Tahun	Realisasi	Naik (turun)%
1.	2008	252.596.750	-
2.	2009	236.521.150	(6,36)
3.	2010	84.885.050	(64,11)
4.	2011	361.682.470	326,08
5.	2012	500.882.150	38,49

BAB VI

PENETAPAN KOMODITAS INDUSTRI AGRO UNGGULAN

6.1 Identifikasi Longlist Komoditas Industri Agro Unggulan

Pada dasarnya, keberadaan komoditas unggulan pada suatu daerah akan memudahkan upaya pengembangan agrobisnis. Hanya saja, persepsi dan memposisikan kriteria serta instrumen terhadap komoditas unggulan belum sama. Akibatnya, pengembangan komoditas tersebut menjadi salah urus bahkan menjadi kontra produktif terhadap kemajuan komoditas unggulan dimaksud. Berikut adalah pengelompokan komoditas unggulan, sebagai rujukan untuk menempatkan posisi produk agro dari sisi teori keunggulan komoditas, antara lain :

- a. Komoditas unggulan komparatif : komoditas yang diproduksi melalui dominasi dukungan sumber daya alam, di mana daerah lain tak mampu memproduksi produk sejenis. Atau pula, komoditas hasil olahan yang memiliki dukungan bahan baku yang tersedia pada lokasi usaha tersebut.
- b. Komoditas unggulan kompetitif : komoditas yang diproduksi dengan cara yang efisien dan efektif. Komoditas tersebut telah memiliki nilai tambah dan daya saing usaha, baik dari aspek kualitas, kuantitas, maupun kontinuitas dan harga.
- c. Komoditas unggulan spesifik : komoditas yang dihasilkan dari hasil inovasi dan kompetensi pengusaha. Produk yang dihasilkan memiliki keunggulan karena karakter spesifiknya.
- d. Komoditas unggulan strategis : komoditas yang unggul karena memiliki peran penting dalam kegiatan sosial dan ekonomi.

Sebagai perbandingan, komoditas unggulan akan lebih mudah dan lebih rasional untuk dikembangkan jika memandang komoditas unggulan dari kebutuhan pasar. Dilihat dari sisi positif, jika mengelompokkan komoditas unggulan berdasarkan potensi pasarnya, mengingat ukuran keberhasilan komoditas unggulan dapat diukur dari perannya dalam memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha. Selain itu, memberikan kontribusi dalam pengembangan struktur ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Adapun pengelompokan komoditas tersebut, dapat disusun sebagai berikut :

- a. Komoditas unggulan pasar ekspor : komoditas yang telah mampu memenuhi persyaratan perdagangan di pasar ekspor. Ini menyangkut aspek keamanan, kesehatan, standard, dan jumlah yang memadai, sehingga komoditas tersebut diminati negara pengimpor.
- b. Komoditas unggulan pasar tradisional : komoditas yang mampu memenuhi keinginan selera konsumen lokal, baik dari aspek cita rasa, bentuk, ukuran, kualitas harga, dan budaya lokal.
- c. Komoditas unggulan pasar modern : komoditas yang telah memiliki daya saing tinggi dari aspek harga, kualitas, kuantitas, dan kontinuitas, serta biasa dibutuhkan oleh berbagai kalangan konsumen secara internasional.
- d. Komoditas unggulan pasar industri : komoditas yang merupakan bahan baku utama industri manufaktur agro.
- e. Komoditas unggulan pasar antar pulau : komoditas yang dibutuhkan oleh pasar antar pulau karena komoditas tersebut tak mampu diproduksi di pulau tersebut.
- f. Komoditas unggulan pasar khusus : komoditas yang memang dipesan oleh pasar tertentu lengkap dengan spesifikasinya. (Yuhana, 2008).

Dalam rangka upaya pembangunan ekonomi daerah, inventarisasi potensi wilayah (daerah) mutlak diperlukan agar dapat ditetapkan kebijakan pola pengembangan baik secara sektoral maupun secara multisektoral. Salah satu langkah inventarisasi potensi ekonomi daerah adalah dengan menginventarisasi produk-produk potensial, andalan dan unggulan daerah tiap-tiap sub sektor serta tingkat Kabupaten.

Produk unggulan daerah menggambarkan kemampuan daerah menghasilkan produk, menciptakan nilai, memanfaatkan sumber daya secara nyata, memberi kesempatan kerja, mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah, memiliki prospek untuk meningkatkan produktivitas dan investasinya. Sebuah produk dikatakan unggul jika memiliki daya saing sehingga mampu untuk menangkal produk pesaing di pasar domestik dan/atau menembus pasar ekspor. (Anonim, 2000).

Sementara menurut Cahyana Ahmadjayadi (2001), Produk Unggulan Daerah (PUD) adalah unggulan daerah yang memiliki ciri khas dan keunikan yang tidak

dimiliki daerah lain serta berdaya saing handal dan dapat memberikan peluang kesempatan kerja kepada masyarakat lokal. Produk unggulan daerah juga berorientasi ramah lingkungan dan berorientasi pada pasar baik lokal maupun nasional dan regional.

Pengembangan produk unggulan dan pemberdayaan sebagai potensi ekonomi daerah pada era otonomi adalah suatu pekerjaan yang tidak mudah dilaksanakan, hal tersebut disebabkan karena pengembangan PUD terkait erat dengan kemauan politik atau kebijakan dari Pemerintah Daerah. Peranan pemerintah daerah sangat diperlukan dan sangat penting dalam pengembangan dan pemberdayaan produk unggulan daerah sebagai salah satu tonggak dari pada ekonomi daerah. Oleh karena, produk unggulan daerah terkait beberapa stakeholders yang saling berperan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Stakeholders dimaksud adalah pemilik bahan baku dan pengolah/penghasil bahan baku, pengguna atau konsumen, fasilitator atau pemerintah dan lembaga sosial masyarakat. Stakeholders tersebut saling terkait dan menunjang satu sama lain sehingga peranan koordinasi dalam pencapaian tujuan menjadi unsur utama dalam pengembangan PUD. Koordinasi ini menjadi instrumen penting dalam pengembangan produk unggulan daerah. (Cahyana Ahmadjayadi, 2001).

Produk unggulan merupakan suatu strategi pembangunan yang tidak mudah didikte oleh daerah/negara lain. Produk unggulan daerah tidaklah harus berupa hasil industri yang berteknologi canggih atau dengan investasi tinggi tetapi produk unggulan bisa dengan produk lokal yang disebut dengan One Area Five Products (satu daerah bisa dengan lima produk unggulan) Hal tersebut sesuai dengan surat dari Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah pada tahun 1998 dan 1999. Inti daripada surat tersebut adalah bahwa kabupaten/kota dapat menghasilkan 5 (lima) PUD yang disahkan oleh kepala daerah. (Cahyana Ahmadjayadi, 2001).

Berdasarkan kriteria dari berbagai unsur dengan bobot masing-masing, maka Anonim (1999) merumuskan komoditi-komoditi unggulan di setiap kabupaten seperti disajikan pada Tabel 6. Pada Tabel yang sama tampak bahwa komoditi-komoditi unggulan di setiap kabupaten umumnya adalah komoditi tradisional yang telah diusahakan oleh masyarakat secara turun-temurun, sesuai dengan agroekosistem

setempat, teknik budidaya yang telah dikuasai dan memiliki prospek pasar. Namun perlu diingat bahwa suatu komoditi unggulan di suatu wilayah belum tentu menjadi unggul secara terus-menerus. Karena perubahan-perubahan permintaan, pendapatan masyarakat, selera, dan harga input-output, mungkin komoditi yang pernah unggul di suatu wilayah dalam suatu tahun tertentu menjadi tidak unggul lagi dan mungkin muncul komoditi primadona yang menjadi komoditi unggulan baru. Oleh karena itu, komoditi unggulan akan berubah seiring adanya perubahan faktor-faktor eksternal, yaitu faktor-faktor yang tidak dikuasai oleh petani atau pengusaha, seperti perubahan permintaan yang akan mempengaruhi pasar dan keuntungan, dan harga-harga input-output yang mempengaruhi pendapatan/keuntungan yang diperoleh petani/pengusaha.

Tabel 6.1 Sentra Pengembangan Komoditi Unggulan di Provinsi Bali

No	Kabupaten/Kota	Komoditi Unggulan
1	Karangasem	Salak
2	Klungkung	Sapi Bali
3	Bangli	Kopi Arabika
4	Gianyar	Udang Galah
5	Badung	Babi
6	Tabanan	Manggis
7	Buleleng	Mangga
8	Jembrana	Ikan Lemuru
9	Denpasar	Ikan Tuna

Sumber : Antara, M, (2013)

Dari hasil tabulasi data produksi hasil perkebunan di Bali dapat disajikan beberapa data sebagai berikut :

Table 6.2 Produksi Kelapa Dalam

No	Kabupaten	Luas Areal (Ha) / Area (Hectare)				Produksi (ton)	Produktivitas (kg/ha/th)	Petani (KK)	Jml Tenaga Kerja (Orang)
		TBM (ha)	TM (ha)	TTM/TR (ha)	Jumlah total				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PERKEBUNAN RAKYAT								
1	Jembrana	669	15,969	87	16,725	18,374.34	1,151	16,823	463,465
2	Tabanan	1,094	13,811	260	15,165	16,185.41	1,172	39,522	793,122
3	Badung	243	2,101	135	2,479	1,881.11	895	23,698	66,317
4	Gianyar	156	3,970	17	4,143	3,691.18	930	40,970	70,049
5	Bangli	340	2,463	9	2,812	3,009.02	1,222	10,122	9,162
6	Klungkung	820	2,131	-	2,951	2,239.26	1,051	9,390	11,929
7	Karangasem	2,987	14,091	502	17,580	14,581.50	1,035	39,987	101,679
8	Buleleng	860	7,356	415	8,631	6,865.42	933	19,442	467,691
9	Kota Denpasar	23	81	20	124	11.38	140	1,048	2,869
	Jumlah Perk.Rakyat/ :	7,191	61,973	1,445	70,609	66,838.62	1,079	201,002	1,986,283
	Total Bali 2012 :	863	7,360	420	8,637	6,872.42	934	19,451	467,701
	Total Bali 2011:	6,646	62,191	1,635	70,473	66,554.18	1,070	200,798	2,091,505
	Total Bali 2010 :	6,716	62,130	1,676	70,522	69,751.40	1,123	201,990	1,827,608
	Total Bali 2009 :	6,436	62,503	1,598	70,536	67,588.08	1,081	201,559	2,376,299
	Total Bali 2008 :	6,683	62,638	1,167	70,488	67,683.14	1,081	202,357	2,358,481
	Total Bali 2007 :	6,617	62,327	1,062	70,006	66,741.38	1,071	202,811	2,667,712

Table 6.3 Produksi Kopi

No	Kabupaten	Luas Areal (Ha) / Area (Hectare)				Produksi (ton)	Produktivitas (kg/ha/th)	Petani (KK)	Jml Tenaga Kerja (Orang)
		TBM (ha)	TM (ha)	TTM/TR (ha)	Jumlah total				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	PERKEBUNAN RAKYAT <i>Smallholders</i>								
1	Jembrana	94	999	124	1,217	294.544	295	6,577	18,615
2	Tabanan	806	8,000	729	9,535	4,681.320	585	17,796	734,157
3	Badung	34	332	53	419	151.720	457	3,055	55,429
4	Gianyar	43	276	19	338	156.190	566	7,460	8,203
5	Bangli	17	289	26	332	177.395	614	9,105	2,886
6	Klungkung	16	74	2	92	37.713	512	1,474	2,904
7	Karangasem	47	753	70	870	203.175	270	9,894	11,182
8	Buleleng	585	9,378	847	10,810	8,977.212	957	9,096	371,254
9	Kota Denpasar	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Bali 2012:	50	757	75	882	210.175	278	1,483	2,914
	Total Bali 2011:	1,495	20,285	1,850	23,629	7,256.251	358	64,792	1,545,310
	Total Bali 2010 :	1,501	20,232	1,898	23,630	11,109.906	549	68,970	1,571,715
	Total Bali 2009 :	1,570	20,510	1,772	23,852	11,428.984	557	70,460	2,028,713
	Total Bali 2008 :	1,555	20,477	1,816	23,848	10,996.916	537	70,447	2,058,597
	Total Bali 2007 :	1,446	20,518	1,884	23,848	12,351.267	602	69,611	1,495,465

Table 6.4 Produksi Cengkeh

No	Kabupaten	Luas Areal (Ha) / Area (Hectare)				Produksi (ton)	Produktivitas (kg/ha/th)	Petani (KK)	Jml Tenaga Kerja (Orang)
		TBM (ha)	TM (ha)	TTM/TR (ha)	Jumlah total				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	PERKEBUNAN RAKYAT <i>Smallholders</i> *1)								
1	Jembrana	9	3,232	206	3,447	1,255.648	388	8,668	37,957
2	Tabanan	-	2,328	329	2,656	672.920	289	18,279	47,001
3	Badung	-	246	37	283	21.970	89	1,954	18,723
4	Gianyar	6	145	9	160	48.137	333	4,213	4,355
5	Bangli	13	170	16	199	35.434	208	2,849	1,933
6	Klungkung	15	334	2	351	122.998	368	1,815	5,748
7	Karangasem	37	846	63	946	203.06	240	5,700	32,402
8	Buleleng	341	7,007	203	7,552	3,798.800	542	12,179	455,203
9	Kota Denpasar	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Perk.Rakyat :	421	14,308	865	15,594	6,158.966	430	55,657	603,322
	Total Bali 2012	341	7,007	203	7,552	3,798.800	542	12,179	455,203
	Total Bali 2011	432	14,431	781	15,644	770.419	53	55,646	550,565
	Total Bali 2010	238	14,243	1,014	15,495	4,506.508	316	55,641	879,235
	Total Bali 2009	154	14,371	888	15,413	4,312.160	300	56,211	689,310
	Total Bali 2008	132	14,474	917	15,523	3,768.376	260	57,419	676,434
	Total Bali 2007	90	14,554	973	15,617	5,110.804	351	56,618	803,297

Table 6.5 Produksi Jambu Menté

No	Kabupaten	Luas Areal (Ha)				Produksi (ton)	Produktivitas (kg/ha/t h)	Petani (KK)	Jml Tenaga Kerja (Orang)
		TBM (ha)	TM (ha)	TTM/TR (ha)	Jumlah total				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	PERKEBUNAN RAKYAT <i>Smallholders</i>								
1	Jembrana	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tabanan	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Badung	-	40	7	47	3.410	85	87	916
4	Gianyar	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Bangli	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Klungkung	414	259	16	689	94.635	365	2,839	1,015
7	Karangasem	2,579	6,342	562	9,483	3,043.804	480	15,490	809,118
8	Buleleng	561	1,567	96	2,224	529.968	338	4,623	64,174
9	Kota Denpasar	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Perk.Rakyat :	3,553	8,209	682	12,444	3,671.817	447	23,039	875,223
	Total Bali 2012 :	564	1,571	101	2,230	536.968	342	4,632	64,184
	Total Bali 2011 :	3,385	8,095	512	11,992	3,586.631	443	22,959	764,846
	Total Bali 2010 :	3,031	8,441	514	11,985	3,761.270	446	22,956	1,148,673
	Total Bali 2009 :	2,008	8,373	715	11,096	3,966.342	474	22,642	983,848
	Total Bali 2008 :	2,282	8,096	423	10,801	3,943.131	487	22,826	1,017,206
	Total Bali 2007 :	2,311	7,544	474	10,329	3,203.460	425	22,492	1,006,211

Table 6.6 Produksi Kakao

No	Kabupaten	Luas Areal (Ha)				Produksi (ton)	Produktivitas (kg/ha/t h)	Petani (KK)	Jml Tenaga Kerja (Orang)
		TBM (ha)	TM (ha)	TTM/TR (ha)	Jumlah total				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	PERKEBUNAN RAKYAT <i>Smallholders</i>								
1	Jembrana	1,180	4,531	516	6,227	2,483.625	548	13,040	27,989
2	Tabanan	1,358	3,320	384	5,062	1,059.220	319	23,876	234,496
3	Badung	212	412	6	630	227.697	553	5,169	65,605
4	Gianyar	171	212	6	388	179.966	849	1,630	2,795
5	Bangli	57	235	2	294	157.060	668	5,108	973
6	Klungkung	6	49	2	56	41.664	857	231	524
7	Karangasem	384	506	31	921	204.141	404	3,395	8,314
8	Buleleng	226	1,058	-	1,284	761.039	719	6,151	96,586
9	Kota Denpasar	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Perk.Rakyat :	3,593	10,323	946	14,862	5,114.412	495	58,600	437,282
	Total Bali 2012 :	226	1,058	-	1,284	761.039	719	6,151	96,586
	Total Bali 2011 :	3,712	10,373	834	14,919	4,941.071	476	58,889	436,585
	Total Bali 2010 :	3,695	10,381	844	14,919	6,177.321	595	58,889	656,688
	Total Bali 2009 :	3,918	8,840	92	12,850	6,825.979	772	55,417	688,664
	Total Bali 2008 :	2,338	9,677	577	12,593	6,766.620	699	54,210	732,473
	Total Bali 2007 :	2,828	9,595	18	11,641	7,457.236	777	54,761	796,473

Table 6.7 Produksi Buah-buahan

No	KOMODITAS	TAHUN					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
A1.	Alpukat						
	Luas Tanam (Ha)	29	29	8	9	10	14
	Luas Panen (Ha)	167	192	254	285	258	215
	Produktivitas (Kw/Ha)	69.51	59.81	72.71	67.02	77.24	95.64
	Produksi (Ton)	1,159	1,151	1,849	1,911	1,997	2,053
	Sisa Tanaman akhir (Ha)	649	673	671	672	665	318
2.	Belimbing						
	Luas Tanam (Ha)	3	2	1	0	0	0
	Luas Panen (Ha)	32	63	31	21	18	17
	Produktivitas (Kw/Ha)	133.02	135.44	147.33	222.97	224.43	143.82
	Produksi (Ton)	423	847	460	459	410	250
	Sisa Tanaman akhir (Ha)	132	121	115	110	87	23
3.	Duku/Langsar						
	Luas Tanam (Ha)	0.39	1.48	0.50	5.30	1.05	0.90
	Luas Panen (Ha)	108.25	212.40	205.46	60.03	148.78	212.36
	Produktivitas (Kw/Ha)	28.25	28.88	46.80	73.88	60.32	28.62
	Produksi (Ton)	305.85	613.41	961.45	443.50	897.40	607.70
	Sisa Tanaman akhir (Ha)	999.31	993.46	957.81	932.14	899.52	397.92
4.	Durian						
	- Luas Tanam (Ha)	234	234	331	189	431	50
	- Luas Panen (Ha)	625	802	877	1,526	1,019	1,003
	- Produktivitas (Kw/Ha)	100.93	105.91	128.98	111.78	138.76	62.59
	- Produksi (Ton)	6,311	8,499	11,308	17,059	14,133	6,281
	- Sisa Tanaman akhir (Ha)	3,459	3,602	3,829	4,009	4,464	1,990
5.	Jambu Biji						
	- Luas Tanam (Ha)	6	1	6	1	1	1
	- Luas Panen (Ha)	186	133	135	144	157	141
	- Produktivitas (Kw/Ha)	135.84	189.74	369.49	115.55	88.01	87.81
	- Produksi (Ton)	2,523	2,523	4,971	1,670	1,380	1,242
	- Sisa Tanaman akhir (Ha)	610	599	574	563	533	181

6.	Jeruk						
	- Luas Tanam (Ha)	551	201	1,969	1,243	312	565
	- Luas Panen (Ha)	6,085	12,151	11,755	11,568	12,221	12,220
	- Produktivitas (Kw/Ha)	145.57	131.38	122.30	85.71	106.11	112.27
	- Produksi (Ton)	88,578	159,640	143,757	99,155	129,669	137,186
	- Sisa Tanaman akhir (Ha)	18,105	17,972	19,692	20,808	19,643	17,187
7.	Mangga						
	- Luas Tanam (Ha)	27	56	152	119	141	30
	- Luas Panen (Ha)	6,127	7,484	6,768	6,795	5,250	4,233
	- Produktivitas (Kw/Ha)	51.74	46.64	80.86	58.20	76.90	66.32
	- Produksi (Ton)	31,701	34,907	54,727	39,551	40,372	28,071
	- Sisa Tanaman akhir (Ha)	17,740	17,891	17,746	17,780	17,646	8,846
8.	Manggis						
	- Luas Tanam (Ha)	212	144	280	84	199	211
	- Luas Panen (Ha)	254	472	392	1,075	857	898
	- Produktivitas (Kw/Ha)	56.59	57.13	93.76	53.55	48.20	38.25
	- Produksi (Ton)	1,437	2,695	3,679	5,758	4,128	3,435
	- Sisa Tanaman akhir (Ha)	2,802	2,855	3,012	3,167	3,952	2,705
9.	Nangka/Cempedak						
	- Luas Tanam (Ha)	82	64	104	25	124	44
	- Luas Panen (Ha)	1,302	1,583	2,704	3,535	3,374	3,852
	- Produktivitas (Kw/Ha)	202.17	153.17	133.00	83.13	97.81	49.11
	- Produksi (Ton)	26,313	24,255	35,962	29,385	33,005	18,917
	- Sisa Tanaman akhir (Ha)	17,740	5,537	8,523	8,497	8,562	2,640
10.	Nenas *)						
	- Luas Tanam (Ha)	0.16	0.33	0.87	0.07	0.07	0.04
	- Luas Panen (Ha)	31	22	33	9	6	2
	- Produktivitas (Kw/Ha)	670.00	717.50	1,911.13	744.87	957.54	914.16
	- Produksi (Ton)	2,071	1,586	6,292	646	545	203
	- Sisa Tanaman akhir (Ha)	34	33	29	28	26	4
11.	Pepaya						
	- Luas Tanam (Ha)	8	9	18	33	34	31
	- Luas Panen (Ha)	153	151	132	132	119	151

	- Produktivitas (Kw/Ha)	365.20	367.20	1,069.75	698.35	658.31	439.13
	- Produksi (Ton)	5,593	5,560	14,125	9,233	7,864	6,651
	- Sisa Tanaman akhir (Ha)	389	361	340	352	354	125
12.	Pisang *)						
	- Luas Tanam (Ha)	91	34	3,145	42	30	50
	- Luas Panen (Ha)	11,313	9,756	14,247	3,684	3,647	3,464
	- Produktivitas (Kw/Ha)	160.27	136.34	165.34	444.34	451.62	492.96
	- Produksi (Ton)	181,310	133,010	235,562	163,685	164,699	170,769
	- Sisa Tanaman akhir (Ha)	9,616	9,550	9,288	9,503	9,216	5,890
13.	Rambutan						
	- Luas Tanam (Ha)	4	13	87	37	8	6
	- Luas Panen (Ha)	2,523	2,534	2,086	3,344	1,431	1,491
	- Produktivitas (Kw/Ha)	30.81	30.33	98.98	49.94	92.38	47.80
	- Produksi (Ton)	7,773	7,686	20,644	16,699	13,219	7,126
	- Sisa Tanaman akhir (Ha)	5,812	5,893	5,842	5,782	5,593	3,748
14.	Salak *)						
	- Luas Tanam (Ha)	4	22	25	11	40	1
	- Luas Panen (Ha)	3,896	3,050	3,955	2,742	3,601	3,850
	- Produktivitas (Kw/Ha)	98.40	94.20	98.03	116.31	94.60	77.84
	- Produksi (Ton)	38,336	28,731	38,766	31,897	34,061	29,971
	- Sisa Tanaman akhir (Ha)	4,762	4,778	4,695	4,643	4,656	417
15.	Sawo						
	- Luas Tanam (Ha)	388	60	139	39	119	23
	- Luas Panen (Ha)	382	382	362	420	548	345
	- Produktivitas (Kw/Ha)	115.62	94.04	232.46	83.81	92.32	100.61
	- Produksi (Ton)	4,412	3,596	8,422	3,516	5,063	3,475
	- Sisa Tanaman akhir (Ha)	1,567	1,566	1,654	1,680	1,780	386
16.	Markisa/Konyal						
	- Luas Tanam (Ha)	-	-	-	1	0	0
	- Luas Panen (Ha)	-	-	-	6	6	6
	- Produktivitas (Kw/Ha)	-	-	-	305.80	174.63	220.71
	- Produksi (Ton)	-	-	-	175	104	128
	- Sisa Tanaman akhir (Ha)	-	-	-	26	20	9

17.	Sirsak						
	- Luas Tanam (Ha)	6	4	8	1	1	2
	- Luas Panen (Ha)	46	31	29	17	17	13
	- Produktivitas (Kw/Ha)	67.53	63.48	61.23	93.94	71.99	89.27
	- Produksi (Ton)	312	199	178	161	120	115
	- Sisa Tanaman akhir (Ha)	143	130	123	118	114	20
18.	Sukun						
	- Luas Tanam (Ha)	62	42	111	1	1	-
	- Luas Panen (Ha)	19	33	22	32	41	20
	- Produktivitas (Kw/Ha)	95.69	60.27	125.38	50.95	67.10	69.94
	- Produksi (Ton)	179	198	270	161	275	139
	- Sisa Tanaman akhir (Ha)	438	387	383	366	351	67
20.	Anggur						
	- Luas Tanam (Ha)	6	5	8	2	2	3
	- Luas Panen (Ha)	405	272	258	373	179	151
	- Produktivitas (Kw/Ha)	358.00	356.30	655.63	307.41	537.36	601.93
	- Produksi (Ton)	14,506	9,682	16,895	11,471	9,621	9,118
	- Sisa Tanaman akhir (Ha)	593	564	539	522	392	390
JUMLAH A+B							
	- Luas Tanam (Ha)	1,723	947	6,432	1,849	1,456	1,033
	- Luas Panen (Ha)	33,676	39,353	44,275	35,830	32,918	32,314
	- Produktivitas (Kw/Ha)	122.75	108.13	135.34	120.93	140.29	131.81
	- Produksi (Ton)	413,373	425,531	599,243	433,301	461,810	425,914
	- Sisa Tanaman akhir (Ha)	85,901	73,790	78,292	79,890	79,250	45,401

C.1.	Semangka						
	- Luas Tanam (Ha)	1,390	1,357	1,099	666	848	1,051
	- Luas Panen (Ha)	1,393	1,533	1,000	606	887	1,063
	- Produktivitas (Kw/Ha)	96.35	96.35	169.93	143.23	145.51	172.94
	- Produksi (Ton)	13,422	14,770	16,993	8,680	12,907	18,383
2.	Melon						
	- Luas Tanam (Ha)	42	18	55	34	44	29
	- Luas Panen (Ha)	44	21	51	32	40	43

	- Produktivitas (Kw/Ha)	75.85	75.10	142.00	14.81	171.15	138.63
	- Produksi (Ton)	334	158	724	47	685	596
JUMLAH A+B+C							
	- Luas Tanam (Ha)	3,156	2,321	7,586	2,549	2,348	2,113
	- Luas Panen (Ha)	35,113	40,907	45,326	36,468	33,845	33,420
	- Produktivitas (Kw/Ha)	121.65	107.67	136.11	121.21	140.46	133.12
	- Produksi (Ton)	427,128	440,459	616,960	442,027	475,401	444,894
	- Sisa Tanaman akhir (Ha)	85,901	73,790	78,292	79,890	79,250	45,401

Berdasarkan hasil kerja pokja diperoleh daftar panjang dari komoditi unggulan Provinsi Bali seperti pada table berikut:

Tabel 6.8 Daftar Panjang Komoditi Unggulan Provinsi Bali.

No	Komoditi	No	Komoditi
1	Jambu Mete	12	Babi
2	Kopi	13	Jahe
3	Rumput Laut	14	Ikan Laut
4	Salak	15	Kacang Tanah
5	Bambu	16	Kakao
6	Kelapa Dalam	17	Semangka
7	Anggur	18	Ayam Ras
8	Jeruk	19	Beras Merah
9	Sapi	20	Manggis
10	Cengkeh	21	Lidah Buaya
11	Mangga	22	Sengon

6.2. Penetapan Komoditas Prioritas Industri Agro Unggulan Daerah

6.2.1. Metode penentuan komoditas prioritas industri agro unggulan daerah

1. Tahap persiapan

Pada tahap ini dilakukan pencarian sumber-sumber kepustakaan atau referensi yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan untuk memperkaya kajian dan memperkuat dasar teori. Pada tahap persiapan observasi tidak dilakukan secara langsung ke lapangan, melainkan hanya mengkaji data statistik yang diperoleh dari badan pusat statistik (BPS) tentang kondisi daerah amatan dan panduan pengembangan Industri Agro Unggulan Daerah dalam konteks sistem inovasi daerah.

2. Pengumpulan dan Pengolahan Data

- Pengumpulan data 5 komoditi unggulan daerah dari masing-masing kabupaten dan kota.

- Penguatan data berdasarkan berbagai pendekatan dan dukungan data misalnya : luas lahan, jumlah produksi, serta jumlah usaha sehingga diperoleh data unggulan yang valid untuk dalam dipersiapkan melaksanakan FGD I dengan metode *expert judgment* melalui pengisian kuisioner, skala likert dan berdasarkan bobot kriteria yang telah ditentukan. Hasil analisis akan diperoleh 10 data yang memiliki bobot tertinggi.
- Dari 10 data tersebut maka akan ditentukan 5 produk unggulan berdasarkan sub criteria yang telah ditentukan bobotnya melalui FGD II
- Setelah dicapai 3-5 produk unggulan, maka dibuat masing-masing analisis SWOT dan Analisis Rantai Nilai.
- Setelah ditentukan , maka dibuat strategi dan program sesuai dengan kebijakan pemerintah.

3. Tahap Analisis dan Interpretasi Data

Pada tahap ini akan dilakukan analisis dan interpretasi data terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah sebelumnya. Luaran ini akan menjadi masukan bagi daerah untuk menerapkan peringkat komoditas industri agro unggulan daerah untuk dikembangkan. Analisis yang komprehensif akan disajikan terkait pemilihan prioritas unggulan dengan didukung data kuantitatif dan kualitatif. Selain itu, disusun pula analisis peningkatan nilai tambah untuk komoditas yang menjadi prioritas utama.

1.2.2. Penentuan Kriteria Pemilihan Komoditas Unggulan

Dalam mengidentifikasi industri prioritas digunakan pendekatan hybrid MCDM (*multi criteria decision making*), Metode Perbandingan Exponensial (MPE), Expert Judgment, Analisis Rantai Nilai dan Analisis SWOT

Metode *multi criteria decision making* (MCDM), ditujukan untuk pengambilan keputusan yang mengandung kriteria obyektif majemuk, saling konfliktual, dan memiliki ukuran yang tidak bisa saling dibandingkan. MCDM dijadikan metode pilihan karena kemampuan metode ini dalam pengambilan keputusan atas satu pilihan jika proses pemilihan dilakukan oleh lebih dari satu orang/pengambilan keputusan (Artana, 2008). Hybrid MCDM digunakan dalam menghadapi permasalahan pengambilan keputusan yang kompleks,

yang umumnya terdiri atas faktor kualitatif dan kuantitatif. Hybrid MCDM digunakan sebagai kombinasi dari beberapa metode dalam pengambilan keputusan.

Identifikasi terhadap kriteria-kriteria yang berpengaruh terhadap pengembangan klaster pernah dilakukan oleh BPPT (2006) yang menyepakati tujuh kriteria yakni bahan baku, tenaga kerja, teknologi, jangkauan pasar, kekhasan produk, omset, dan keterkaitan hulu-hilir. Kriteria lainnya disampaikan Soekartawi (1993), yang mengidentifikasi faktor yang harus diperhatikan dalam mendukung pengembangan industri berbasis pertanian, yaitu aspek kebijakan, koordinasi lintas sektoral, teknologi, kelembagaan, dan sumber daya manusia. Sementara itu, terdapat beberapa kriteria penilaian dari produk unggulan yaitu, kandungan lokal, harga, jangkauan pasar, tenaga kerja, nilai tambah pengolahan, dan ramah lingkungan. kajian ini memilih kriteria pemilihan berdasarkan assesment daya tarik daya saing dan signifikansinya terhadap pengembangan industri agro unggulan daerah di provinsi Bali.

Penentuan produk yang terpilih berdasarkan kriteria:

1. Analisis Kuantitatif:

- a) Pasar
- b) Ketersediaan Bahan baku
- c) Teknologi
- d) Kebijakan

2. Analisis kualitatif:

- a) Masukan Pokja Teknis terkait di daerah
- b) Mampu menciptakan produk turunan (*derived product*) yang banyak
- c) Kemampuan mensubstitusi impor atau potensi ekspor

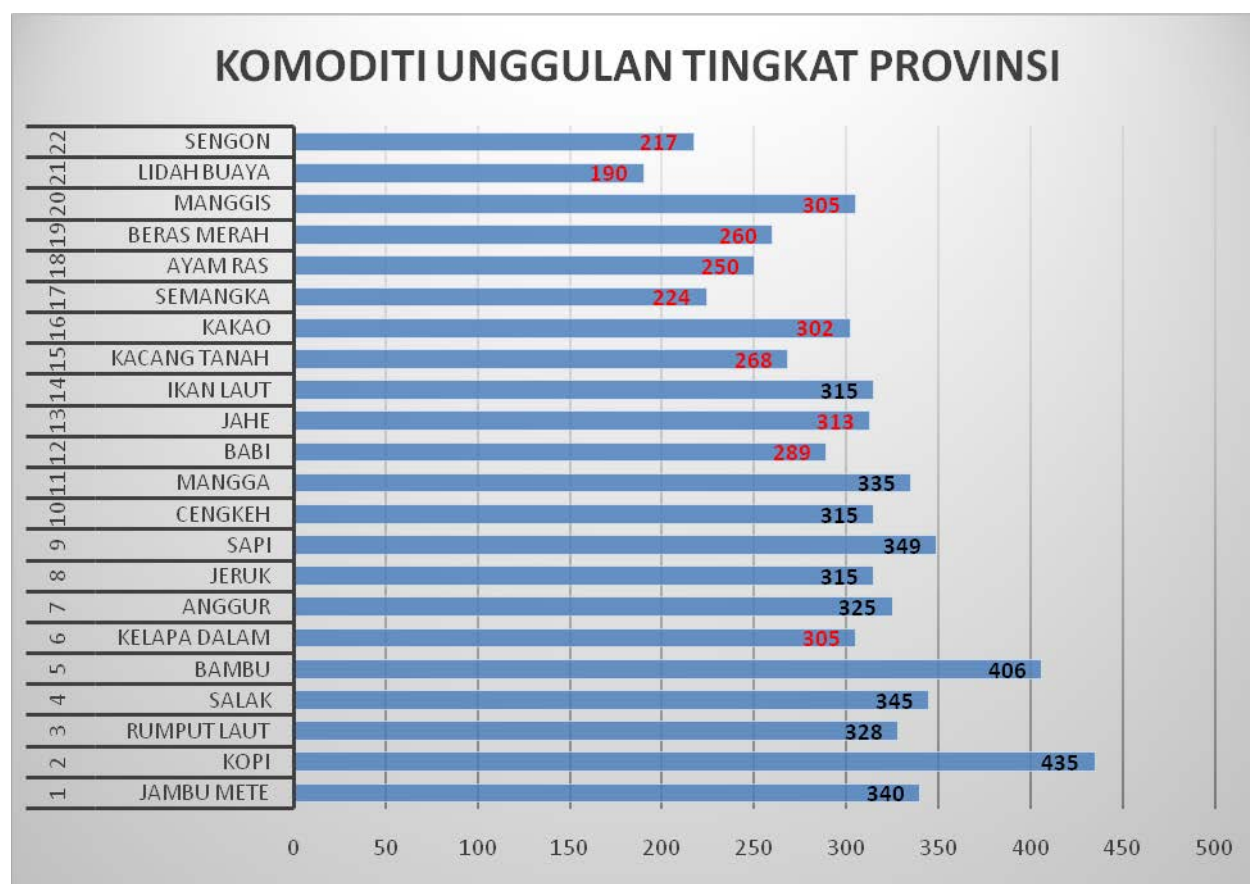
Berdasarkan dua kriteria di atas telah disusun sub kriteria dan bobotnya sesuai dengan Table 6.3. Dapat diketahui bahwa kriteria terkuat ada pada pasar, ketersediaan bahan baku dan teknologi.

Tabel 6.9 Kriteria dan sub kriteria penentuan prioritas Komoditi unggulan provinsi Bali.

MAIN KRITERIA	SUB KRITERIA	BOBOT
PASAR (30)	Lokal	10
	Antar pulau	10
	Ekspor	10
KETERSEDIAAN BAHAN BAKU (30)	Sumber bahan baku	15
	1. Sumber bahanbaku Local 2. Antar pulau 3. Impor	
	Waktu ketersediaan	10
	1. Waktu Musiman 2. Waktu Sepanjang tahun	
	Syarat untuk di olah	5
	1. Syarat khusus untuk diolah 2. Tidak diperlukan syarat khusus	
TEKNOLOGI (30)	PenguasaanTeknologi	10
	Ketersediaan Teknologi	10
	Pengembangan Teknologi	10
KEBIJAKAN (10)	Kesesuaian dengan RPJMN	4
	Kesesuaiaandgn RPJMD	4
	Isu-isu strategis	2

1.2.3. Komoditas Industri Agro Unggulan Daerah Prioritas

Data komoditi yang dihasilkan oleh provinsi Bali menyebutkan bahwa terdapat 22 komoditi unggulan. Penilaian berdasarkan criteria dan sub criteria menghasilkan daftar panjang komoditi unggulan sesuai dengan Gambar 3.1



Gambar 6.1 Daftar panjang komoditi unggulan di provinsi Bali

Dari hasil penilaian diperoleh sebanyak 15 komoditi yang mencapai nilai lebih besar dari 300. Hasil ini memudahkan tim kerja untuk mengkerucutkan komoditi unggulan provinsi menjadi 11 komoditi saja.

Table 6.10 Komoditi yang menempati posisi teratas.

No	Komoditi	Nilai
1	Kopi	435
2	Bambu	406
3	Sapi	349
4	Salak	345
5	Jambu Mete	340
6	Mangga	335
7	Rumput Laut	328
8	Anggur	325
9	Jeruk	315
10	Cengkeh	315
11	ikan laut	315

Hasil analisis lanjut dari pokja dengan kerangka penilaian bahwa titik tekan dari peringkat komoditi unggulan adalah berdasarkan potensinya untuk dilakukan hilirisasi, maka dihasilkan 5 komoditi unggulan yang akan menjadi bahan masukan bagi FGD dalam menentukan 3 komoditi unggulan. Adapun kelima komoditi unggulan tersebut sesuai dengan Table 6.5.

Tabel 6.11 Lima komoditi unggulan

Nomor	Komoditi unggulan	Nilai
1	Kopi	460
2	Buah-buahan	453
3	Jambu mete	380
4	Rumput laut	350
5	Sapi	342

Penentuan 3 komoditi unggulan yang akan masuk ke dalam kebijakan pengembangan Industri Agro Unggulan Provinsi Bali dilakukan dengan mempertimbangkan usulan pokja dan undangan. Pihak yang diundang adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap 5 komoditi unggulan tersebut. Adapun undangan yang dihadirkan pada proses ini adalah

1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali
2. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali
3. Kepala Dinas perkebunan Provinsi Bali
4. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali
5. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Bali
6. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar
7. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buleleng
8. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jembrana
9. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan
10. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem
11. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangli
12. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar
13. Kepala Dinas Koperasi UKM perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Badung
14. Kepala Dinas Koperasi UKM perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung

15. Koperasi MPIG Kopi Kintamani, Bangli
16. PT Mandiling Coffee Prima, Jl. Sunset Road Permai No 3 Blok B, Legian Kuta
17. Prof. Dr. Ni Luh Putu Wiagustini, SE Fakultas Pertanian Universitas Udayana
18. Dekan Fakultas Teknologi Pertanian
19. PT. East Indo Fair Trading, Karangasem
20. Bapak Sianta, Karangasem.

Hasil rebug telah menghasilkan 3 komoditi unggulan yang masuk ke dalam Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Bali. Adapun ketiga komoditi tersebut adalah:

1. Kopi
2. Buah-buahan
3. Jambu mente

Beberapa pertimbangan yang diberikan pada 3 komoditi unggulan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Ketiga komoditi mempunyai potensi produksi yang besar. Bahkan komoditi kopi sudah mempunyai sertifikat IG (indikasi geografis)
2. Tren pasar menunjukkan perkembangan yang positif ke depannya serta budaya mengkonsumsi kopi semakin berkembang yang juga didukung oleh banyaknya kedai-kedai yang menyediakan kopi dalam menunya.

Adapun deskripsi dari ketiga komoditi terpilih tersebut disajikan dalam beberapa table berikut:

Tabel 6.12 Deskripsi dari Komoditi Terpilih

No	Komoditas	Luas areal (Ha)	Produksi (ton)	Industri turunan	Industri pendukung
1	Kopi Arabika (sertifikasi Indikasi Geografis)	11.924	4.199	<ul style="list-style-type: none"> • Industri Roasted Coffee • Industri kopi bubuk • Industri kopi instan • Industri kopi dekafein • Industriminuman kopi • Industri kopi Mix • Industriminuman kopi beraroma • produk turunanolahan kopi lainnya • Industri kultidandaging buah : industrisilase, wine, cukamakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Industri kemasan primer • Industri mesin/peralatan • Jasa perbankan. • Jasa transportasi • Jasa perhotelan, cafe dan restoran
2	Kopi Robusta	23.614	10.539	<ul style="list-style-type: none"> • Industri Roasted Coffee • Industri kopi bubuk • Industri kopi instan • Industri kopi dekafein • Industriminuman kopi • Industri kopi Mix • Industriminuman kopi beraroma • produk turunanolahan kopi lainnya • Industri kultidandaging buah : industrisilase, wine, cukamakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Industri kemasan primer • Industri mesin/peralatan • Jasa perbankan. • Jasa transportasi • Jasa perhotelan, cafe dan restoran

3	Jambu Mete (sertifikasi Indikasi Geografis)	15.356	1.555	<ul style="list-style-type: none"> • Industri olahkacang mete • Industri olahdodol mete • Industri olahcoklat mete • Industri olahanbuahsemu mete menjadisirup, nata de cashew, abon mete, jus mete, sele mete • Industri kuldandaging buah : industrisilase, wine, cukamakan • Industri olahan CNSL 	<ul style="list-style-type: none"> • Industri kemasan primer • Industri mesin/peralatan • Jasa perbankan. • Jasa transportasi • Jasa perhotelan, cafe dan restoran
---	---	--------	-------	--	---

Komoditi	Bahan Baku	Teknologi Hilirisasi			Pasar	Kelembagaan	Prospek
			Pelaku	Skala			
Kopi	14.538 Ton	<ul style="list-style-type: none"> • Industri Roasted Coffee • Industri Kopi Bubuk 	Subak Abian		Lokal, Antar Pulau	Koperasi Ig, Asosiasi Kopi, Eksportir, Pasar Lelang, Pemerintah	Industri Kopi Dekafein, Silase, Wine, Cuka Makan
		<ul style="list-style-type: none"> • Industri Kopi Instan • Industri Minuman Kopi 	Toko/Warung		Lokal		
		<ul style="list-style-type: none"> • Industri Kopi Mix • Industri Minuman Kopi Beraroma 	Kedai Kopi		Lokal, Antar Pulau		

		<ul style="list-style-type: none"> • Industri Kopi Mix • Industri Minuman Kopi Beraroma • Industri Kopi Instan • Industri Minuman Kopi 	Ikm		Lokal, Antar Pulau, Internasional		
--	--	--	-----	--	-----------------------------------	--	--

Komoditi	Bahan Baku	Teknologi Hilirisasi			Pasar	Kelembagaan	Prospek
			Pelaku	Skala			
Jambu Mete	3,499.98 Ton	Mete Gelondong Kering, Biji Mete Kering	Subak Abian, Kelompok Tani	Kelompok Tani, IKM	Lokal, Antar Pulau	Koperasi Ig, Asosiasi Kopi, Eksportir, Pasar Lelang, Pemerintah	Industri Arang, Minyak, Rem Dan Cnsl
		Industri Kacang Mete Oven Berbagai Bumbu	Toko/Warung Ikm Pt. Anarcadea Pt East Indo Fair Trading	Ikm Dan Industri	Lokal		
		Industri Pengolahan Daging Buah Mete (Sele, Sirup, Nata De Cashew, Jelly)	Industri Rumah Tangga, Ikm	Ikm Dan Industri	Lokal, Antar Pulau		
		Industri Pengolahan Wine, Cuka Makan, Silase.	Ikm/Pt Anarcadea/Pt Eastt Indo Fair Trading	Industri Wine (Karangas em)	Lokal, Antar Pulau, Internasional		

6.2.4 Analisis Rantai Pasok

6.2.4.1 Analisis Rantai Pasok Kopi

Kopi merupakan komoditi perkebunan paling awal diusahakan oleh masyarakat terutama oleh masyarakat di daerah perbukitan. Kesesuaian lahan dengan jenis tanaman menjadikan kopi sebagai pilihan untuk komoditi yang ditanam. Produksi sampai saat ini tercapai 10.379-18.883 ton/tahun sepanjang 2010-2014. Meskipun kopi juga membutuhkan proses yang panjang, namun proses ini sudah dikuasai oleh petani secara turun temurun maupun belajar sendiri. Akibatnya, sampai saat ini produksi kopi tidak mempunyai varian yang banyak. Proses pengolahan juga belum tersentuh oleh teknologi dan pengetahuan yang cukup sehingga perkembangannya stagnan sampai saat ini.

Segala aktivitas yang terjadi dalam jalur distribusi komoditi kopi secara singkat dapat dilihat pada table 5.1.

Kopi dipanen dengan dua metode, petik merah/panen pilih dan panen keseluruhan (dimasyarakat di istilahkan dengan ngerut). Masing-masing mempunyai kelebihan yang dijadikan pertimbangan oleh petani.

Petik merah biasanya dilakukan oleh petani di daerah kintamani yaitu jenis kopi robusta yang akan dipersiapkan untuk olah basah. Pemilihan petik ini dikarenakan permintaan konsumen dengan mutu yang standar. Biasanya hasil yang diperoleh siap untuk dijual ke luar provinsi oleh pengepul besar, eksportir atau oleh kedai-kedai dengan menu kopi specialty.

Table 6.13 Jalur distribusi Kopi dan Aktivasnya

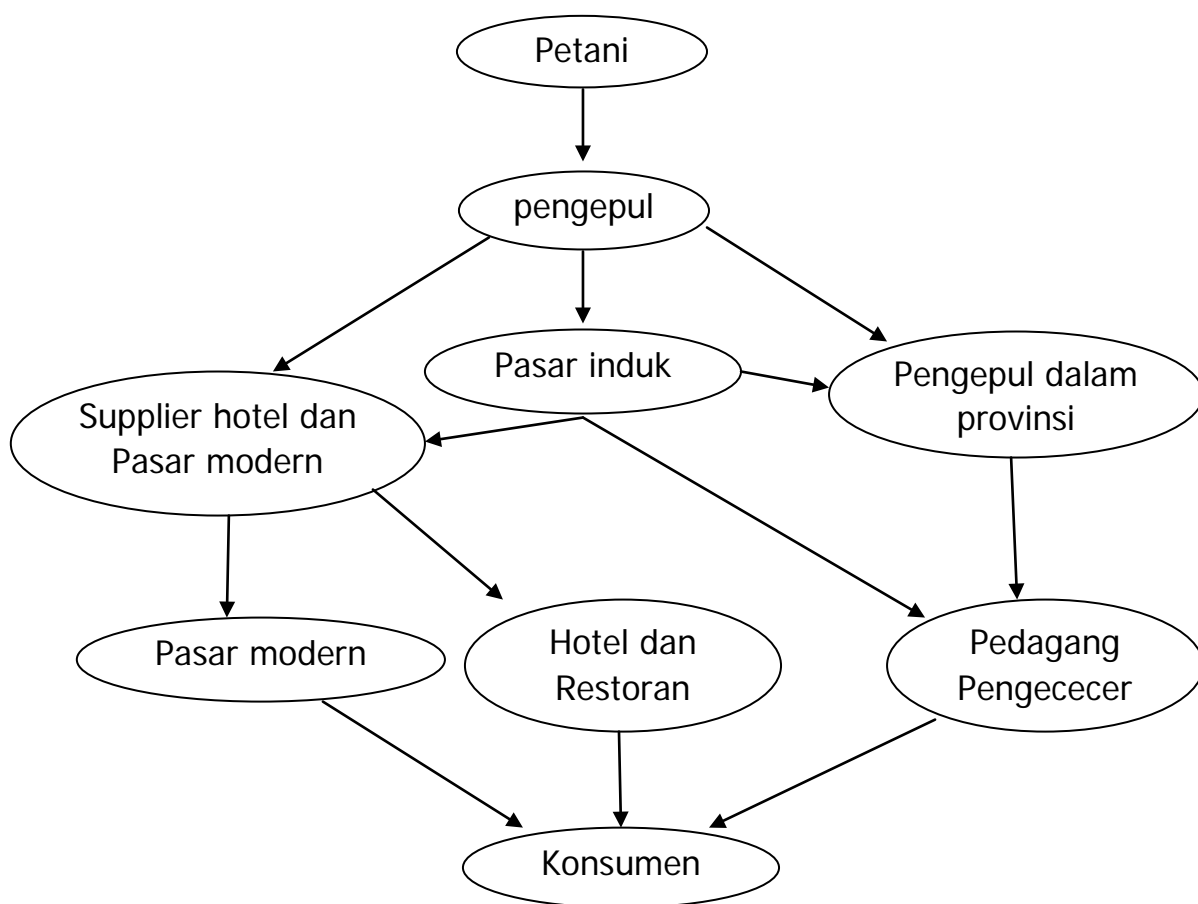
Jalur Distribusi	Aktivitas
Petani	Panen
Petani pengepul	Pemecahan kulit Perendaman kopi pecah kulit Pemisahan kulit dan biji kopi Penjemuran Pemisahan kulit ari Pengemasan/penggudangan Pengangkutan
Koperasi	Grading mutu Penggudangan Pengemasan Penyangraian penggilingan Pengangkutan ke retailer
Eksportir	Grading mutu Penggudangan Pengemasan ekspor
Retailer	Sortasi biji Penyangraian Penggilingan Pengemasan Distribusi ke konsumen

6.2.4.2 Analisis Rantai Pasok Buah-buahan

Jalur distribusi klaster buah-buahan sangat tergantung musim. Setiap daerah mempunyai musim panen yang tidak persis sama sehingga ada kemungkinan terjadi pemenuhan kebutuhan produk buah dipenuhi dari daerah lain di luar provinsi. Petani sudah biasa melakukan penjualan dengan system ijon. Sehingga petani hanya mempunyai peran dalam memelihara produknya sampai berbunga atau berbuah. Pada produk buah mangga, para pengepul buah/saudagar bahkan mengambil tanggung jawab untuk memelihara tanaman pada saat musim mangga siap berbunga. Penyemprotan dengan obat hama sampai penggunaan perangsang buah dilakukan oleh pengepul.

Saat dipanen, pengepul datang dengan membawa tenaga pemanen ke kebun. Sortasi langsung dilakukan dilahan, kemudian hasil panen diangkut ke gudang pengepul untuk dilakukan sortasi dan grading lanjutan. Pada beberapa kasus, kebun yang terjangkau fasilitas jalan, pengepakan dilakukan di pinggir jalan untuk kemudian dilakukan pengiriman langsung ke pasar induk atau ke pengepul lain di dalam/di luar provinsi.

Di pasar induk, produk buah-buahan dibeli oleh para pengecer secara grosiran dan dijual kembali konsumen. Para supplier pasar-pasar modern ataupun hotel dan restoran juga mengambil produknya dari pasar induk.



Gambar 6.2 Jalur distribusi Buah-buahan

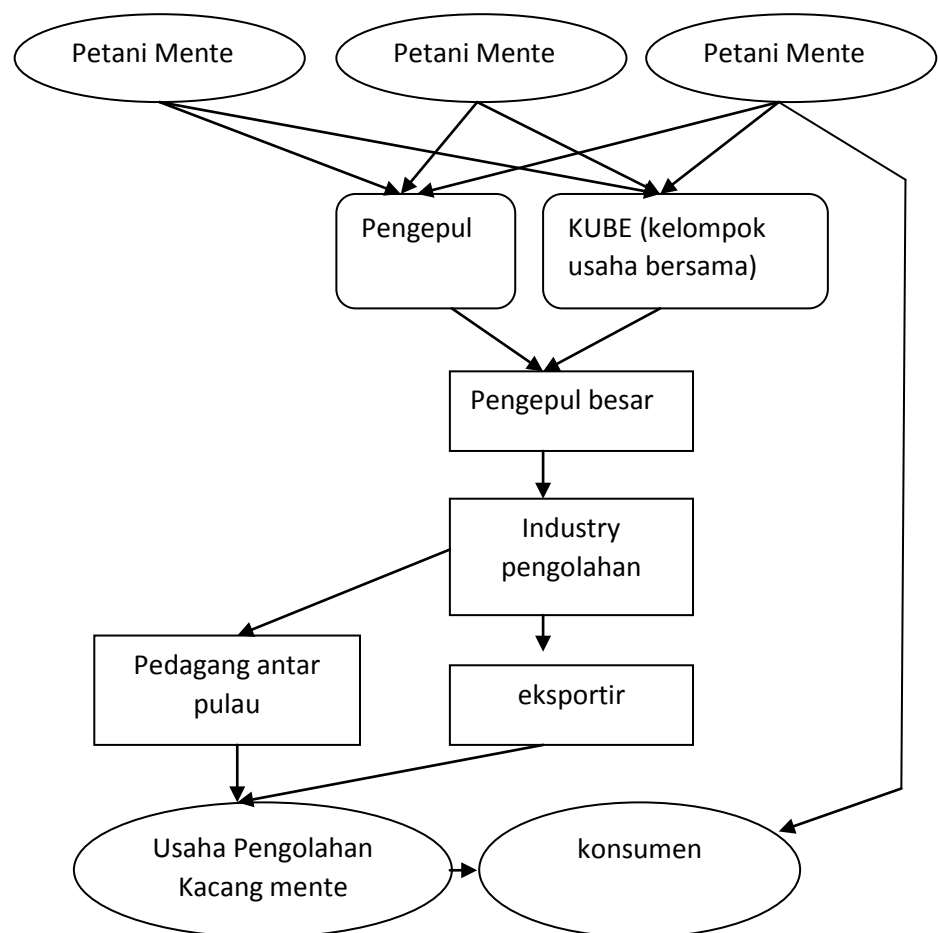
6.2.4.3 Analisis Rantai Pasok Mente

Mente dihasilkan oleh tanaman mente yang mempunyai karakteristik tanaman tahunan dimana buah terdapat pada ujung dahan yang tingginya mulai dari rendah dapat dijangkau dari bawah sampai tinggi yang memerlukan alat pemanen. Meskipun pada praktiknya mente banyak dipanen dengan alat, namun kualitas biji mente lebih baik diperoleh dari buah mente yang telah jatuh. Sehingga proses ini membutuhkan waktu yang panjang.

Kendala yang dihadapi oleh produsen mente gelondongan sangat tergantung musim/cuaca. Disamping itu, mutu biji mente gelondongan juga memberikan andil yang besar terhadap petani. Dari cuaca, kerusakan atau kegagalan pembuahan terjadi apabila pada saat pembungaan terjadi hujan lebat beberapa hari ataupun mengalami kekeringan sehingga kegagalan pembuahan. Mutu biji mente gelondongan yang kurang bagus akan menghasilkan biji mente yang dibawah standar. Ukuran alat pemecah biji mente bersifat tetap, tidak bisa disesuaikan dengan besar kecilnya gelondong yang dipecah. Karena itu, apabila gelondong yang diolah memiliki kualitas bagus, maka pemecahan dapat dilakukan dengan mudah dan menghasilkan biji mente yang utuh. Sebaliknya, biji mente kupas banyak mengalami pecah apabila ukuran mente gelondongnya kecil. Karena kendala tersebut, petani cenderung menjual mente gelondong ke pengepul atau kelompok dengan mutu yang beragam. Di pengepul, sortasi mente gelondongan dilakukan secara manual. Mente dengan kualitas bagus akan dikirim ke pengepul mente yang lebih besar atau ke pengolah mente gelondong menjadi mente kacang.

Mente gelondong yang diterima oleh kelompok usaha bersama juga terkadang diolah menjadi kaca mente kering untuk memenuhi pesanan konsumen perorangan maupun pesanan usaha pengolah mente. Ditahapan pengolahan mente gelondong ini memerlukan waktu dan juga tenaga kerja yang besar. Dimulai dari pengeringan

mente mentah, kemudian dipecah dan pembersihan kacang pecah kulit dari kontaminasi minyak/getah. Setelah ini harus dilakukan penjemuran atau pengovenan untuk menghilangkan kulit arinya. Biji mente yang telah bersih bisa langsung dikemas untuk dikirim ke pemesan. Beberapa kelompok juga melakukan usaha pengolahan mente menjadi kacang mente goreng yang dijual ke pedagang pengecer.



Gambar 6.3 Jalur Distribusi Mete

Secara lengkap jalur distribusi mente diprovinsi bali disajikan dalam bagan pada Gambar 6.3.

Tabel 6.14 Jalur Distribusi Mete dan Aktivitasnya

Jalur distribusi	Aktivitas
Petani	Memanen Memisahkan biji mente dan buah semu Mengangkut ke pengepul
Pengepul/kelompok tani	memilah biji mente mengeringkan mengemas mengangkut mente ke konsumen
Pengepul luar provinsi	Penggudangan Analisis mutu Pengerangan
Industri pengolah mente	Pengkacipan Pengerangan Pengolahan
Konsumen	

6.3. Analisis rantai nilai

6.3.1 Analisis rantai nilai Kopi

Proses pengolahan kopi berkembang di provinsi bali masih terbatas pada proses pembubukan kopi. Kelompok tani kopi bahkan lebih banyak bergarak dibagian penyedia bahan baku berupa kopi beras (kopi OC). Selain kopi OC tahan simpan, produksi kopi OC tidak membutuhkan peralatan dan biaya tambahan untuk kemudian dijual. Proses penyangraian kopi membutuhkan energy (listrik dan bahan bakar), proses pembubukan/penggilingan kopi juga membutuhkan energy dan juga terjadinya kehilangan akibat tertinggal dalam alat penggilingan. Biaya terbesar kemungkinan datang dari proses pengemasan apabila dilakukan dengan menggunakan kemasan khusus dan baik. Harga pembungkus kopi berkisar dari Rp5000-Rp10.000 per buah. Besarnya biaya yang dibutuhkan untuk proses lanjut kopi ini membuat beberapa kelompok memilih untuk melakukan penjualan dalam bentuk kopi OC. Kelompok tani yang sudah

mempunyai pangsa pasar yang baik melakukan proses lanjut hanya berdasarkan permintaan saja. Selama ini ekspor kopi biji lebih banyak ke Negara-negara eropa seperti Itali.

Tabel 6.15 Jalur Distribusi Mete dan Aktivasnya

Jalur Distribusi	Aktivitas	Nilai jual (Rp)
Petani	Panen	Rp7000/kg
Petani pengepul	Pemecahan kulit Perendaman kopi pecah kulit Pemisahan kulit dan biji kopi Penjemuran Pemisahan kulit ari Pengemasan/penggudangan Pangkutan	Rp65.000/kg
Koperasi	Grading mutu Penggudangan Pengemasan Penyangraian penggilingan Pangkutan ke retailer	Bubuk Rp200.000/kg (dengan kemasan) Rp100.000/kg (tanpa kemasan)
Eksportir	Grading mutu Penggudangan Pengemasan ekspor	-
Retailer	Sortasi biji Penyangraian Penggilingan Pengemasan Distribusi ke konsumen	-

6.3.2 Analisis rantai nilai Buah-buahan

Sebagai studi kasus, jalur distribusi klaster buah-buahan digunakan buah anggur. Komoditi buah anggur terbesar di provinsi bali terdapat di kabupaten buleleng, tepatnya di kecamatan seririt. Petani melakukan beberapa aktivitas pemeliharaan tanaman, diantaranya, penyiangan rumput, pemupukan dan penyemprotan, serta pemangkasan tanaman setelah panen. Pengepul memanen buah dengan memetik buah langsung dilahan.

6.3.3 Analisis rantai nilai Mente

Rangkaian aktivitas yang terjadi dalam jalur distribusi mente terbesar ada pada proses penyiapan kacang mente. Proses dari pengeringan, pengkacipan dan pengeringan untuk menghilangkan kulit ari membutuhkan tenaga kerja yang besar karena dikerjakan manual dan biji demi biji. Nilai tambah terbesar diperoleh dari proses ini, namun biaya yang diperlukan juga besar karena penggunaan tenaga kerja.

Adanya industry pengolahan mente diman proses pengacipan mente gelondongan dilakukan dengan kombinasi mesin dan manual, menjadikan produktivitas di titik ini semakin besar dan juga penambahan nilai yang diperoleh semakin besar.

Tabel 6.16 Jalur Distribusi Mete dan Aktivitasnya

Jalur distribusi	Aktivitas	Nilai (Rp)
Petani	Memanen Memisahkan biji mente dan buah semu Mengangkut ke pengepul	Rp7000-12.000/kg
Pengepul/kelompok tani	memilah biji mente mengeringkan mengemas mengkacip mengangkut mente ke konsumen	Rp9000-16.000/kg (gelondongan) Rp70.000-100.000/kg (Kacang mente)
Pengepul luar provinsi	Penggudangan Analisis mutu Pengeringan	Rp16.000/kg (gelondongan) Rp75.000-105.000/kg (Kacang mente)
Industri pengolahan mente	Pengkacipan Pengeringan Pengolahan	Rp110.000-150.000/kg
Konsumen		

6.4 Analisis SWOT Berbasis THIO (technology, Human resource, Informasi dan Organization)

6.4.1 Analisis SWOT KOPI

KEKUATAN (STRENGHT)	PELUANG (OPPORTUNITY)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Produksi provinsi besar 2. Petani sudah sangat kenal dengan teknologi budidaya kopi serta teknologi pengolahan 3. Alat-alat pengolahan sudah banyak dimiliki oleh kelompok tani melalui skim bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah. 4. Kopi termasuk produk yang tahan simpan, sehingga tidak mudah dipermainkan harga. 5. Jejaring informasi sudah terbangun berkat keunikan karakter dari kopi bali khususnya kopi kintamani, banyuatis dsb. Konsumen sudah datang langsung atau melalui perantara untuk melakukan transaksi pembelian. 6. Tumpang sari dengan tanaman jeruk merupakan kekuatan ekonomi penunjang petani. 7. Infrastruktur sudah sangat memadai meskipun topografi pegunungan yang curam 8. Petani kopi tergabung dalam gapoktan yang memudahkan dalam kordinasi dan pembinaan 9. Produktivitas kopi tinggi dan lebih intensif karena system tumpang sari. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasar local, regional dan dunia semakin berkembang sehingga pasokan kopi masih terbuka lebar dan kopi bean dapat disiapkan dengan penggunaan teknologi yang sederhana. 2. Munculnya kopi mix tidak menggeser konsumen kopi non mix bahkan kopi mix merupakan langkah yang bagus untuk memunculkan konsumen-konsumen kopi baru. Tren mengkonsumsi kopi sudah berkembang baik, sehingga tidak memerlukan proses edukasi/promosi yang besar. 3. Informasi tersebar di dunia maya, memudahkan petani utk memasarkan produk yang dihasilkan, disamping itu informasi harga kopi dunia pun bisa diakses melalui internet, sehingga memudahkan petani mengambil keputusan waktu penjualan. 4. Peluang untuk melakukan program bersama untuk meningkatkan mutu produk, tatakelola organisasi terbuka untuk petani dengan pihak luar baik swasta maupun perguruan tinggi. 5. Kopi sudah memperoleh perhatian yang sangat cukup dari pemerintahan 6. Tingginya kedatangan wisatawan memungkinkan dikembangkannya usaha agrowisata kopi bali.

KELEMAHAN (WEAKNESS)	TANTANGAN (THREAT)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mutu produksi masih beragam karena dipanen dan diolah dengan metode yang beragam pula. 2. Secara tradisi petani mengerti teknologi budidaya dan pengolahan, namun belum memahami rekayasa proses produk kopi. 3. Sumberdaya manusia dalam proses rekayasa masih perlu dibina sehingga mampu merekayasa kualitas kopi, menggunakan alat yang telah dimiliki untuk meningkatkan produktivitas. 4. Penggudangan berarti pula modal yang tertanam sehingga mempengaruhi ekonomi keluarga petani apabila tidak disalurkan dengan segera. Disamping itu Kondisi penyimpanan masih belum memenuhi kondisi penyimpanan biji kopi sehingga mengancam kerusakan selama penyimpanan 5. Desiminasi dan sosialisasi kekhasan kopi bali belum digarap oleh semua pihak sehingga masih informasi keunggulan kopi bali masih belum terlalu tampak. 6. Seringkali kopi dijadikan tanaman selingan dari jeruk. 7. Meskipun fasilitas memadai, masih menimbulkan efek biaya yang tinggi karena posisi yang jauh 8. Kelompok-kelompok petani produsen kopi sudah terbentuk, namun peran perseorangan lebih menonjol dibandingkan peran kelompok secara keseluruhan. 9. Pengembangan usaha pengolahan kopi terkendala modal meskipun pasokan dari petani anggota gapoktan tinggi. 10. Biaya operasional besar karena geografi yang curam. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kopi merupakan produk perkebunan yang sudah dibudidayakan diberbagai lokasi dengan kekhasan masing-masing. Kreativitas produsen lain dalam bidang pemasaran dan pengemasan memberikan sentuhan penting bagi perluasan pemasarannya. 2. Teknologi pengolahan kopi sangat berkembang sehingga diversifikasi produk kopi memunculkan banyak alternative bagi konsumen untuk menikmati kopi. 3. Munculnya gerai-gerai kopi yang juga menjual berbagai jenis kopi menyaingi keberadaan kopi local.

6.4.2 Analisis SWOT BUAH-BUAHAN

KEKUATAN (STRENGTH)	PELUANG (OPPORTUNITY)
<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="217 416 818 701">1. Iklim tropis dan juga rentang geografis Bali dari dataran rendah sampai dataran tinggi menjadikan ragam produk buah-buahan yang bisa dihasilkan sangat tinggi dan sepanjang tahun tersedia komoditi yang bisa dihasilkan secara silih berganti.<li data-bbox="217 741 818 875">2. Petani mempunyai mitra dengan pengepul-pengepul yang secara rutin membeli produk.<li data-bbox="217 916 818 1050">3. Komoditi lebih banyak dikonsumsi secara fresh sehingga termasuk komoditi dengan biaya penanganan rendah.	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="874 416 1461 602">1. Kesadaran masyarakat terhadap manfaat konsumsi buah-buahan untuk kesehatan memunculkan pasar yang terus berkembang.<li data-bbox="874 642 1461 875">2. Banyak program pariwisata yang menawarkan paket tropical fruit sehingga memberikan edukasi kepada konsumen untuk mengenal komoditi buah-buahan local.<li data-bbox="874 916 1461 1149">3. Masyarakat masih sangat terbuka dengan produk olahan komoditi buah yang diusahakan oleh IKM, sehingga produk olahan IKM mempunyai segmen pasar tertentu dan khas.<li data-bbox="874 1189 1461 1274">4. Kunjungan wisatawan mancanegara konsisten besar setiap tahun.

KELEMAHAN (WEAKNESS)	TANTANGAN (THREAT)
<ol style="list-style-type: none">1. Teknologi budidaya masih lebih banyak dikuasai oleh para pengepul besar2. Kemitraan antara produsen dan industry belum terjalin dengan baik sehingga rentan terjadi overproduksi yang tidak tersalurkan.3. Teknologi belum banyak diadopsi untuk proses handling produk segar maupun proses pangan.4. Banyak tanaman yang tidak dipelihara dengan baik dan rawan ditebang.	<ol style="list-style-type: none">1. Tingginya konsumsi buah oleh masyarakat belum diimbangi dengan ketersediaan produk yang bermutu dengan harga bersaing menjadikan Komoditi buah-buahan impor masih mengancam keberadaan produk local2. Perdagangan bebas asia akan mengancam produk yang tidak mampu bersaing dari segi harga dan konsistensi mutu.3. Pasar sudah sangat penuh dengan produk olahan komoditi buah-buahan lengkap dengan jalur distribusinya yang sudah mapan.4. Edukasi terhadap konsumen nonlocal jarang dilakukan secara massive sehingga komoditi masih rendah diserap oleh tamu nonlocal

6.4.2 Analisis SWOT MENTE

KEKUATAN (STRENGTH)	PELUANG (OPPORTUNITY)
<ol style="list-style-type: none">1. Bali mempunyai beberapa bagian daerah dengan karakteristik yang sesuai dengan tanaman mente sehingga luas produksi besar.2. Rasa mente bali yang khas memberikan nilai lebih di pasar.3. Mente juga mempunyai kemampuan untuk diolah yang baik sehingga selain sebagai bahan utama juga diperlukan sebagai bahan tambahan produk olahan lain.4. Beberapa wilayah sudah mempunyai sertifikat organic sehingga menambah daya saing mente bali.5. Kebijakan pemerintah terhadap perkembangan produksi mente bali besar.	<ol style="list-style-type: none">1. Banyak situs-situs yang menghubungkan produsen mente dan pembeli yang tersedia secara gratis untuk memasarkan produk petani.2. Tren pasar semakin bagus karena pengetahuan konsumen yang bertambah tentang mente maupun masih masuknya mente sebagai jenis produk dengan tingkat kemewahan tertentu.3. Ditetapkannya UUD perdagangan memperkuat perlindungan komoditi nasional.4. Potensi pasar mente dunia meningkat terutama ke benua eropa.

KELEMAHAN (WEAKNESS)	TANTANGAN (THREAT)
<ol style="list-style-type: none">1. Pusat-pusat produksi mente masih banyak yang belum terhubung dengan infrastruktur transportasi dan komunikasi yang baik.2. Biaya proses secara manual sangat besar.3. Mutu masih tidak konsisten4. Belum banyak IKM yang menyerap mete dengan mutu dibawah standar sehingga kerugian harus ditanggung oleh pengolah.5. Banyak petani yang tidak melakukan pengolahan mente gelondong sehingga nilai tambah tidak banyak diperoleh.6. Kegagalan panen masih mengancam.	<ol style="list-style-type: none">1. Tata niaga mente belum diatur dan menggunakan mekanisme pasar.2. Pembelian mente oleh pengepul dari luar negeri sudah dilakukan di tingkat petani sehingga memunculkan ekspor semu (dijual ke luar negeri namun dibeli dengan harga local)3. Produksi saingan banyak terdapat di luar provinsi Bali yang mampu mensuplay produksi tinggi.

ANALISIS KESENJANGAN KOPI

P A S A R	Baru	<p>Pengolah kopi ditingkat kelompok tani mampu merespon permintaan konsumen yang berbeda, melalui proses pengolahan kopi yang baik serta tepat mutu.</p> <p>Mampu melakukan diversifikasi produk untuk menjangkau pasar yang lebih luas.</p> <p>Produk memiliki daya saing yang kuat (keunggulan komparatif) dalam memasuki pasar bebas MEA.</p> <p>Tetap terjalinnya hubungan yang saling menguntungkan antara petani, kelompok tani dan mitra usaha dan stakeholder.</p>	<p>Petani mempunyai ketrampilan yang handal dalam pengolahan serta tersedianya produk yang lebih beragam dan diterima pasar.</p> <p>Petani mempunyai kemampuan dalam memasarkan baik melalui jalur pasar tradisional maupun non-tradisional (online) dengan memanfaatkan Teknologi informasi dan Komunikasi</p> <p>Pemasaran lebih berkembang sehingga mampu mendorong perbaikan ditingkat petani baik dari sisi kesejahteraan, maupun kemampuan adopsi teknologi.</p>
	Saat ini	<p>Kondisi bahan baku sudah siap tersedia, namun kendala utama ada pada proses pengolahan kopi. Proses pengolahan hanya dilakukan berdasarkan pengetahuan secara tradisi, dan perlu dikembangkan.</p> <p>Pasar sudah terbentuk, saluran melalui Koperasi MPIG, Pasar lelang tingkat provinsi, pasar tradisional, kedai maupun pengecer, dan eksportir.</p> <p>Petani melalui kelompok tani, sudah biasa berhubungan dengan para pengepul kopi dalam provinsi dan luar provinsi bahkan dengan ekportir.</p>	<p>Perluasan areal produksi untuk meningkatkan kontinuitas suplay bahan baku.</p> <p>Produk sudah ditangani dengan prosedur yang tepat sehingga mutu produk terjamin.</p> <p>Semakin banyak pelaku pasar yang mengenal produk kopi yang dihasilkan petani local guna memperluas pemasaran.</p> <p>Terciptanya produk yang lebih inovatif baik produk utama maupun produk turunan yang diterima pasar.</p>
	Saat ini		baru

PRODUK

ANALISIS KESENJANGAN KLUSTER BUAH-BUAHAN

	<p>Baru</p>	<p>Terserapnya produk buah-buahan ke sector pariwisata dan juga konsumsi local yang lebih besar melalui perbaikan mutu.</p> <p>Mampu melakukan diversifikasi produk untuk menjangkau pasar yang lebih luas.</p> <p>Produk memiliki daya saing yang kuat (keunggulan komparatif) dalam memasuki pasar bebas MEA.</p> <p>Tetap terjalinnya hubungan yang saling menguntungkan antara petani, kelompok tani dan mitra usaha dan stakeholder.</p>	<p>Petani mempunyai ketrampilan yang handal dalam pengolahan terutama ragam alternative saat oversuplay, pemanfaatan produk mutur dibawah standar serta tersedianya produk yang lebih beragam dan diterima pasar.</p> <p>Petani mempunyai kemampuan dalam memasarkan baik melalui jalur pasar tradisional maupun non-tradisional (online) dengan memanfaatkan Teknologi informasi dan Komunikasi</p> <p>Pemasaran lebih berkembang sehingga mampu mendorong perbaikan ditingkat petani baik dari sisi kesejahteraan dan kemampuan adopsi teknologi.</p>
--	-------------	---	---

P A S A R	Saat ini	<p>Ketersediaan bahan baku buah-buahan sangat beragam dan tersebar sepanjang tahun, sehingga pasokan tetap ada.</p> <p>Sifat produk musiman dan rentan mengalami kerusakan selama penanganan.</p> <p>Produk masih dipasarkan dalam bentuk fresh dan rentan mengalami persaingan dengan produk impor</p> <p>Minimnya pelaku usaha yang melakukan proses pengolahan produk buah-buahan terkendalanteknologi dan perijinan (minuman beralkohol)</p>	<p>Perluasan areal produksi untuk meningkatkan kontinuitas suplay bahan baku.</p> <p>Produk sudah ditangani dengan prosedur yang tepat sehingga mutu produk terjamin.</p> <p>Semakin banyak pelaku pasar yang mengenal produk buah-buahan yang dihasilkan petani local guna memperluas pemasaran dan menjaga harga lebih stabil saat panen raya.</p> <p>Terciptanya produk yang lebih inovatif baik produk utama maupun produk turunan yang diterima pasar.</p>
		Saat ini	baru
	PRODUK		

ANALISIS KESENJANGAN MENTE

	<p>Baru</p>	<p>Terserapnya produk buah-buahan ke sector pariwisata dan juga konsumsi local yang lebih besar melalui perbaikan mutu.</p> <p>Mampu melakukan diversifikasi produk untuk menjangkau pasar yang lebih luas.</p> <p>Produk memiliki daya saing yang kuat (keunggulan komparatif) dalam memasuki pasar bebas MEA.</p> <p>Tetap terjalinnya hubungan yang saling menguntungkan antara petani, kelompok tani dan mitra usaha dan stakeholder.</p>	<p>Petani mempunyai ketrampilan yang handal dalam pengolahan terutama ragam alternative saat oversupply, pemanfaatan produk mutur dibawah standar serta tersedianya produk yang lebih beragam dan diterima pasar.</p> <p>Petani mempunyai kemampuan dalam memasarkan baik melalui jalur pasar tradisional maupun non-tradisional (online) dengan memanfaatkan Teknologi informasi dan Komunikasi</p> <p>Pemasaran lebih berkembang sehingga mampu mendorong perbaikan ditingkat petani baik dari sisi kesejahteraan dan kemampuan adopsi teknologi.</p>
--	-------------	---	---

P A S A R	Saat ini	<p>Ketersediaan areal produksi besar, namun merupakan tanaman warisan sehingga tidak terjadi perluasan areal tanam baru. Bahkan terjadi penurunan luas areal produksi.</p> <p>Produk utama masih mente gelondongan dengan ragam mutu yang tinggi, sehingga mempengaruhi proses pengolahan lanjut dan harga.</p> <p>Belum termanfaatkannya produk sampingan jambu mente berupa cangkang dan buah semu.</p> <p>Jalinan antar pengusaha dan kelompok tani masih belum terjalin dengan baik sehingga kemitraan petani-pengusaha masih mandeg</p> <p>Permodalan masih menjadi kendala utama dalam kelompok tani</p>	<p>Tersedianya areal tanam yang cukup untuk memenuhi pasar</p> <p>Tersedianya produk mente dengan mutu yang baik ditingkat petani melalui kemandirian melakukan kendali mutu mente</p> <p>Produk sampingan mulai bisa diolah dan dimanfaatkan sehingga semua hasil bisa bermanfaat bagi kesejahteraan.</p> <p>Terciptanya produk yang lebih inovatif baik produk utama maupun produk turunan yang diterima pasar.</p> <p>Produk sudah ditangani dengan prosedur yang tepat sehingga mutu produk terjamin Sehingga Semakin terjalannya kemitraan yang saling menguntungkan sehingga sirkulasi produk semakin baik.</p> <p>Tersedianya modal sesuai dengan kebutuhan petani</p>
		Saat ini	baru
PRODUK			

BAB VII

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN INDUSTRI AGRO PROPINSI

7.1. Perumusan Permasalahan Pembangunan Industri Agro Propinsi

7.1.1. Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Pembangunan Industri Agro Propinsi

Karakteristik provinsi Bali dengan luas wilayah yang sempit, dan terbagi menjadi 8 kabupaten dan 1 kota madya, membuat Bali memiliki arah pengembangan yang khas dibandingkan dengan daerah lain. Luas wilayah yang sempit dikurangi dengan penggunaan lahan untuk non pertanian yang besar membuat Bali tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya terhadap berbagai komoditas pertanian dan perkebunan yang terus meningkat setiap tahunnya. Penguasaan lahan oleh petani yang sempit dan juga minimnya sentra produksi yang terbentuk di Bali menjadikan pembangunan di Bali lebih pada pembangunan berskala menengah dan kecil. Kebutuhan yang besar dalam skala industri menjadikan Bali hampir luput dari pemetaan dalam pembangunan kawasan industri. Namun demikian, Bali mempunyai potensi yang besar dalam pemasaran hasil-hasil industri baik lokal, regional maupun internasional.

Kedatangan wisatawan lokal dan mancanegara yang tinggi sepanjang tahun merupakan potensi pasar yang banyak digarap oleh daerah-daerah lain di sekitar provinsi Bali bahkan oleh perusahaan multinasional, namun tidak demikian oleh perusahaan lokal. Hal ini mengakibatkan arah kebijakan di sektor industri lebih mendorong pengembangan industri skala kecil dan menengah yang pada dasarnya juga membutuhkan prasyarat yang lebih lunak dibandingkan dengan industri skala besar.

Dengan demikian beberapa hal yang muncul dalam pembangunan industri agro provinsi Bali adalah:

1. Bali mempunyai varian komoditi pertanian yang beragam dengan kualitas yang baik. Bali mempunyai dua komoditi perkebunan dengan Indikasi Geografis (IG) yaitu Kopi Bali Kintamani dan Mete

Kubu Bali. Namun perluasan areal tanam akan mengalami kendala apabila dilakukan peningkatan produksi. Areal tanam yang sempit bahkan cenderung menurun dari kedua komoditi unggulan tersebut membuat penanganan di bagian hulu harus juga ditingkatkan.

2. Adopsi teknologi industri di sektor pertanian masih rendah. Berbagai komoditi yang dihasilkan dan juga diunggulkan belum memperoleh sentuhan teknologi yang signifikan. Hal ini tampak dari produk turunan yang dikembangkan dalam skala besar masih sangat minim. Saat ini, Bali masih terhenti pada pengiriman bahan baku segar atau setengah jadi ke luar daerah ataupun ke luar negeri melalui buyers yang datang langsung ke petani.
3. Dalam perdagangan skala besar, banyak petani yang belum mampu memenuhi kuota yang ditetapkan oleh *buyers* sehingga keberlanjutannya sering dikhawatirkan oleh *buyers* yang sudah menjalin kerjasama.
4. Sumber daya manusia yang terlibat dalam proses hilirasasi produk pertanian masih dominan petani dan industri rumah tangga yang dicirikan dengan kualitas sumber dayanya masih perlu ditingkatkan. Beberapa IKM ataupun kelompok tani yang melakukan proses pengolahan produk pertanian masih terbatas pada kemampuan yang diperolehnya melalui proses pembelajaran autodidak ataupun tradisi dan ditambah lagi dengan keterampilan yang diperoleh melalui pelatihan yang masih sangat terbatas.
5. Akses permodalan masih rendah. Dalam skala besar, petani dan pengolah mengalami kendala dalam pengembangan usahanya karena permodalan yang minim. Sistem perbankan sampai saat ini masih belum mendasarkan aturannya berdasarkan keadaan nyata dari petani sehingga banyak pengakses modal yang tidak *bankable*. Hal ini menyulitkan ketika peluang pengembangan ke arah skala yang lebih besar dan juga mempunyai jangka waktu yang relative panjang.
6. Bali hanya 2 kawasan industri yaitu jembrana (625 Ha) dan kawasan Industri Celukan Bawang, Celukan Bawang, Kab.

Buleleng (2387 Ha). Beberapa komoditi unggulan dihasilkan di daerah lain bukan di kawasan industri.

7. Bali mempunyai infrastruktur yang baik dengan dimilikinya pelabuhan antar pulau dan pelabuhan lintas Negara, bandara internasional, jalan yang bagus dan menghubungkan antar kabupaten dengan banyak alternative, namun ketersediannya masih belumimbang di semua kabupaten terutama kabupaten yang sebagian besar penduduknya sebagai petani. Beberapa daerah seperti jembrana, bangli, karangasem dan buleleng masih memperoleh label daerah dengan penduduk miskin yang tinggi dengan sektor utamanya adalah pertanian dan perkebunan. Hal ini menandakan fasilitas penunjang pertanian masih perlu ditingkatkan untuk efektifitas dan efisiensi sistem pertanian di Bali.
8. Komposisi petani di provinsi Bali masih didominasi oleh petani berumur tua (>45 tahun), sehingga akan memberikan dampak lembam untuk peningkatan kapasitas sektor pertanian dimana petani masih dominan dengan pola pertanian yang konvensional. Hal ini dapat menghambat proses hilirisasi sektor pertanian yang diharapkan responsive terhadap perkembangan teknologi dan pasar.
9. Bali mengalami alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian dengan besaran 661 ha/tahun lahan sawah dan 880 lahan hutan rakyat. Fenomena ini dapat mengancam sektor pertanian dimana sektor pertanian merupakan salah satu simpul dalam jejaring perekonomian di provinsi Bali. Pariwisata yang berbasis bentang alam dan budaya, sangat erat kaitannya dengan sektor pertanian.
10. Kelembagaan usaha pertanian yang masih tradisional dan kurang profesional menghambat perkembangan usaha pertanian.

7.1.2. Identifikasi Permasalahan untuk Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Industri Agro

Harus diakui bahwa pembangunan sumber daya manusia lebih diarahkan untuk penunjang sektor dominasi di Bali yaitu sektor jasa dan pariwisata. Lembaga-lembaga pendidikan yang beroperasi di Bali juga lebih banyak menunjang ketersediaan tenaga kerja di sektor jasa dan pariwisata. Meskipun sektor pertanian merupakan mitra yang sangat erat bagi sektor pariwisata, namun pembangunan pertanian masih tertinggal dengan sektor lain. Kontribusi sektor pertanian pada triwulan 2012 hanya sebesar 3.37% jauh tertinggal di bandingkan dengan sektor lain. Dari pertumbuhan perekonomian Bali sebesar 6,65 persen, sumber utama pertumbuhan ekonomi Bali adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 1,84 persen, diikuti oleh sektor jasa-jasa sebesar 1,11 persen. Karena itu tidak heran apabila geliat ekonomi dan penunjangnya berkisar di beberapa sektor tersebut. Sektor pertanian tetap bergeliat dengan tradisinya tanpa pertumbuhan yang signifikan.

Hubungan antara sektor pertanian dan sektor lain terutama pariwisata masih belum berjalan baik. Sektor pertanian masih belum berorientasi pasar yang dibawa oleh sektor pertanian. Hal ini dapat dilihat dari Misi Provinsi Bali yang dituangkan dalam Perda Prov. Bali no. 1 tahun 2014 tentang RPJMD provinsi Bali yaitu Mewujudkan Bali yang Berbudaya, *Metaksu*, Dinamis, Maju dan Modern bertujuan untuk Meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang tangguh, pengembangan industri kecil dan rumah tangga, serta industri pengolahan hasil (pertanian, kelautan dan perikanan), pembangunan bidang pertanian, kelautan, perikanan, dan pariwisata yang saling mendukung, serta pengembangan prasarana dan sarana public. Dalam misi tersebut ditetapkan sasaran meningkatnya kerjasama kemitraan pembangunan pertanian dengan sektor pariwisata yang menandakan bahwa kerjasama kemitraan dari dua sektor ini masih perlu diperbaiki. Namun ini adalah sebuah kebijakan yang baik guna mendukung pembangunan disektor pertanian.

Bali dalam misi dan sasarannya berfokus pada pengembangan IKM sebagai salah satu jalan dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan yang

tanggung. Tentu saja selain untuk meningkatkan taraf hidup kebijakan umum ini bertujuan pula untuk mengurangi pengangguran seperti yang tercantum dalam RPJMD tentang ketenagakerjaan dimana rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi bali mengambil kebijakan yaitu:

1. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam Bali secara profesional dan berkelanjutan.
2. Menetapkan dan meningkatkan serta mengawasi pelaksanaan upah minimum kabupaten/kota agar dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi jumlah pengangguran.
3. Melakukan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan perluasan lapangan kerja bagi masyarakat.

Selain pengembangan IKM yang disasar sebesar 2500 IKM baru dalam waktu 5 tahun, pembangunan industri agro juga berpotensi menyerap tenaga kerja yang lebih besar.

Kebijakan yang lain tampak jelas keberpihakan pemerintah dalam mewujudkan perekonomian kerakyatan yang lebih baik. Pertanian masih mendominasi sektor ekonomi rakyat meskipun mempunyai kontribusi yang masih kecil ke pendapatan domestic bruto Provinsi Bali sampai saat ini. Oleh karena itu, pembangunan pertanian merupakan pembangunan ekonomi kerakyatan yang menjadi kebijakan umum pemerintah yang akan lebih menyentuh lebih banyak masyarakat. Pemerintah telah melakukan upaya-upaya lain yang menunjang pertanian terutama dalam akses modal, kelembagaan keuangan kerakyatan, kebijakan dalam bidang industri pertanian dan ketahanan pangan yang sangat saling terkait seperti pada uraian berikut:

Kebijakan umum tentang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang tangguh sehingga mampu mengembangkan ekonomi kerakyatan yang mantap dan stabil,

serta terwujudnya distribusi, komposisi yang berimbang, dan terwujudnya iklim berinvestasi yang sehat.

2. Mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi dengan meminimalisir resiko kredit modal kerja dan kredit investasi.
3. Memantapkan pengembangan koperasi dan lembaga ekonomi kerakyatan lainnya, agar mampu mandiri dan memiliki kemampuan bersaing lebih tinggi.
4. Mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi dengan meminimalisir resiko kredit modal kerja dan kredit investasi.
5. Peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM.
6. Peningkatan Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) bagi UMKM.

Kebijakan umum tentang Perdagangan

1. Peningkatan dukungan terhadap pengusaha lokal dan kemitraan pemasaran hasil industri kecil dan menengah.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas ekspor.
3. Peningkatan dan pemerataan iklim investasi.

Kebijakan umum tentang Industri

1. Mengembangkan industri kecil dan industri rumah tangga berdaya saing tinggi, melalui berbagai usaha perbaikan mutu, desain dan akses pasar dengan memanfaatkan kemajuan teknologi olahan terkini yang sesuai.
2. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang tangguh sehingga mampu mengembangkan ekonomi kerakyatan yang mantap dan stabil, serta terwujudnya distribusi, komposisi yang berimbang, dan terwujudnya iklim berinvestasi yang sehat.
3. Mengembangkan sentra-sentra ekonomi kreatif.
4. Meningkatkan jumlah produk/design untuk mendapatkan HAKI.

Kebijakan umum tentang Penanaman Modal

1. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menyederhanakan peraturan investasi, sehingga dapat menarik investor.
2. Mendorong investasi PMA dan PMDN yang berbudaya lokal.
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang lebih merata antar wilayah.

4. Peningkatan Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida).

Kebijakan umum tentang Pertanian

1. Peningkatan peran sektor pertanian dalam perekonomian Bali terutama dalam memperkuat ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan sdm Bali, penguatan kelembagaan, memperbaiki akses petani terhadap permodalan, teknologi, pemasaran dan fasilitas penunjang lainnya.
2. Melakukan peningkatan Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri).
3. Mengembangkan pertanian dalam arti luas, yang tangguh menuju kemandirian, sejahtera dan keadilan.
4. Menetapkan kebijakan untuk memberikan insentif bagi petani dalam usaha meningkatkan produksi hasil pertanian, seperti: keringan pajak, subsidi pupuk, subsidi pakan ternak, subsidi benih dan bibit ternak, kemudahan kredit, terlebih lagi yang ada dalam jalur hijau atau kawasan wisata.
5. Meningkatkan kerjasama penelitian dan pengembangan budidaya pertanian, disertai dengan pelatihan pemanfaatan kemajuan teknologi, termasuk pengembangan penanganan pasca panen, guna memberi nilai tambah terhadap hasil produksi pertanian.
6. Pengembangan komoditas andalan/unggulan pertanian.
7. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang tangguh.
8. Peningkatan produktivitas dan produksi pertanian dalam arti luas.
9. Mensinergikan pembangunan pertanian dengan sektor pariwisata melalui program kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan.

Kebijakan umum tentang Ketahanan Pangan

Meningkatkan peran sektor pertanian dalam perekonomian Bali terutama dalam perkokohan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan SDM Bali, penguatan kelembagaan, memperbaiki akses petani terhadap permodalan teknologi, pemasaran dan fasilitas penunjang lainnya.

Kebijakan umum tentang Pertanian

Mewujudkan tata kelola pertanahan daerah yang tertib dan akuntabel.

Kebijakan umum tentang Pekerjaan Umum

1. Mengembangkan infrastruktur dan prasarana/sarana publik yang memadai, terutama pada wilayah Bali Utara, Barat dan Timur guna memperluas dan mendistribusikan pusat pertumbuhan ekonomi (sentra-sentra ekonomi) agar terjadi keseimbangan antara daerah Bali bagian Selatan, Tengah, Timur dan Utara.
2. Mengembangkan prasarana dan sarana pengelolaan sumber daya air dalam memenuhi hajat hidup masyarakat.
3. Mengembangkan prasarana dan sarana penyediaan air minum dan sanitasi dalam meningkatkan akses terhadap penyediaan air bersih dan pelayanan sanitasi bagi masyarakat.
4. Mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.
5. Meningkatkan/mengembangkan kualitas penyedia jasa konstruksi.

Kebijakan umum tentang Perhubungan

1. Pengembangan dan preservasi jaringan jalan dan jembatan dalam mendukung aktivitas pengguna jalan.
2. Peningkatan perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan serta peningkatan kendaraan yang berkeselamatan dalam rangka menekan tingkat kecelakaan lalu lintas.
3. Revitalisasi angkutan umum, penyediaan angkutan umum yang berkualitas khususnya di daerah perkotaan dalam mengurangi kemacetan.
4. Optimalisasi Manajemen rekayasa lalu lintas dan penyediaan serta pemeliharaan fasilitas keselamatan di jalan raya dalam mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan pergerakan lalu lintas untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
5. Pembangunan/pengembangan/peningkatan prasarana dan fasilitas perhubungan dalam mendukung keseimbangan dan konektivitas wilayah.
6. Penataan jaringan transportasi darat, laut dan udara antar kabupaten/kota.

Kebijakan umum yang telah ditetapkan dituangkan ke dalam program kerja ke setiap kebijakan. Dalam program-program terakit dengan kebijakan umum di atas secara khusus belum tertuang kebijakan yang khusus tentang program pembangunan industri berbasis agro unggulan daerah dalam skala kecil ataupun menengah. Meskipun demikian kebijakan-kebijakan yang telah diambil memberi peluang besar bagi kebijakan pembangunan industri agro unggulan provinsi seperti dapat dilihat pada program-program yang ditetapkan terakit dengan kebijakan umum di atas.

Program terakit kebijakan umum tentang Ketenagakerjaan

1. Program Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian
2. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas
3. Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
4. Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan
5. Program Pembangunan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Program terkait kebijakan umum tentang Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

1. Program Penciptaan Iklim Usaha-usaha Mikro Kecil Menengah yang Kondusif
2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil Menengah
3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
5. Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi
6. Program Pengembangan Aksesibilitas Kepariwisata, Industri Perdagangan, Perhubungan dan Telekomunikasi serta MP3EI
7. Program Gerakan Interpreneurship (Kewirausahaan) dan Daya Saing Pengusaha Kecil, Menengah dan Koperasi

8. Program Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida)

Program terakit kebijakan umum tentang Penanaman Modal

1. Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi
2. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
3. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
4. Program Pengkajian dan Perencanaan Penanaman Modal
5. Program Mengendalikan Pelaksanaan Penanaman Modal
6. Program Mengkoordinasikan dan Mendorong Peran Swasta dalam Pembangunan

Program terakit kebijakan umum tentang Pertanian dan Perkebunan

1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2. Program Peningkatan Sistem Pertanian Terintegrasi (SIMANTRI)
3. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
4. Program Pengembangan Agribisnis
5. Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan

Program terakit kebijakan umum tentang Perindustrian

1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Program terakit kebijakan umum tentang Perdagangan

1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
3. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
4. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional

Dengan demikian, masih perlu dirumuskan kebijakan khusus untuk mendukung pembangunan industri agro unggulan provinsi yang menysasar pembangunan industri skala besar yang dapat mempercepat peningkatan kontribusi sektor pertanian khususnya agribisnis pertanian terhadap peningkatan ekonomi bali umumnya dan ekonomis di sektor pertanian khususnya.

7.2. Isu-Isu Strategis

- a) Kualitas sumber daya manusia di sektor pertanian masih rendah dalam pengelolaan agribisnis.

Produksi sektor pertanian saat ini dihasilkan oleh petani yang telah turun temurun membudidayakan tanamannya. Pengembangan sektor pertanian masih berjalan lambat terutama pengembangan ke sektor hilirnya. Dari jumlah kelompok tani yang mengelola sektor pertanian, sangat jarang yang muncul menjadi kelompok yang mengembangkan diri sampai pada proses hilirnya. Kemandegan ini memunculkan regenerasi mengalami hambatan pula. Banyak kaum muda yang enggan terjun ke sektor ini dikarenakan pengalaman nyata mereka yang melihat perkembangan sektor ini stagnan. Peralihan profesi justru muncul dari generasi penerus petani, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa generasi petani di dominasi oleh petani yang telah berumur (>45 tahun). Kemandegan ini juga dipicu oleh kurangnya kemampuan kelompok tani untuk mengelola kelembagaan petani untuk melakukan rencana kerja ataupun pengambilan langkah guna menghadapi situasi yang dihadapi. Jarang sekali diperoleh kelompok tani yang menunjukkan kemampuannya dalam mengelola kegiatan kelompok secara teratur.

- b) Ketersediaan teknologi yang terbatas untuk pembangunan sektor pertanian lebih lanjut.

Pengembangan sektor pertanian sampai ke hilir tidak dapat dipungkiri membutuhkan akses permodalan dan teknologi yang besar. Juga dibutuhkan kemampuan manajerial yang baik untuk mengelola agribisnis. Bali belum termasuk dalam wilayah pembangunan industri khususnya industri agro berskala besar. Hal ini menjadikan arah alih teknologi industri agro tidak mengarah ke sektor pertanian di daerah Bali. Target sektor pertanian lebih pada peningkatan produktivitas hasil pertanian, yang masih menyisakan permasalahan yaitu pemasaran. Tidak adanya alternatif jalur pemasaran bagi petani, membuat daya saing produk pertanian menjadi

kurang dan hal ini dapat menekan margin keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh petani.

- c) Infrastruktur pendukung sektor pertanian khususnya sub sektor perkebunan masih rendah sehingga menghambat operasional agribisnis pertanian yang efisien.

Produk pertanian dihasilkan di daerah-daerah yang jauh dari pemukiman. Aktivitas yang minim di sektor ini membuat pembangunan infrastruktur juga minim. Namun daya saing sektor pertanian salah satunya dibangun dari efisiensi kegiatan. Disamping itu, pembangunan infrastruktur oleh petani secara swadaya juga sangat rendah, keadaan ini semakin terlihat pada perkebunan-perkebunan di daerah perbukitan.

- d) Produk industri dari luar provinsi Bali masuk dengan kualitas bersaing dan melalui jaringan distribusi yang mapan.

Ketersediaan pasokan yang baik, disertai dengan promosi melalui media massa secara massive, juga didukung oleh jaringan distribusi yang mapan, menjadikan ketersediaan produk-produk industri berbasis pangan melimpah baik dari kuantitas maupun kualitas. Produk-produk ini mendesak produksi lokal dalam perebutan pangsa pasar. Retailer-retailer yang telah berdiri menetapkan standar penerimaan yang ketat sehingga mengurangi serapan terhadap produk lokal. Disisi lain, produk lokal yang tidak dikelola dengan manajerial yang baik, mengalami kesulitan dalam memenuhi tuntutan pasar yang terus berkembang semakin kompleks dan ketat. Tanpa saluran pemasaran yang non-profit oriented semata, introduksi produk baru ke pasar dapat menemui kendala yang sangat besar yang beresiko pada kerugian di pihak produsen.

BAB VIII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI AGRO PROVINSI

8.1. Kebijakan Umum

Perekonomian provinsi Bali masih bertumpu pada sektor pariwisata dan sektor jasa meskipun sektor pertanian masih menjadi sektor dominan bagi masyarakat Bali. Namun, pengalaman telah menunjukkan bahwa ketangguhan sektor pertanian dan juga sektor informal yang dimotori oleh Industri Kecil dan Menengah telah teruji. Di sisi lain, sektor pariwisata merupakan sektor yang rapuh dengan perubahan situasi lokal, regional maupun internasional. Pembangunan di sektor pertanian merupakan salah satu penguatan pilar ekonomi provinsi Bali. Oleh karena itu, kebijakan umum pembangunan industri agro unggulan provinsi Bali selalu mengarah pada pencapaian visi dan misi provinsi dalam membangun industri agro unggulan provinsi yaitu:

1. Mengembangkan Industri Kecil, Menengah dan Industri Rumah Tangga berdaya saing tinggi yang berbasis kompetensi inti daerah melalui berbagai usaha perbaikan Mutu, Desain dan Akses pasar serta peningkatan sumber daya manusia, dengan memanfaatkan kemampuan teknologi
2. Mengembangkan Industri hijau yang dalam proses produksinya mengutamakan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumberdaya secara berkelanjutan, sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam rangka mendukung program Bali Clean And Green
3. Mengembangkan Sistem Informasi Industri yang terintegrasi meliputi unsur Institusi, Sumber Daya Manusia, Basis Data, Perangkat Keras dan Lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengolahan, Penyajian, Pelayanan dan Pelayan serta penyebar luasan data dan informasi industri.
4. Pembangunan industri agro unggulan provinsi harus lebih menekankan penggunaan bahan baku lokal.
5. Pembangunan industri agro unggulan provinsi harus mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih besar bagi masyarakat Bali.
6. Pembangunan industri agro unggulan provinsi harus menggali potensi daerah guna pemerataan pembangunan.
7. Pembangunan industri agro unggulan provinsi harus menerapkan kegiatan yang ramah lingkungan.
8. Pembangunan industri agro unggulan provinsi sedapat mungkin mempertimbangkan kearifan lokal Bali.

8.2. Arah Kebijakan dan Pelaksanaan Strategi

8.2.1. Arah Kebijakan dan Pelaksanaan Strategi Misi Pertama

Sesuai dengan misi pertama Pembangunan industri agro unggulan provinsi yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai subjek dalam pembangunan industri agro provinsi bali, diarahkan untuk meningkatkan daya saing sektor pertanian secara umum melalui pengembangan di bagian hulu dan hilir. Peningkatan daya saing sektor pertanian lebih mengandung arti penguatan peran sektor pertanian bagi ekonomi masyarakat.

Beberapa strategi yang ditempuh untuk pencapaian misi pertama adalah:

1. Peningkatan daya serap bahan baku produksi petani
2. Pendalaman industri untuk menghasilkan produk turunan yang lebih variatif dan bernilai tinggi
3. Pembangunan sumber daya industri yang terlatih untuk menunjang pembangunan industri agro

8.2.2. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi Misi Kedua

Sesuai dengan misi kedua Pembangunan industri agro unggulan provinsi yaitu mengembangkan kebijakan pendukung terbentuknya industri agro unggulan provinsi bali, diarahkan untuk penciptaan kondisi yang kondusif bagi pembangunan industri agro unggulan provinsi.

Strategi pelaksanaan misi kedua ditempuh dengan:

1. Mendorong terbentuknya unit pendampingan bagi pengembangan industri.
2. Formulasi regulasi pendukung pengembangan industri agro.
3. Mendorong terbentuknya sentra industri agro unggulan.
4. Fasilitasi akses permodalan bagi pengembangan IKM pengolah hasil agro.

8.2.3. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi Misi Ketiga

Sesuai dengan misi ketiga Pembangunan industri agro unggulan provinsi yaitu mendorong pengembangan pasar produk industri agro unggulan regional dan internasional, diarahkan untuk menciptakan lapang kerja yang lebih besar baik bagi tenaga kerja yang langsung ataupun tidak langsung bersentuhan dengan sektor pertanian khususnya dengan industri agro serta peningkatan percepatan adopsi teknologi untuk peningkatan efisiensi sektor pertanian.

Strategi pelaksanaan misi ketiga ditempuh melalui:

1. Pengaitan kemitraan pemasaran di tingkat lokal dan regional dan juga kemungkinan mitra di tingkat internasional untuk perluasan jangkauan pemasaran produk industri agro
2. Peningkatan adopsi teknologi oleh petani di hulu dan IKM pengolah hasil agro.

3. Penguasaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemasaran.

8.3. Program Pembangunan Industri Prioritas Agro Propinsi

8.3.1. Program Pembangunan Industri Agro Kopi

- I. Peningkatan daya serap bahan baku produksi petani
 1. Peningkatan mutu bahan baku produksi
 2. Efisiensi saluran pasok Kopi
 3. Pengaitan kemitraan yang lebih baik antar industri pengolah Kopi dengan kelompok tani ataupun pengepul
 4. Akses informasi yang lebih baik
- II. Pendalaman industri buah-buahan untuk menghasilkan produk turunan yang lebih variatif dan bernilai tinggi
 1. Pengembangan produk (Product development) Kopi yang bermutu dan bernilai tinggi
 2. Desain kemasan produk olahan Kopi dalam kaitan volume, tampilan dan material
 3. Survey penerimaan produk baru bagi peningkatan dan pengembangan produk secara berkesinambungan
- III. Tersedianya sumber daya industri yang terlatih untuk menunjang pembangunan industri agro
 1. Kerjasama pelatihan dengan lembaga-lembaga pelatihan dalam upaya peningkatan kemampuan produksi dan manajerial usahan pengolahan Kopi.
 2. Peningkatan penguasaan teknologi proses.
- IV. Tersedianya unit pendampingan bagi pengembangan industri
 1. Pembentukan unit pendamping pendukung industri agro Kopi
- V. Tersedianya regulasi pendukung pengembangan industri agro
 1. Perencanaan infrastruktur penunjang industri agro
 2. Formulasi regulasi pendukung terbentuknya industri agro
 3. Formulasi regulasi penggunaan produk lokal
 4. Formulasi regulasi kemudahan akses modal
 5. Promosi peningkatan introduksi produk hasil industri agro Kopi ke masyarakat.
- VI. Terbentuknya sentra industri agro unggulan
 1. Penguatan IKM pengolah hasil agro potensial
 2. Inisiasi IKM pengolah hasil agro baru di lokasi yang sama dengan IKM pengolah hasil agro yang telah terkuatkan.
- VII. Fasilitasi akses permodalan bagi pengembangan ikm pengolah hasil agro
 1. Formulasi regulasi kemudahan akses modal

2. Fasilitasi akses modal
- VIII. Terjalinnnya kemitraan pemasaran di tingkat lokal dan regional dan juga kemungkinan mitra di tingkat internasional untuk perluasan jangkauan pemasaran produk industri agro
 1. Pengaitan kemitraan antara retailer modern dengan produsen produk agro olahan
 2. Pembentukan sentra-sentra akses produk industri agro
 3. Inisiasi *mobile retailer* produk industri agro
 - IX. Meningkatnya adopsi teknologi oleh petani di hulu dan ikm pengolah hasil agro
 1. Pelatihan dan magang pengelola IKM
 - X. Penguasaan teknologi informasi dan telekomunikasi guna akses pasar yang lebih luas
 1. Pelatihan dan magang pengelola IKM
- 8.3.2. Program Pembangunan Industri Agro Buah-buahan
Guna mencapai tujuan dari Program pembangunan industri agro buah-buahan maka dilakukan program sebagai berikut:
- XI. Peningkatan daya serap bahan baku produksi petani
 1. Peningkatan mutu bahan baku produksi
 2. Efisiensi saluran pasok buah-buahan
 3. Pengaitan kemitraan yang lebih baik antar industri pengolah buah-buahan dengan kelompok tani ataupun pengepul
 4. Akses informasi yang lebih baik
 - XII. Pendalaman industri buah-buahan untuk menghasilkan produk turunan yang lebih variatif dan bernilai tinggi
 1. Pengembangan produk (Product development) buah-buahan yang bermutu dan bernilai tinggi
 2. Desain kemasan produk olahan buah-buahan dalam kaitan volume, tampilan dan material
 3. Survey penerimaan produk baru bagi peningkatan dan pengembangan produk secara berkesinambungan
 - XIII. Tersedianya sumber daya industri yang terlatih untuk menunjang pembangunan industri agro
 1. Kerjasama pelatihan dengan lembaga-lembaga pelatihan dalam upaya peningkatan kemampuan produksi dan manajerial usahan pengolahan buah-buahan.
 2. Peningkatan penguasaan teknologi proses.
 - XIV. Tersedianya unit pendampingan bagi pengembangan industri

1. Pembentukan unit pendamping pendukung industri agro buah-buahan
- XV. Tersedianya regulasi pendukung pengembangan industri agro
1. Perencanaan infrastruktur penunjang industri agro
 2. Formulasi regulasi pendukung terbentuknya industri agro
 3. Formulasi regulasi penggunaan produk lokal
 4. Formulasi regulasi kemudahan akses modal
 5. Promosi peningkatan introduksi produk hasil industri agro buah-buahan ke masyarakat.
- XVI. Terbentuknya sentra industri agro unggulan
1. Penguatan IKM pengolah hasil agro potensial
 2. Inisiasi IKM pengolah hasil agro baru di lokasi yang sama dengan IKM pengolah hasil agro yang telah terkuatkan.
- XVII. Fasilitasi akses permodalan bagi pengembangan ikm pengolah hasil agro
1. Formulasi regulasi kemudahan akses modal
 2. Fasilitasi akses modal
- XVIII. Terjalinnnya kemitraan pemasaran di tingkat lokal dan regional dan juga kemungkinan mitra di tingkat internasional untuk perluasan jangkauan pemasaran produk industri agro
1. Pengaitan kemitraan antara retailer modern dengan produsen produk agro olahan
 2. Pembentukan sentra-sentra akses produk industri agro
 3. Inisiasi *mobile retailer* produk industri agro
- XIX. Meningkatnya adopsi teknologi oleh petani di hulu dan ikm pengolah hasil agro
1. Pelatihan dan magang pengelola IKM
- XX. Penguasaan teknologi informasi dan telekomunikasi guna akses pasar yang lebih luas
1. Pelatihan dan magang pengelola IKM

8.3.3. Program Pembangunan Industri Agro Jambu Mete

Guna mencapai tujuan dari Program pembangunan industri agro Jambu Mete maka dilakukan program sebagai berikut:

- I. Peningkatan daya serap bahan baku produksi petani
 1. Peningkatan mutu bahan baku produksi Mete
 2. Efisiensi saluran pasok Mete

3. Pengaitan kemitraan antara IKM pengolah mete dan kelompok tani produsen mete
 4. Akses informasi yang lebih baik
- II. Pendalaman industri untuk menghasilkan produk turunan yang lebih variatif dan bernilai tinggi
1. Pengembangan produk (*Product development*) mete yang bermutu dan bernilai tinggi
 2. Desain kemasan produk olahan mete dalam kaitan volume, tampilan dan material
 3. Survey penerimaan produk baru olahan mete bagi peningkatan dan pengembangan produk secara berkesinambungan
- III. Tersedianya sumber daya industri yang terlatih untuk menunjang pembangunan industri agro
1. Kerjasama pelatihan dengan lembag-lembaga pelatihan dalam upaya peningkatan kemampuan produksi dan manajerial industri pengolah Mete.
 2. Peningkatan penguasaan teknologi proses
- IV. Tersedianya unit pendampingan bagi pengembangan industri
1. Pembentukan unit pendamping pendukung industri agro mete
- V. Tersedianya regulasi pendukung pengembangan industri agro
1. Perencanaan infrastruktur penunjang industri agro
 2. Formulasi regulasi pendukung terbentuknya industri agro
 3. Formulasi regulasi penggunaan produk lokal
 4. Formulasi regulasi kemudahan akses modal
 5. Promosi peningkatan introduksi produk hasil industri agro
- VI. Terbentuknya sentra industri agro unggulan
1. Penguatan IKM pengolah hasil agro potensial
 2. Inisiasi IKM pengolah hasil agro baru di lokasi yang sama dengan IKM pengolah hasil agro yang telah terkuatkan.
- VII. Fasilitasi akses permodalan bagi pengembangan ikm pengolah hasil agro
1. Formulasi regulasi kemudahan akses modal
 2. Fasilitasi akses modal
- VIII. Terjalinnnya kemitraan pemasaran di tingkat lokal dan regional dan juga kemungkinan mitra di tingkat internasional untuk perluasan jangkauan pemasaran produk industri agro
1. Pengaitan kemitraan antara retailer modern dengan produsen produk agro olahan
 2. Pembentukan sentra-sentra akses produk industri agro

3. Inisiasi *mobile retailer* produk industri agro

- IX. Meningkatnya adopsi teknologi oleh petani di hulu dan ikm pengolah hasil agro
1. Pelatihan dan magang pengelola IKM
- X. Penguasaan teknologi informasi dan telekomunikasi guna akses pasar yang lebih luas
1. Pelatihan dan magang pengelola IKM

8.4. Lokus Pembangunan Industri Agro Unggulan Propinsi

Lokus pembangunan industri agro prioritas ditentukan dengan analisis potensi setiap kabupaten dengan menggunakan kriteria, sub kriteria dan bobot yang disajikan Tabel 8.1.

Tabel 8.1 Kriteria, Sub Kriteria dan Bobot Penentuan Lokus Industri Agro Unggulan

MAIN KRITERIA	SUB KRITERIA	Skor	Nilai	bobot
1. PASAR (30)				
	1. Teridentifikasi sebagai pasar yang jelas dan besar	5		30
	2. Teridentifikasi sebagai pasar biasa	3		
	3. Teridentifikasi sebagai pasar yang kecil	1		
2. BAHAN BAKU (30)				30
a. Tingkat Keutamaan Komoditi bagi daerah	1. Merupakan komoditi utama	5		10
	2. Bukan merupakan komoditi utama namun diusahakan oleh masyarakat	3		
	1. Tidak diusahakan sama sekali oleh masyarakat	1		
b. Nilai strategis daerah dari sumber bahan baku	1. Lokasi terletak sangat dekat dengan minimal 3. sumber bahan baku	5		10
	2. Lokasi terletak jauh dengan sebagian besar sumber bahan baku	3		
	3. Lokasi terletak jauh dari seluruh sumber bahan baku.	2		
c. Rendemen Bahan Baku	1. >80% bagian bisa dimanfaatkan sebagai produk akhir, selebihnya limbah	5		10
	2. 50%<bagian bisa dimanfaatkan sebagai produk akhir<80%	3		
	3. Bagian bisa dimanfaatkan sebagai produk akhir<50%	1		
TEKNOLOGI (30)				
a. Penguasaan daerah thp teknologi on	1. Petani sudah sangat biasa membudidayakan komoditi tersebut bahkan sudah didukung oleh teknologi terbaru	5		15

MAIN KRITERIA	SUB KRITERIA	Skor	Nilai	bobot
farm	2. Petani mampu membudidayakan komoditi tersebut namun dengan teknologi sederhana	3		
	3. Petani tidak mengenal sama sekali komoditi tersebut dalam budidayanya	1		
b. penguasaan daerah terhadap teknologi pengolahan	1. Mempunyai banyak IKM yang mengolah komoditi tersebut	5		15
	2. Terdapat sedikit IKM pengolah komoditi tersebut	3		
	3. Tidak terdapat sama sekali ikmpengolah komoditi tersebut	1		
4. KEBIJAKAN (10)	1. Pemda mempunyai dukungan kebijakan yang jelas terhadap pembangunan industri	5		10
	2. Pemda mempunyai dukungan yang jelas namun masih belum menjadi prioritas utama	3		
	3. Pemda tidak mempunyai dukungan yang jelas	1		

- 8.4.1. Lokus Program Pembangunan Industri Agro Kopi
Lokus pembangunan industri Agro Kopi ada pada 3 kabupaten yang potensial yaitu:
1. Buleleng
 2. Tabanan
 3. Bangli
- 8.4.2. Program Pembangunan Industri Agro Buah-buahan
Lokus pembangunan industri Agro Kopi ada pada 3 kabupaten yang potensial yaitu:
1. Buleleng
 2. Badung
 3. Tabanan
- 8.4.3. Program Pembangunan Industri Agro Jambu Mete
Lokus pembangunan industri Agro Mete ada pada 3 kabupaten yang potensial yaitu:
1. Karangasem
 2. Buleleng
 3. Denpasar

BAB IX INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN PAGU

9.1. Prioritas Pembangunan Industri Agro

Pembangunan industri agro provinsi bali merupakan kebijakan yang diturunkan dari RIPIN 2015-2035 dimana pada tahap pertama dari RIPIN adalah meningkatkan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral dan migas, yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan SDM yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi.

Dengan demikian terdapat 2 program prioritas yang secara nasional dilaksanakan untuk menuju visi perindustrian nasional yaitu peningkatan nilai tambah di bagian hulu dan pengembangan sumber daya manusia untuk pembangunan industri dibagian hilir. Oleh karena itu, prioritas pembangunan industri agro di provinsi bali terkait pula dengan tahapan pertama dari RIPIN.

Prioritas pembangunan industri agri 2015-2020 diarahkan untuk pengembangan di bagian hilir sektor pertanian dengan mengambil 3 komoditi unggulan yaitu Kopi, Buah-buahan dan Jambu Mente. Tahapan pada periode ini diarahkan pada dua hal utama yaitu:

1. Peningkatan kapasitas IKM pengolah 3 komoditi agro unggulan provinsi
2. Peningkatan kualitas sumber daya industri.

Kedua arah pembangunan periode ini merupakan dasar dari pembangunan tahap selanjutnya yaitu mewujudkan industri berskala menengah dan besar di provinsi bali. Prioritas pembangunan industri agro provinsi bali periode 2015-2020 mencakup 9 program utama yaitu:

- I. Peningkatan daya serap bahan baku produksi petani
- II. Pendalaman industri untuk menghasilkan produk turunan yang lebih variatif dan bernilai tinggi

- III. Pengembangan sumber daya industri yang terlatih untuk menunjang pembangunan industri agro
- IV. Pengembangan unit pendampingan bagi pengembangan industri
- V. Formulasi regulasi pendukung pengembangan industri agro
- VI. Pembentukan sentra industri agro unggulan
- VII. Fasilitasi akses permodalan bagi pengembangan ikm pengolah hasil agro
- VIII. Pengaitan kemitraan pemasaran di tingkat lokal dan regional dan juga kemungkinan mitra di tingkat internasional untuk perluasan jangkauan pemasaran produk industri agro
- IX. Peningkatan adopsi teknologi oleh petani di hulu dan ikm pengolah hasil agro
- X. Peningkatan Penguasaan teknologi informasi dan telekomunikasi guna akses pasar yang lebih luas

Kesembilan program prioritas tersebut diatas merupakan program guna mencapai tujuan pembangunan industri agro Provinsi Bali yaitu:

1. Meningkatkan daya saing sektor pertanian melalui pengembangan di bagian hulu dan hilir
2. Meningkatkan kontribusi sektor pertanian dalam ekonomi daerah
3. Menciptakan lapangan kerja yang lebih besar baik bagi tenaga kerja yang langsung ataupun tidak langsung bersentuhan dengan sektor pertanian khususnya dengan industri agro
4. Meningkatkan percepatan adopsi teknologi bagi peningkatan efisiensi sektor pertanian

9.2. Indikasi Rencana Program Pembangunan Industri Agro Prioritas dan Pagu

Program pembangunan industri Agro Kopi Provinsi Bali dan indikator yang direncanakan adalah

Analisis GAP	Strategi	Sasaran	Rencana Aksi	Indikator	Pemangku Kepentingan	PAGU
				Kinerja		(juta rupiah)
Masih rendahnya sumber daya manusia sehingga daya saing sektor pertanian juga rendah.	Meningkatkan daya saing sektor pertanian melalui pengembangan di bagian hulu dan hilir	Peningkatan daya serap bahan baku produksi petani	Peningkatan mutu bahan baku produksi	Selisih antara produksi dan serapan pasar	Desperindang, Poktan, Perguruan Tinggi, Dinas perkebunan, PU, BPTP, Lembaga pelatihan,	Rp 150
			Efisiensi saluran pasok	Penurunan biaya		Rp 150
			Pengaitan kemitraan yang lebih baik	Jumlah mitra yang terjalin		Rp 50
			Akses informasi yang lebih baik	% kepemilikan pusat informasi pada IKM binaan		Rp 100
		Pendalaman industri untuk menghasilkan produk turunan yang lebih variatif dan bernilai tinggi	Pengembangan produk (Product development) yang bermutu dan bernilai tinggi	Tersedianya produk turunan industri agro	PT, Desperindag, Balai Besar.	Rp 350
			Perbaiki kemasan dalam kaitan volume, tampilan dan material	Kemasan menarik	Desperindag, Pengusaha, kelompok tani,	Rp 100
			Survey penerimaan produk baru bagi peningkatan dan pengembangan produk secara berkesinambungan	Input proses perbaikan	Desperindag, PT, BPTP	Rp 100

Analisis GAP	Strategi	Sasaran	Rencana Aksi	Indikator	Pemangku Kepentingan	PAGU
				Kinerja		(juta rupiah)
		Tersedianya sumber daya industri yang terlatih untuk menunjang pembangunan industri agro	Kerjasama pelatihan dengan lembaga-lembaga pelatihan dalam upaya peningkatan kemampuan produksi dan manajerial	Tenaga kerja dengan keterampilan khusus terkait industri agro	Desperindag, Lambaga Pelatihan, BPTP, PT	Rp 250
			Peningkatan penguasaan teknologi proses	Tenaga kerja dengan keterampilan khusus terkait industri agro		
Pembangunan sektor pertanian lebih dominan dibagian hilir	Meningkatkan kontribusi sektor pertanian dalam ekonomi daerah	Tersedianya unit pendampingan bagi pengembangan industri	Pembentukan unit pendamping pendukung industri agro	Unit pendamping	PT, Desperindag, Balai Besar. Pengusaha, Petani, eksportir, Pasar Modern	Rp 100
			Tersedianya regulasi pendukung pengembangan industri agro	Perencanaan infrastruktur penunjang industri agro		
		Tersedianya regulasi pendukung pengembangan industri agro	Formulasi regulasi pendukung terbentuknya industri sgro	Regulasi	Desperindag, DPRD, Gubernur,	-
			Formulasi regulasi penggunaan produk lokal	Regulasi	Desperindag, DPRD, Gubernur,	-
			Formulasi regulasi kemudahan akses modal	Regulasi	Desperindag, DPRD, Gubernur,	-
			Promosi peningkatan introduksi produk hasil industri agro	Kegiatan	Desperindag, DPRD, Gubernur,	Rp 100

Analisis GAP	Strategi	Sasaran	Rencana Aksi	Indikator	Pemangku Kepentingan	PAGU
				Kinerja		(juta rupiah)
		Terbentuknya sentra industri agro unggulan	Penguatan IKM pengolah hasil agro potensial	Unit industri	Pemda, Pengusaha, Desperindag,	Rp 300
			Inisiasi IKM pengolah hasil agro baru di lokasi yang sama dengan IKM pengolah hasil agro yang telah terkuatkan.	Unit industri	Pemda, Pengusaha, Desperindag,	Rp 350
		Adanya fasilitasi akses permodalan bagi pengembangan IKM pengolah hasil Agro	Formulasi regulasi kemudahan akses modal	Unit mitra permodalan	Pemda, Pengusaha, Desperindag,	Rp 50
Pasar komoditi sektor pertanian belum memunculkan peluang kerja yang besar dan menjanjikan bagi petani dan juga masyarakat lain yang terkait dengan pertanian	Menciptakan lapang kerja yang lebih besar baik bagi tenaga kerja yang langsung ataupun tidak langsung bersentuhan dengan sektor pertanian khususnya dengan industri agro	Terjalinnnya kemitraan pemasaran di tingkat lokal dan regional dan juga kemungkinan mitra di tingkat internasional untuk perluasan jangkauan pemasaran produk industri agro	Pengaitan kemitraan antara retailer modern dengan produsen produk agro olahan	Mitra pemasaran di tingkat lokal	Desperindag, pengusaha Agro, poktan, Pengelola Pasar modern, IKM	Rp 50
			Pembentukan sentra-sentra akses produk industri agro	Mitra pemasaran di tingkat nasional	Pemda, Pengusaha, Desperindag, IKM	Rp 250
			Inisiasi <i>mobile retailer</i> produk industri agro	Jumlah mobile retailer	Pemda, Pengusaha, Desperindag, IKM	Rp 250

Analisis GAP	Strategi	Sasaran	Rencana Aksi	Indikator	Pemangku Kepentingan	PAGU
				Kinerja		(juta rupiah)
	Meningkatkan percepatan adopsi teknologi bagi peningkatan efisiensi sektor pertanian	Meningkatnya adopsi teknologi oleh petani di hulu dan IKM pengolah hasil agro	Pelatihan dan magang	Jumlah IKM pengolah hasil agro binaan	Desperindag, lembaga pelatihan, Perusahaan Agro, Poktan, IKM	Rp 200
		Penguasaan teknologi informasi dan telekomunikasi guna akses pasar yang lebih luas	Pelatihan dan magang	Jumlah IKM pengolah hasil agro binaan	Desperindag, lembaga pelatihan, Perusahaan Agro, Poktan, IKM	Rp 200

BAB X
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN INDUSTRI AGRO PROPINSI

10.1 Penetapan Indikator Kinerja Pembangunan Industri Agro Kopi Propinsi

No	Kegiatan	Indikator kinerja	unit	Pendanaan Per Tahun (d/m jutaan rupiah)									
				2016		2017		2018		2019		2020	
				Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Peningkatan mutu bahan baku produksi	selisih antara produksi dan serapan pasar	%	30	30	25	30	20	30	15	30	10	30
3	Efisiensi saluran pasok	penurunan biaya	%	5		10		15		20		25	
4	Pengaitan kemitraan yang lebih baik	jumlah mitra yang terjalin	mitra	1		2		3		4		5	
5	Akses informasi yang lebih baik	%kepemilikan pusat informasi pada IKM binaan	% unit	60		70		80		90		100	
6	Pengembangan produk (Product development) yang bermutu dan bernilai tinggi	tersedianya produk turunan industri agro	jenis	1		3		4		5		6	
7	Desain kemasan dalam kaitan volume, tampilan dan material	kemasan menarik											
8	Survey penerimaan produk baru bagi peningkatan dan pengembangan produk secara berkesinambungan	input proses perbaikan	paket	1		1		1		1		1	
10	Kerjasama pelatihan dengan lembaga-lembaga pelatihan dalam upaya peningkatan kemampuan produksi dan manajerial	tenaga kerja dengan keterampilan khusus terkait industri agro	orang binaan	100		100		100		100		100	

No	Kegiatan	Indikator kinerja	unit	Pendanaan Per Tahun (dlm jutaan rupiah)									
				2016		2017		2018		2019		2020	
				Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	Peningkatan penguasaan teknologi proses	tenaga kerja dengan keterampilan khusus terkait industri agro	orang binaan	100		100		100		100		100	
12	Pembentukan unit pendamping pendukung industri agro	unit pendamping	unit	1									
13	Perencanaan infrastruktur penunjang industri agro	regulasi											
14	Formulasi regulasi pendukung terbentuknya industri sgro	regulasi											
15	Formulasi regulasi penggunaan produk lokal	regulasi											
16	Formulasi regulasi kemudahan akses modal	regulasi	unit	-		-		1		1			
17	Promosi peningkatan introduksi produk hasil industri agro	kegiatan	unit	1		2		2		2			
18	Penguatan IKM pengolah hasil agro potensial	unit industri	unit	5		5		5		5		5	
19	Inisiasi IKM pengolah hasil agro baru di lokasi yang sama dengan IKM pengolah hasil agro yang telah terkuatkan.	unit industri	unit	5		5		5		5		5	
20	Formulasi regulasi kemudahan akses modal	unit mitra permodalan	unit lembaga	5		5		5		5		5	

No	Kegiatan	Indikator kinerja	unit	Pendanaan Per Tahun (d/m jutaan rupiah)									
				2016		2017		2018		2019		2020	
				Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	Pengaitan kemitraan antara retailer modern dengan produsen produk agro olahan	mitra pemasaran di tingkat lokal	mitra	100		200		300		310		350	
22		mitra pemasaran di tingkat nasional	provinsi	2		4		5		7		8	
23	Pembentukan sentra-sentra akses produk industri agro	Jumlah sentra	Sentra	3		5		8		10		12	
24	Inisiasi <i>mobile retailer</i> produk industri agro	Jumlah mobile retailer	unit	10		30		50		75		100	
25	Pelatihan dan magang	Jumlah IKM pengolah hasil agro binaan	unit binaan	15		15		15		15		15	
26	Pelatihan dan magang	Jumlah IKM pengolah hasil agro binaan	unit binaan	15		15		15		15		15	

10.2 Penetapan Indikator Kinerja Pembangunan Industri Agro Buah-buahan Propinsi

No	Kegiatan	Indikator kinerja	unit	Pendanaan Per Tahun (d/m jutaan rupiah)									
				2016		2017		2018		2019		2020	
				Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	peningkatan mutu bahan baku produksi	selisih antara produksi dan serapan pasar	%	30		25		20		15		10	
2	efisiensi saluran pasok	penurunan biaya	%	5		10		15		20		25	
3	pengaitan kemitraan yang lebih baik	jumlah mitra yang terjalin	mitra	1		2		3		4		5	
4	akses informasi yang lebih baik	%kepemilikan pusat informasi pada IKM binaan	50	60		70		80		90		100	

No	Kegiatan	Indikator kinerja	unit	Pendanaan Per Tahun (dlm jutaan rupiah)										
				2016		2017		2018		2019		2020		
				Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
5	pengembangan produk (Product development) yang bermutu dan bernilai tinggi	tersedianya produk turunan industri agro	jenis											
6	perbaikan kemasan dalam kaitan volume, tampilan dan material	kemasan menarik												
7	survey penerimaan produk baru bagi peningkatan dan pengembangan produk secara berkesinambungan	input proses perbaikan	paket	1		1		1		1		1		
8	kerjasama pelatihan dengan lembag-lembaga pelatihan dalam upaya peningkatan kemampuan produksi dan manajerial	tenaga kerja dengan keterampilan khusus terkait industri agro	orang binaan	100		100		100		100		100		
9	peningkatan penguasaan teknologi proses	tenaga kerja dengan keterampilan khusus terkait industri agro	orang binaan	100		100		100		100		100		
10	Pembentukan unit pendamping pendukung industri agro	unit pendamping	unit			1								
11	perencanaan infrastruktur penunjang industri agro	regulasi	Keterse diaan	ada		ada		ada		ada		ada		
12	formulasi regulasi pendukung terbentuknya industri sgro	regulasi	Keterse Diaan	ada		ada		ada		ada		ada		
13	formulasi regulasi penggunaan produk lokal	regulasi	Keterse Diaan	ada		ada		ada		ada		ada		
14	formulasi regulasi kemudahan akses modal	regulasi	Keterse diaan	ada		ada		ada		ada		ada		
15	promosi peningkatan introduksi produk hasil	kegiatan	unit	1		2		2		2		2		

No	Kegiatan	Indikator kinerja	unit	Pendanaan Per Tahun (dlm jutaan rupiah)										
				2016		2017		2018		2019		2020		
				Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	industri agro													
16	penguatan IKM pengolah hasil agro potensial	unit industri	unit	5		5		5		5		5		
17	inisiasi IKM pengolah hasil agro baru di lokasi yang sama dengan IKM pengolah hasil agro yang telah terkuatkan.	unit industri	unit	5		5		5		5		5		
18	formulasi regulasi kemudahan akses modal	unit mitra permodalan	unit lembaga	5		5		5		5		5		
19	pengaitan kemitraan antara retailer modern dengan produsen produk agro olahan	mitra pemasaran di tingkat lokal	mitra	100		200		300		310		350		
20	pembentukan sentra-sentra akses produk industri agro	mitra pemasaran di tingkat nasional	provinsi	2		4		5		7		8		
21	inisiasi <i>mobile retailer</i> produk industri agro	jumlah mobile retailer	unit	10		30		50		75		100		
22	Pelatihan dan magang	jumlah IKM pengolah hasil agro binaan	unit binaan	15		15		15		15		15		
23	pelatihan dan magang			15		15		15		15		15		

10.2 Penetapan Indikator Kinerja Pembangunan Industri Agro Mete Propinsi

No	Kegiatan	Indikator kinerja	unit	Pendanaan Per Tahun (d/m jutaan rupiah)									
				2016		2017		2018		2019		2020	
				Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	peningkatan mutu bahan baku produksi	selisih antara produksi dan serapan pasar	%	30		25		20		15		10	
2	efisiensi saluran pasok	penurunan biaya	%	5		10		15		20		25	
3	pengaitan kemitraan yang lebih baik	jumlah mitra yang terjalin	mitra	1		2		3		4		5	
4	akses informasi yang lebih baik	%kepemilikan pusat informasi pada IKM binaan	%	60		70		80		90		100	
5	pengembangan produk (Product development) yang bermutu dan bernilai tinggi	tersedianya produk turunan industri agro	jenis	1		3		4		5		6	
6	perbaikan kemasan dalam kaitan volume, tampilan dan material	kemasan menarik											
7	survey penerimaan produk baru bagi peningkatan dan pengembangan produk secara berkelanjutan	input proses perbaikan	paket	1		1		1		1		1	
8	kerjasama pelatihan dengan lembag-lembaga pelatihan dalam upaya peningkatan kemampuan produksi dan manajerial	tenaga kerja dengan keterampilan khusus terkait industri agro	Jumlah orang binaan	100		100		100		100		100	
9	peningkatan penguasaan teknologi proses	tenaga kerja dengan keterampilan khusus terkait	Jumlah orang binaan	100		100		100		100		100	

No	Kegiatan	Indikator kinerja	unit	Pendanaan Per Tahun (dlm jutaan rupiah)										
				2016		2017		2018		2019		2020		
				Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		industri agro												
10	Pembentukan unit pendamping pendukung industri agro	unit pendamping	unit	-		-		1						
11	perencanaan infrastruktur penunjang industri agro	regulasi	Keterse diaan	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
12	formulasi regulasi pendukung terbentuknya industri sgro	regulasi	Keterse diaan	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
13	formulasi regulasi penggunaan produk lokal	regulasi	Keterse diaan	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
14	formulasi regulasi kemudahan akses modal	regulasi	Keterse diaan	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
15	promosi peningkatan introduksi produk hasil industri agro	kegiatan	unit	1		2		2		2		2		
16	penguatan IKM pengolah hasil agro potensial	unit industri	unit	2		2		2		2		2		
17	inisiasi IKM pengolah hasil agro baru di lokasi yang sama dengan IKM pengolah hasil agro yang telah terkuatkan.	unit industri	unit	2		2		2		2		2		
18	formulasi regulasi kemudahan akses modal	unit mitra permodalan	unit lembaga	2		5		5		5		5		
19	pengaitan kemitraan antara retailer modern dengan produsen produk agro olahan	mitra pemasaran di tingkat lokal	mitra	25		50		75		100		125		

No	Kegiatan	Indikator kinerja	unit	Pendanaan Per Tahun (dlm jutaan rupiah)									
				2016		2017		2018		2019		2020	
				Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
20	pembentukan sentra-sentra akses produk industri agro	mitra pemasaran di tingkat nasional	provinsi	2		4		5		7		8	
21	inisiasi <i>mobile retailer</i> produk industri agro	jumlah mobile retailer	unit	5		5		5		5		5	
22	Pelatihan dan magang	jumlah IKM pengolah hasil agro binaan	unit binaan	3		3		3		3		3	
23	pelatihan dan magang	jumlah IKM pengolah hasil agro binaan	unit binaan	3		3		3		3		3	

10.3 Road Map Pembangunan Industry Agro Unggulan Provinsi Bali

Dalam rangka pencapaian rencana pembangunan jangka menengah dinas perindustrian dan perdagangan Provinsi Bali, maka telah disusun peta jalan pembangunan industri agro unggulan provinsi yang di dalamnya memuat tentang uraian singkat tentang Visi dan Misi khusus pengembangan industry agro unggulan provinsi, strategi pencapaian dan program/aksi jangka menengah dan jangka panjang. Peta jalan ini disusun secara terpisah namun menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dokumen ini. Adapun peta jalan yang telah berhasil disusun ini disajikan menjadi sebuah lampiran dan disusun dengan urutan sebagai berikut:

1. Road Map Pengembangan Industry Agro Unggulan Kopi Provinsi Bali
2. Road Map Pengembangan Industry Agro Unggulan Salak Provinsi Bali
3. Road Map Pengembangan Industry Agro Unggulan Mete Provinsi Bali